



PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
KARIMUN



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Jendral Sudirman Poros
Website : www.karimunkab.go.id
Telp. (0777) - 7366010
Email : organisasi.karimun@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kita ucapkan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang tak terbatas sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari LKjIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi Pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan aparatur pemerintah Kabupaten Karimun mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing. Akhir kata semoga LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2021 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan Akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2022

 **BUPATI KARIMUN**

H. AUNUR RAFIQ



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun Tahun 2021 merupakan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang tahun 2021 terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun, secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun adalah baik sekali.

Adapun pencapaian dari masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sebanyak 16 (Enam belas) sasaran strategis atau 97,20% diperoleh pencapaian baik sekali/ sangat baik yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Adapun pencapaian dari masing-masing sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 secara rinci adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi dipusat pertumbuhan ekonomi	2 Indikator	117,81%	Sangat Baik
2.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	4 indikator	93,29%	Sangat Baik
3.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	2 Indikator	82,83%	Baik
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	4 Indikator	89,40%	Sangat Baik



5.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	3 Indikator	94,63%	Sangat Baik
6.	Menurunnya penduduk miskin	1 Indikator	94,62%	Sangat Baik
7.	Meningkatnya derajat kesehatan	3 Indikator	104,6%	Sangat Baik
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	5 Indikator	90,90%	Sangat Baik
9.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	2 Indikator	99,63%	Sangat Baik
10.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1 Indikator	98,63%	Sangat Baik
11.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1 Indikator	106,31%	Sangat Baik
12.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1 Indikator	100,88%	Sangat Baik
13.	Terjaga keselestarian lingkungan hidup	4 Indikator	101,45%	Sangat Baik
14.	Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	2 Indikator	81,125%	Baik
15.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	2 Indikator	99,37%	Sangat Baik
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Indikator	99,71%	Sangat Baik

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2021 adalah sebesar 97,20%. Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2021 adalah sebesar 95,49% dari total pagu anggaran atau sebesar Rp1.002.995.582.679,00. Melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	26
D. Sistematika Penyajian.....	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	29
A. Rencana Strategis.....	29
B. Rencana Kinerja.....	32
C. Perjanjian Kinerja	41
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2021.....	49
B. Pengukuran capaian Kinerja dibandingkan target Perjanjian Kinerja.....	52
C. Terwujudnya Pola Dan Struktur Ruang Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah.....	172
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	216
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai	217
F. Capaian Program	218
BAB IV PENUTUP	227
A. Kesimpulan.....	227
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	228



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 1.2.	Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 1.3	Luas Wilayah Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan Tahun 2021
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2021
Tabel 1.5.	Jumlah Penduduk (Laki - Laki / Perempuan) dan Wajib KTP Kabupaten Karimun Per Desember Tahun 2021
Tabel 1.6	Data Hasil Perekaman e-KTP Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2021
Tabel 1.7	Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2021
Tabel 1.8	Jumlah Produksi Usaha Perikanan Tangkap Per-Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 1.9.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kabupaten Menengah Tahun 2020- 2021
Tabel 1.10	Rekapitulasi Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Se-Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 1.11	Data Ekspor Impor Kabupaten Karimun Tahun 2019-2021 (US \$)
Tabel 1.12	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021
Tabel 1.13	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Per 31 Desember 2021
Tabel 1.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 Per 31 Desember 2021
Tabel 1.15	Anggaran Belanja Operasional
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun 2016-2021
Tabel 2.2.	Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 2.3.	16 (enam belas) Sasaran dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Sasaran Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 2.4.	Rencana Kinerja tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.1.	Pengukuran capaian kinerja tahun 2021
Tabel 3.2.	Perbandingan Data Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.3.	Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran 1
Tabel 3.4.	Data Ekspor Berdasarkan Komoditas Dari Urutan Nilai Tertinggi S/D Terendah Tahun 2020 - 2021
Tabel 3.5.	Data Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Utama Dari Nilai Tertinggi S.D.Terendah Tahun 2020- 2021.
Tabel 3.6.	Realisasi Ekspor Kabupaten Karimun Menurut Pelabuhan Utama Tahun 2020-2021 Dalam Us\$



Tabel 3.7.	Data Perbandingan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Di Kabupaten Karimun Tahun 2020 Dan Tahun 2021
Tabel 3.8.	Provinsi Yang Menjadi Tempat Favorit Investor Asing (Pma) Tahun 2021
Tabel 3.9.	Perkembangan Investasi Berdasarkan Jenis Investasi Pma,Pmdn Kabupaten Karimun S.D Tahun 2021
Tabel 3.10.	Nilai Investasi Dalam Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Maupun Luar Kawasan Tahun 2021
Tabel 3.11.	Analisis Efisiensi Biaya Meningkatnya Minat Investasi Tahun 2021
Tabel 3.12.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2021
Tabel 3.13.	Capaian Dari Masing-Masing Indikator 1 Dan 2 Pada Sasaran 2
Tabel 3.14.	Jumlah Produksi Tanaman Padi Dan Jagung Tahun 2019 S.D 2021 Kecamatan
Tabel 3.15.	Jumlah Produktivitas Tanaman Padi Dan Jagung Tahun 2019 S.D 2021 Per Kecamatan
Tabel 3.16.	Produksi Tanaman Karet Dan Kelapa Tahun 2019 S.D 2021 Per Kecamatan
Tabel 3.17.	Produktivitas Tanaman Karet Dan Kelapa Tahun 2019 S.D 2021 Per Kecamatan
Tabel 3.18.	Volume Dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.19.	Produksi Perikanan Budidaya Dan Tangkap 2020 S.D. 2021
Tabel 3.20.	Armada Penangkapan Perikanan Per Kecamatan Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.21.	Volume Dan Produksi Perikanan 2014 S.D 2021
Tabel 3.22.	Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2015 S.D . 2021
Tabel 3.23.	Volume Dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2021
Tabel 3.24.	Capaian Indikator
Tabel 3.25.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Kabupaten Karimun Tahun 2015 – 2021
Tabel 3.26.	Jumlah Kunjungan Wisman Kab/Kota Se Prov.Kepri Tahun 2017 - 2021
Tabel 3.27.	Tingkat Hunian Hotel Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.28.	Tingkat Hunian Hotel Di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021
Tabel 3.29.	Insfratraktur Yang Sudah Dibangun Pada Objek Wisata Pantai Pelawan Dari Tahun 2018- 2021
Tabel 3.30.	Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran
Tabel 3.31.	Panjang Jalan Terhubung Antar Wilayah Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Karimun Sampai Dengan Tahun 2021 (Meter)
Tabel 3.32.	Titik Akses Penghubung Tahun 2019 -2021
Tabel 3.33.	Pulau-Pulau Berpenghuni Yang Terlayani Transportasi Laut Reguler Tahun 2017 S.D 2021
Tabel 3.34.	Jumlah Pelabuhan Laut Yang Memadai Kecamatan / Pulau Se Kabupaten Karimun Tahun 2018 S.D 2021
Tabel 3.35.	Evaluasi Pencapaian Sasaran
Tabel 3.36.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Tabel 3.37.	Proporsi Panjang Jalan Beraspal Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Karimun



Tabel 3.38.	Program Dan Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021
Tabel 3.39.	Indikator Kinerja, Target, Realisasi Dan Capaian Tahun 2020 Dan 2021
Tabel 3.40.	Data Desa Yang Belum Terjangkau Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020-2021
Tabel 3.41.	Data Relokasi Titik Internet
Tabel 3.42.	Evaluasi Pencapaian
Tabel 3.43.	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah
Tabel 3.44.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Ri Nomor 145/Huk/2021
Tabel 3.45.	Data Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kab. Karimun Tahun 2016 – 2021
Tabel 3.46.	Data Penerima Manfaat Program Bpnt/Program Sembako Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021
Tabel 3.47.	Data Penerima Manfaat Pbi – Jk Di Kabupaten Karimun Tahun 2019 – 2021
Tabel 3.48.	Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Program Sembako Ppkm Tahun 2021
Tabel 3.49.	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Tabel 3.50.	Angka Kematian Ibu Per Kecamatan Tahun 2021
Tabel 3.51.	Angka Kematian Bayi Per Kecamatan Tahun 2021
Tabel 3.52.	Distribusi Jumlah Kasus Kematian Bayi (Akab) Berdasarkan Faktor Penyebab Kematian Tahun 2021
Tabel 3.53.	Distribusi Penemuan Kasus Baru Hiv/Aids Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.54.	Analisis Efisiensi Per Sasaran
Tabel 3.55.	Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran
Tabel 3.56.	Capaian Masing-Masing Indikator
Tabel 3.57.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2019 – 2021
Tabel 3.58.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.59.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Dan Nasional Tahun 2019 – 2021
Tabel 3.60.	Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Tahun 2020 – 2021
Tabel 3.61.	Pendaftar Pencari Kerja (Pencaker) Yang Ditempatkan Tahun 2021
Tabel 3.62.	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 2021
Tabel 3.63.	Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Tabel 3.64.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.65.	Capaian Indikator Sasaran 10
Tabel 3.66.	Angka Melek Huruf (Amh)/Angka Harapan Lama Sekolah (Ahl),Angka Partisipasi Kasar (Apk), Angka Partisipasi Murni (Apm), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Arll) Dan Angka Harapan Hidup (Ahh) Kabupaten Karimun Tahun 2017-2021



Tabel 3.67.	Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020
Tabel 3.68.	Capaian Indikator Sasaran 11
Tabel 3.69.	Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.70.	Data Kelahiran Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.71.	Data Pasangan Usia Subur Dan Peserta Kb Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.72.	Data Kematian Penduduk Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.73.	Data Penduduk Pindah Datang Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.74.	Data Penduduk Pindah Pergi Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.75.	Capaian Indikator Sasaran 13
Tabel 3.76.	Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Yang Sesuai Dengan Pemanfaatan Ruang Wilayah Menurut Kecamatan Pada Tahun 2020
Tabel 3.77.	Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran 13
Tabel 3.78.	Indikator Dan Parameter Iklh
Tabel 3.79.	Perhitungan Hasil Pemantauan Dan Pengukuran Kualitas Air Selama Tahun 2021
Tabel 3.80.	Persentase Standard Pemenuhan Mutu Air
Tabel 3.81.	Perhitungan Hasil Pemantauan Dan Pengukuran Kualitas Udara Tahun 2021
Tabel 3.82.	Pembandingan Hasil Pemantauan Kualitas Udara Dengan <i>Standar Eu Directives</i>
Tabel 3.83.	Penentuan Kategori Indeks Kualitas Lahan
Tabel 3.84.	Perhitungan Hasil Pemantauan Dan Pengukuran Kualitas Lahan Tahun 2021
Tabel 3.86.	Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Kabupaten Karimun Tahun 2017
Tabel 3.87.	Luas Area Penanganan Banjir Di Kabupaten Karimun Tahun 2018 - 2020
Tabel 3.88.	Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Tabel 3.89.	Target, Realisasi Dan Capaian Jumlah Jamaah Haji Yang Mendaftar Serta Yang Diberangkatkan
Tabel 3.90	Data Kuota Calon Jamaah Haji Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 3.91.	Jumlah Muzaki Di Kabupaten Karimun Januari – Desember 2021
Tabel 3.92.	Jumlah Muzaki, Penerimaan Zakat Maal, Profesi Dan Infaq Kabupaten Karimun 2015-2020
Tabel 3.93.	Capaian Indikator
Tabel 3.94.	Rincian Penilaian Komponen Indeks Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Dan 2020
Tabel 3.95.	Kenaikan Nilai Masing-Masing Komponen Indeks Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019-2020
Tabel 3.96.	Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2020
Tabel 3.97.	Program Kegiatan Sebagai Pendukung Indikator Kinerja Tahun 2020 Dan 2021
Tabel 3.98	Capaian Indikator Sasaran 16



Tabel 3.99.	Nilai Persepsi, Interval Ikm, Interval Konversi Ikm, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan
Tabel 3.100.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Rsud Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2020 Dan 2021
Tabel 3.101.	Ikm Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan Pada Rsud Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.102.	Data Realisasi Dan Capaian Indikator Sasaran 16 Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.103.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan Berdasarkan Masing-Masing Unsurpelayanan Pada Disdukcapil Kab. Karimun Tahun 2021
Tabel 3.104.	Data Interval Niiai Kinerja Unit Pelayanan
Tabel 3.105.	Capaian Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.106.	Interval Nilai Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Lama Waktu Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.107.	Capaian Rata-Rata Lama Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2021
Tabel 3.108.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Tabel 3.109.	Jawaban Responden Per Unsur Pelayanan
Tabel 3.110.	Capaian Unsur Pelayanan
Tabel 3.111.	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tabel 3.112.	Nilai Ikm Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Karimun Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Dan 2020,2021
Tabel 3.113.	Kategorisasi Mutu Pelayanan
Tabel 3.114.	Capaian Program Dan Keuangan Yang Mendukung Sasaran Dan Indikator

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2014-2021
Grafik 3.1.	Perkembangan Investasi Berdasarkan Jenis Investasi Pma,Pmdn S.D Tahun 2021
Grafik 3.2.	Nilai Investasi Dalam Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Ftz)Maupun Luar Kawasan (Non Ftz) Tahun 2021
Grafik 3.3.	Realisasi Investasi Dalam Kbpb Dan Di Luar Kbpb Per Triwulan Tahun 2021
Grafik 3.4.	Persentase Wilayah Kabupaten Karimun Yang Terjangkau Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 Dan 2021
Grafik 3.5.	Persentase Wilayah Kabupaten Karimun Yang Terjangkau Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020
Grafik 3.6.	Grafik Pertumbuhan Penduduk Miskin Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021
Grafik 3.7.	Grafik Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021
Grafik 3.8.	Grafik Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Grafik 3.9.	Perkembangan Angka Kematian Ibu (Aki) Melahirkan Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021
Grafik 3.10.	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021
Grafik 3.11.	Distribusi Masa/Periode Kematian Ibu Melahirkan Di Kabupaten Karimun Tahun 2020
Grafik 3.12.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (Akb) Di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021
Grafik 3.13.	Distribusi Kematian Bayi Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Grafik 3.14.	Prevalensi Penyakit Hiv/Aid's Di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021
Grafik 3.15.	Perkembangan Jumlah Kasus Hiv / Aids Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020
Grafik 3.16.	Distribusi Jumlah Kasus Baru Hiv Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupataten Karimun Tahun 2021
Grafik 3.17.	Perkembangan Jumlah Kasus Hiv/Aids Dan Kumulatif Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021
Grafik 3.18.	Proporsi Penderita Hiv/Aid's Menurut Faktor Resiko Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Grafik 3.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (Apk) Dan Angka Partisipasi Murni (Apm) Sd/Mi/Paket A Di Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2021
Grafik 3.20.	Apk Dan Apm Sd/Mi/Paket A Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Grafik 3.21.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (Apk) Dan Angka Partisipasi Murni (Apm) Smp/Mts/Paket B Di Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2021



Grafik 3.22.	Apk Dan Apm Smp/Mts/Paket B Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Grafik 3.23.	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2021
Grafik 3.24.	Angka Harapan Lama Sekolah (Ahls) Kabupaten Karimun Tahun 2017 - 2021
Grafik 3.25.	Capaian Ipg, Idg Dan Ipm Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020
Grafik 3.26.	Ipg, Ipm Dan Idg Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021
Grafik 3.27.	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021
Grafik 3.28.	Skor indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Wilayah Kabupaten Karimun
Gambar 1.2.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.1.	Kegiatan Dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Karimun Tahun 2021
Gambar 3.2.	Pembangunan Laboratorium Komputer, Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Pembangunan Ruang Guru Dan Pembangunan Ruang Uks Yang Bersumber Dari Apbn Melalui Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Tahun 2021
Gambar 3.3	Struktur Dan Bobot Persentase Iklh



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/ kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tertanggal 11 Juli 2012 secara administratif Kabupaten Karimun mengalami pemekaran dari 9 Kecamatan menjadi 12 kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 desa, dengan ibukota Kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini :

Tabel 1.1
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN IBUKOTA KECAMATAN SERTA JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DI KAB.KARIMUN TAHUN 2021

WILAYAH ADMINISTRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				
		KELURAHAN	DESA	RW	RT	PULAU
Moro	Moro	2	10	51	136	84
Durai	Durai	-	4	14	39	46
Kundur	Tanjung Batu Kota	3	3	51	145	1
Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	-
Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	11
Karimun	Tanjung Balai	6	3	40	142	24
Buru	Buru	2	2	29	64	7
Meral	Meral	6	-	30	119	4
Tebing	Tebing	5	1	25	73	5
Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	20
Belat	Sebele	-	6	28	65	25
Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	22
JUMLAH		29	42	397	1.089	249

Sumber : *Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2021*



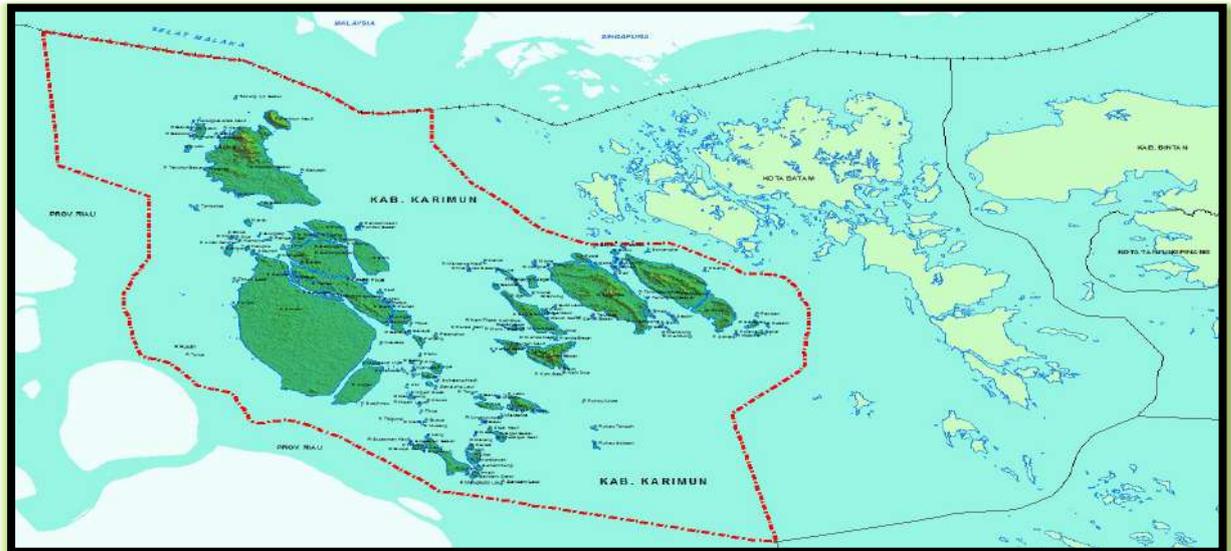
1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten pemekaran yang terbentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999 dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota kabupaten terletak pada Kota Tanjung Balai.

Wilayah Kabupaten Karimun terletak pada koordinat $00^{\circ} 24' 36''$ LU sampai $01^{\circ} 13' 12''$ LU dan $103^{\circ} 13' 12''$ BT sampai $104^{\circ} 00' 36''$ BT dan termasuk kedalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan maritim. Hal ini dikarenakan letaknya yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karimun adalah sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kateman. (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kabupaten Pelalawan) serta sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam).

Kabupaten Karimun secara keseluruhan memiliki luas wilayah 7.984 Km², yang terdiri dari luas perairan seluas 6460 Km² (80,91%) dan luas daratan 1524 Km²(19,09%). Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 249 buah pulau yang seluruhnya sudah memiliki nama, namun baru sebanyak 39 pulau di antaranya yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar di wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur. berikut peta wilayah Kabupaten Karimun

Gambar 1.1.
PETA WILAYAH KABUPATEN KARIMUN



Adapun luas wilayah dan jumlah pulau berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada table 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2
PERSENTASE LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PULAU MENURUT KECAMATAN
DIKABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

KECAMATAN	DARATAN		LAUTAN		JUMLAH PULAU
	KM ²	%	KM ²	%	
Moro	1.166,80	76,56	1.668,44	25,83	84
Durai	52,00	3,41	1.480,54	22,92	46
Kundur	34,30	2,25	449,93	6,96	1
Karimun	49,90	3,27	404,06	6,25	24
Kundur Utara	29,50	1,94	509,15	7,88	-
Kundur Barat	21,70	1,42	267,12	4,13	11
Buru	17,80	1,17	366,88	5,68	7
Meral	80,00	5,25	515,41	7,98	4
Tebing	72,00	4,72	798,47	12,36	5
Meral Barat	NA	NA	NA	NA	20
Belat	NA	NA	NA	NA	25
Ungar	NA	NA	NA	NA	22
JUMLAH	1.524,00	19,09	6.460,00	80,91	249

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2021

Secara umum Kabupaten Karimun memiliki karakteristik wilayah dataran yang datar dan landai serta berada pada ketinggian antara 2



sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga wilayah yang memiliki karakteristik berbukit-bukit dengan kemiringan sampai dengan 40° serta berada pada ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Kabupaten Karimun juga memiliki sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air. Disamping itu terdapat pula beberapa pulau yang memiliki rawa-rawa.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan. sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (meliputi kuantitas, distribusi, komposisi, dan kualitas). untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka memperoleh subyek yang berkualitas.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki. Luas wilayah di Kabupaten Karimun menurut Kecamatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel I.3

Tabel 1.3
LUAS WILAYAH KABUPATEN KARIMUN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM²)
Moro	2351.36
Durai	319.36
Kundur	479.04
Kundur Utara	1277.44
Kundur Barat	958.08
Karimun	319.36
Buru	399.2
Meral	319.36
Tebing	399.2
Meral Barat	319.36
Belat	558.88
Ungar	319.36
TOTAL	7.700.64

Sumber : *Badan Pusat Statistik Karimun Tahun 2021*



Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2021 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik berjumlah **260.620** jiwa. Penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (heterogen) dan lebih didominasi oleh suku Melayu.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun pada tahun 2021 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah **83.097 KK** (67.011) laki-laki dan (16.086) perempuan tersebar di dua belas kecamatan di Kabupaten Karimun. Kecamatan dengan jumlah

terbanyak adalah Kecamatan Karimun sebanyak **16.911** KK diikuti oleh Kecamatan Meral yaitu **15.401** KK. sedangkan Kecamatan Ungar yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki jumlah KK sebanyak **2.011** KK. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah KK di Kabupaten Karimun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel I.4. dibawah ini :

Tabel 1.4
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA KABUPATEN KARIMUN
MENURUT WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN KK LAKI-LAKI	BERDASARKAN KK PEREMPUAN	JUMLAH KK
1	MORO	19.005	4.980	1.135	6.115
2	KUNDUR	30.947	7.930	2.123	10.053
3	KARIMUN	52.134	13.205	3.706	16.911
4	MERAL	50.188	12.530	2.871	15.401
5	TEBING	31.169	7.929	1.734	9.663
6	BURU	10.313	2.806	629	3.435
7	KUNDUR UTARA	12.810	3.338	779	4.117
8	KUNDUR BARAT	18.797	5.012	1.054	6.066
9	DURAI	6.278	1.645	427	2.072
10	MERAL BARAT	16.305	4.245	796	5.041
11	UNGAR	5.884	1.606	405	2.011
12	BELAT	6.790	1.785	427	2.212
TOTAL		260.620	67.011	16.086	83.097

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan



menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Kedekatan Kabupaten Karimun dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industry, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Semakin menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah penduduk dan wajib KTP per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini:

Tabel 1.5
JUMLAH PENDUDUK (LAKI - LAKI / PEREMPUAN) DAN WAJIB KTP
KABUPATEN KARIMUN PER DESEMBER TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	WAJIB KTP
1	MORO	9.789	9.216	19.005	13.508
2	KUNDUR	15.461	15.486	30.947	22.776
3	KARIMUN	26.616	25.518	52.134	36.950
4	MERAL	25.905	24.283	50.188	34.884
5	TEBING	15.854	15.315	31.169	21.315
6	BURU	5.315	4.998	10.313	7.597
7	KUNDUR UTARA	6.577	6.233	12.810	9.379
8	KUNDUR BARAT	9.631	9.166	18.797	13.519
9	DURAI	3.243	3.035	6.278	4.507
10	MERAL BARAT	8.421	7.884	16.305	10.979
11	UNGAR	2.982	2.902	5.884	4.385
12	BELAT	3.557	3.233	6.790	4.983
TOTAL		133.351	127.269	260.620	184.782

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021



Kabupaten Karimun juga sudah melaksanakan perekaman data penduduk berdasarkan perekaman e-KTP yang mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Untuk mengetahui lebih jelas penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP dapat dilihat pada table I.6 dibawah ini :

Tabel 1.6
DATA HASIL PEREKAMAN E-KTP KABUPATEN KARIMUN
MENURUT WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	PERSENTASE (%)	SISA PEREKAMAN
1	MORO	13.508	13.498	99.92	10
2	KUNDUR	22.776	22.767	99.96	9
3	KARIMUN	36.950	36.930	99.94	20
4	MERAL	34.884	34.874	99.97	10
5	TEBING	21.315	21.315	100	-
6	BURU	7.597	7.595	99.97	2
7	KUNDUR UTARA	9.379	9.376	99.96	3
9	DURAI	4.507	4.500	99.84	7
10	MERAL BARAT	10.979	10.973	99.94	6
11	UNGAR	4.385	4.385	100	-
12	BELAT	4.983	4.983	100	-
TOTAL		184.782	184.698	99.950	84

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

TABEL 1.7
DATA PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN
KABUPATEN KARIMUN MENURUT WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN
1	2	3	4
1	MORO	8.562	6.213
2	KUNDUR	16.160	13.067
3	KARIMUN	24.695	15.298
4	MERAL	27.427	16.212
5	TEBING	16.955	11.321
6	BURU	5.128	3.437
7	KUNDUR UTARA	7.024	5.352



1	2	3	4
8	KUNDUR BARAT	10.236	8.381
9	DURAI	3.034	2.618
10	MERAL BARAT	8.535	5.807
11	UNGAR	2.790	2.636
12	BELAT	3.434	2.678
TOTAL		133.980	93.020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

3. POTENSI UNGGULAN DAERAH

a. Sektor Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah kepulauan memiliki luas perairan jauh lebih luas dari daratan dimana luas wilayah perairan seluas 80,91 % dan daratan seluas 19,09 %. Hal ini tentu menjadikan wilayah Kabupaten Karimun memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Dari sektor kelautan, Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia menjadikan Kabupaten Karimun sebagai lokasi yang strategis sebagai tempat industri galangan kapal dan industri terkait lainnya sehingga terdapat beberapa perusahaan besar asing maupun nasional yang bergerak dibidang galangan kapal dan bidang terkait lainnya yang menanamkan investasinya di Kabupaten Karimun. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal.

Untuk sektor perikanan, Kabupaten Karimun memiliki potensi yang strategis untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Adapun potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah dari sub sektor perikanan tangkap dan sub sektor perikanan budidaya produksi perikanan tangkap memiliki volume produksi yang sangat besar dibandingkan usaha perikanan lainnya. Produk perikanan tangkap merupakan sumber utama untuk kebutuhan konsumsi ikan Kabupaten Karimun serta daerah sekitarnya. Selain itu ikan segar maupun



olahannya juga diekspor dengan negara tujuan Singapura dan Malaysia. Tingginya produksi perikanan tangkap Kabupaten Karimun juga seiring dengan besarnya jumlah masyarakat Kabupaten Karimun yang melakukan aktivitas sebagai nelayan. Hal ini juga ditunjang dengan luasnya areal perairan Kabupaten Karimun dan besarnya jumlah armada penangkapan Kabupten Karimun.

Tabel 1.8
JUMLAH PRODUKSI USAHA PERIKANAN TANGKAP PER-KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

No	Kecamatan	Perikanan Tangkap 2017	Perikanan Tangkap 2018	Perikanan Tangkap 2019	Perikanan Tangkap 2020	Perikanan Tangkap 2021
		Volume (Ton)				
1	Karimun	7.734	8.971	8.944	7.483	7.686,93
2	Meral	21.577	25.029	24.036	21.223	9.140,91
3	Tebing	1.673	1.941	1.746	1.826	1.686,40
4	Kundur	171	198	298	554	315,74
5	Kundur Barat	470	545	544	937	579,54
6	Kundur Utara	208	241	406	357	441,99
7	Buru	3.410	3.950	3.818	2.728	1.965,46
8	Moro	12.427	14.415	14.358	14.337	8.602,47
9	Durai	1.595	1.850	1.533	844	945,11
10	Meral Barat	1.727	2.003	1.155	1.322	1.271,94
11	Belat	506	587	375	590	504,92
12	Ungar	535	621	404	320	598,69
Jumlah Total Produksi		60.166	60.358	57.621	52.521	33.740,08

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2021

Jika dilihat dari tabel diatas, jumlah produksi perikanan tangkap mengalami penurunan ditahun 2021 ini, dengan target produksi perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Karimun sebesar 47.000 ton. Dari data tabel diatas bisa diketahui bahwa Kecamatan Meral memiliki Volume produksi tertinggi dengan jumlah 9.140,91 Ton, Kecamatan Moro memiliki volume poduksi sebesar 8.602,47 Ton, sedangkan Kecamatan Karimun memiliki volume produksi sebesar 7.686,93 Ton. Sebagai upaya untuk selalu memenuhi target produktivitas dan produksi perikanan, setiap masukan dari para pelaku usaha perikanan tangkap akan ditindak lanjuti yang diakomodir oleh tenaga pengelola data kelembagaan dan masyarakat yang berada di setiap



kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di 5 Pulau Besar yaitu Karimun, Buru, Moro, Kundur dan Durai.

Untuk potensi unggulan sektor perikanan berupa Produksi dan Ekspor Produk Perikanan akan dijelaskan pada Bab III, yang menjadi Indikator Sasaran 2 (dua) Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

b. Sektor Industri Kecil Menengah (IKM)

Pelaku usaha sektor industri kecil menengah di Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami sedikit pertumbuhan. Hal ini menunjukkan jumlah pelaku usaha sektor industri kecil menengah masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan pelaku usaha sektor industri kecil menengah di Kabupaten Karimun dari tahun 2019 s.d. 2021 dapat dilihat pada table 1.9. dibawah ini :

Tabel 1.9
PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN MENENGAH
TAHUN 2019- 2021

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)			Pertambahan IKM Tahun 2021
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
		(pelaku usaha)	(pelaku usaha)	(pelaku usaha)	
1	2	3	4	5	6
1	Karimun	184	211	216	5
2	Meral	180	198	201	3
3	Meral barat	37	69	72	3
4	Tebing	186	258	260	2
5	Kundur	178	231	231	0
6	Kundur Barat	76	109	111	2
7	Kundur Utara	71	91	93	2
8	Buru	65	105	105	0
9	Moro	110	121	123	2
10	Durai	38	38	38	0
11	Belat	25	32	32	0
12	Ungar	84	84	85	1
Jumlah		1234	1547	1567	20

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021



Dari tabel 1.9. diatas analisa atas capaian indikator Sasaran Strategis II bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan IKM berjumlah 1547 IKM, sementara pada tahun 2021 berjumlah 1567 IKM. Maka realisasinya 1,29% dengan capaian **101,29%**.

c. Sektor Usaha kecil menengah

Pertumbuhan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Karimun senantiasa mengalami perkembangan, munculnya UKM yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan dengan ditandainya perkembangan kategori usaha. Jenis usaha mikro adalah yang paling banyak ditemukan di kalangan pelaku UKM Kabupaten Karimun, yakni jenis usaha antara lain usaha perdagangan, sektor produksi makanan kemasan, aneka usaha serta para pelaku kerajinan dan beberapa lainnya. Berikut ditampilkan perkembangan jumlah UKM Kabupaten Karimun tahun 2014-2021 pada tabel 1.10 dibawah ini :

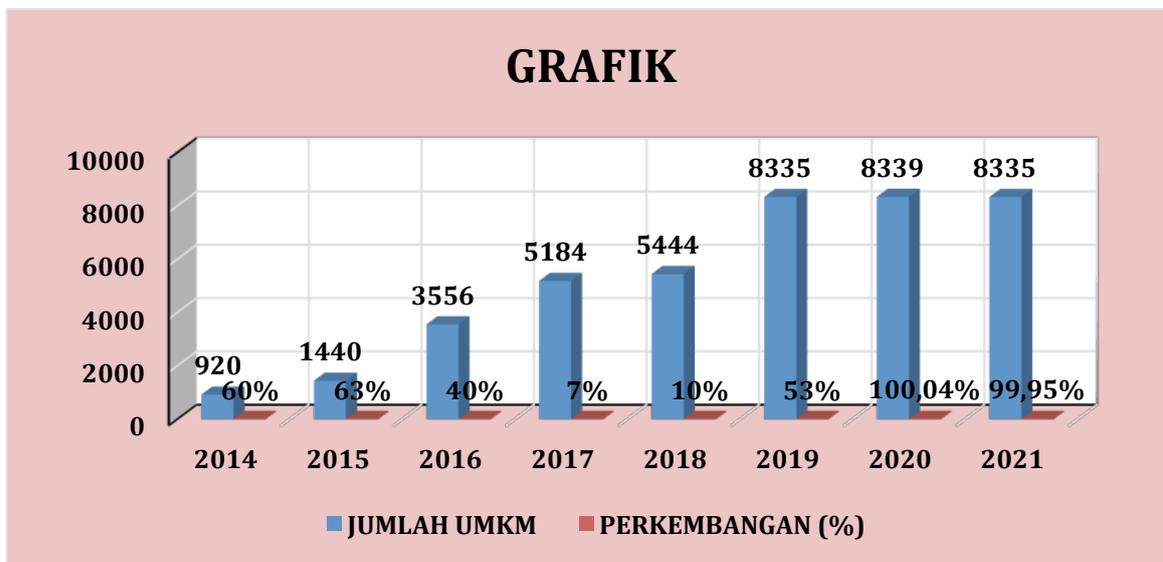
Tabel 1.10

PERKEMBANGAN JUMLAH UKM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014-2021

TAHUN	JUMLAH UMKM	PERKEMBANGAN (%)
2014	920	60%
2015	1440	63%
2016	3556	40%
2017	5184	7%
2018	5444	10%
2019	8335	53%
2020	8339	100.04%
2021	8335	99.95%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, dan ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2021

Untuk melihat gambaran perkembangan usaha kecil menengah Kabupaten Karimun tahun 2014-2021 dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut ini :

Grafik 1.1**PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2014-2021****d. Perdagangan Luar Negeri**

Nilai Ekspor Kabupaten Karimun Januari s/d Desember 2021 mencapai US\$ 1.876.960.780,98 atau naik sebesar US\$ 676.960.780,00. dibanding nilai ekspor 2020 sebesar US\$ 1.005.351.931. Kenaikan tersebut terjadi hampir diseluruh komoditas maupun negara tujuan. Kenaikan tersebut juga berpengaruh terhadap realisasi capaian 2021 yang menargetkan US\$ 1.200.000.000, dimana persentase capaian meningkat menjadi sebesar 156,4 % persen.

Ekspor migas (bahan bakar mineral) 2021 sebesar US\$ 1.621.191.970 mengalami kenaikan US\$ 773.178.984 atau 47.69 persen dibandingkan pada tahun 2020 sebesar US\$ 848.012.986,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor Kabupaten Karimun bukan sebagai daerah penghasil migas dan PT. Oiltanking Karimun sebagai satu-satunya perusahaan pengeksport olahan migas mengalami kenaikan penurunan produksi untuk pangsa ekspor walaupun Kabupaten Karimun bukan sebagai daerah penghasil migas.



Ekspor nonmigas terbesar 2021 berasal dari sektor pertambangan yakni timah batangan sebesar US\$ 80.334.350,00 yang mengalami penurunan sebesar US\$ 5.851.725,00 atau 6,92 persen dari tahun 2020 sebesar US\$ 86.186.075,00. Hal ini dikarenakan penambangan bijih timah di Kabupaten Karimun hanya digerakkan oleh PT. Timah Kundur. Sedangkan dua perusahaan penambangan timah lainnya, yakni PT. Unindo Usaha Mandiri dan PT. Karimun Mining berhenti berproduksi yang ditandai dengan berhentinya operasional peleburan (smelter) bijih timah menjadi timah batangan di Desa Pangke sejak tiga tahun terakhir. Walaupun selama tahun 2021 terjadi pandemic covid 19 tidak menyebabkan nilai ekspor menurun dari tahun 2020, tercatat beberapa komoditas yang mengalami Kenaikan yakni pada komoditas besi dan baja yang berada pada urutan komoditas ekspor terbesar keempat sebesar US\$ 47.808.249 naik sebesar 47.575.679 atau 99.51% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar US\$ 232,570. Berikut ditampilkan data ekspor impor Kabupaten Karimun Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.11 dibawah ini :

Tabel 1.11**DATA EKSPOR IMPOR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018-2021 (US \$)**

URAIAN	TAHUN				(%)
	2018*	2019*	2020*	2021	
EKSPOR	1.401.902.322	1.253.314.672	1.005.351.931	1.876.960.780	186.67 %
IMPOR	1.562.260.347	841.515.153	1.105.325.696	1.787.616.383	161.72 %

Sumber : BPS Kabupaten Karimun Tahun 2021

4. APARAT PEMERINTAH

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Karimun didukung oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebanyak **3777** (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Golongan I sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, Golongan II



sebanyak 814 (Delapan Ratus Empat Belas) orang, Golongan III sebanyak 2.412 (Dua Ribu empat ratus dua belas) orang dan Golongan IV sebanyak 507 (Lima Ratus Tujuh) orang.

- b. Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II sebanyak 31 (Dua puluh Enam) orang, Eselon III sebanyak 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang, Eselon IV sebanyak 490 (Empat Ratus Sembilan puluh) orang.
- c. Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari Jabatan Tenaga Guru sebanyak 1.307 (Seribu Tiga Ratus Tujuh) orang, Jabatan Pengawas Sekolah sebanyak 25 (Dua puluh lima) orang, Dokter Umum sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang, Dokter Spesialis sebanyak 34 (Tiga puluh Empat) orang, Perawat sebanyak 168 (seratus enam puluh Delapan) orang, Bidan sebanyak 129 (Seratus Dua puluh Sembilan) orang, JFT Lainnya dilingkungan kesehatan sebanyak 56 (Lima puluh Enam) orang, dan JFT Teknis lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) orang.
- d. Tingkat Pendidikan terdiri dari SD sebanyak 12 (Dua belas) orang, SMP sebanyak 46 (Empat puluh Enam) Orang, SMA/D1 sebanyak 679 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan) orang, D2 sebanyak 230 (Dua ratus tiga puluh) orang, D3 sebanyak 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) orang, D4/S1 sebanyak 1.992 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang, S2 sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) orang, S3 sebanyak 7 (Tujuh) orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian Penghargaan Tahun 2021 :

- 1) Satya Lencana dengan masa kerja 10 tahun, sejumlah : 328 (Tiga ratus Dua puluh Delapan)orang.
- 2) Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun, sejumlah : 60 (Enam puluh) orang.
- 3) Satya Lencana dengan masa kerja 30 tahun, sejumlah : 43 (Empat



puluh tiga) orang.

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Diklatpim I : Nihil,
- 2) Diklatpim II : 17 orang
- 3) Diklatpim III : 62 orang,
- 4) Diklatpim IV : 130 orang.

c. Pemberian Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak : 14 orang, terdiri dari :

- 1) Pelanggaran disiplin tingkat ringan : 1 orang,
- 2) Pelanggaran disiplin tingkat sedang : Nihil,
- 3) Pelanggaran disiplin tingkat berat : Nihil.

5. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) ORGANISASI

Berbagai potensi, kondisi, permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karimun di tahun 2021, serta merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021. maka perlu diketahui isu strategis dan permasalahan yang berkembang di tahun 2021 yang sedang dihadapi organisasi, yaitu :

- 1) Perlunya konektivitas antar pulau untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat;
- 2) Subsektor perikanan dan perkebunan adalah subsektor utama yang perlu dikembangkan sebagai penopang kegiatan produksi rakyat;
- 3) Status Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dapat mendorong akselerasi pembangunan ekonomi;
- 4) Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal dan merata khususnya untuk daerah terpencil dengan aksesibilitas yang terbatas;



- 5) Pentingnya pengembangan teknologi dan akses terhadap informasi terkait aktivitas perikanan tangkap;
- 6) Perlunya menetapkan zonasi kawasan perikanan tangkap dan budidaya secara partisipatif;
- 7) Pentingnya menjadi yang terdepan dalam pengembangan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) Praktek pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengancam keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang;
- 9) Meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

6. KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun telah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan teknis anggaran berbasis kinerja tahun 2021 digunakan yaitu RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021. Bahwa Pendapatan dan Belanja Daerah Sebesar Rp. 37.603.530.000 . Berpedoman pada Proyeksi indikator Makro ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi, maka staretegi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 diarahkan :



1. Meningkatkan Sumber Penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proposional.
2. Meningkatkan efisiensi pengelola APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.12
REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31
DESEMBER 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah	386.623.101.742	454.589.392.409,48	117,58	295,730,669,462.08
	Transfer Dana Perimbangan	657.297.842.346	690.559.381.026	105,6	769,278,643,234.00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	729.883.137.346	762.355.828.354	104,45	
	Transfer Pemerintah Provinsi	78.127.339.813,00	58.819.284.610,00	75,29	
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	37.603.530.000,00	37.603.530.000,00	100	159.988.162.372,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun Tahun 2021



b. Pengelolaan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan prestasi kerja. Hal tersebut untuk meningkatkan Akuntabilitas meningkatkan perencanaan anggaran serta efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orinetasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok fungsi masing-masing opd. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik eksistensi penyelengaranan pemerintahan. Dalam penggunaannya belanja tetap mendepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas program strategi daerah. Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Dana tranfer yang masing-masing Untuk meningkataka Pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.13

REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PER 31 DESEMBER 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.002.995.582.679,00	957.809.903.586,24	95,49
2	Belanja Modal	162.286.695.548,00	153.729.093.571,00	94,73
3	Belanja Tak Terduga	7.030.088.074,00	6.925.592.266,00	98,51

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun Tahun 2021

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan Transaksi Keuangan yang bertujuan Untuk menutupi Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Kebijakan Daerah Sebagai Berikut :



1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam Rangka Akurasi, Efisiensi, efektifitas dan Profittabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam Bentuk Giro/ Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Tabel 1.14
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021
Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
	Pembiayaan		
1	Penerimaan Daerah	40.068.049.663,00	144.096.465.242
2	Pengeluaran Daerah	100.000.000.00	100.000.00 0.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun Tahun 2021

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

- a) Faktor-faktor Pendukung adalah sebagai berikut :
 - 1) Peraturan perundangan yang bersifat dinamis sehingga perlu pengembangan;
 - 2) Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan OPD;
 - 3) Adanya kepentingan bersama terhadap ketepatan waktu pengesahan anggaran;
 - 4) Adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- b) Faktor-faktor Penghambat adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif;
 - 2) SIPD belum sepenuhnya mengakomodir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- c) Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut:



- 1) Penyusunan RKPD, dan KUA – PPAS perlu waktu yang lebih awal dibanding tahun ini supaya cukup waktu untuk pembahasan, evaluasi dan penyempurnaan;
- 2) Perlu diberikan kesamaan persepsi mengenai indikator kinerja, output, outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara eksekutif dan legislatif;
- 3) Perlu adanya kebijakan dari Kabuapten Karimun terhadap seluruh OPD agar penyampaian Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Karimun tepat pada waktunya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Penggunaan Sumber daya dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program/Kegiatan terdiri atas dua yaitu, efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan Perbandingan Jika menurut kepada jumlah kucuran dana yang diberikan untuk tiap tahun anggaran, maka akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik belanja Operasional maupun belanja Modal yang diberikan untuk menopang kinerja BPKAD Kabupaten Karimun sebagai mana tabel di bawah ini :

Tabel 1.15
ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL

Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021	%
1.178.703.383.076.87	1.002.995.582.679,00	85,09

Dengan jumlah 45 orang ASN dan 33 orang Pegawai Kontrak yang 80 % latar belakang disiplin ilmunya adalah manajemen dan Ekonomi, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator kinerja utama harus benar-benar diperhitungkan. Namun naik turunnya anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN BPKAD Kabupaten Karimun menurun, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan BPKAD Kabupaten Karimun dalam memenuhi target indikator kinerja utama,



dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja. Ini berarti efisiensi penggunaan sumber daya manusia di BPKAD tidak terpengaruh dengan efisiensi sumber daya anggaran.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan regulasi, untuk Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-16 (Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah) dibebani anggaran sebesar Rp. 4.024.404.090.00 dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 3.293.032.883.00 (81.83%). Program ini didukung oleh 22 kegiatan dimana masing masing bidang pada BPKAD memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari sekretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama BPKAD.

7. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penulisan laporan ini Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



2. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.
4. Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
5. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan Tipe A dan Kelurahan.
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A.
7. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun Kelas D Pratama.



Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) dilingkungan pemerintah Kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik.

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- a. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
 5. Dinas Sosial Tipe B;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A;
 7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 10. Dinas Perhubungan Tipe A;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B;
 13. Dinas Pariwisata Tipe A;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B;
 15. Dinas Perikanan Tipe A;
 16. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;



17. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A;
 18. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.
- e. Lembaga Teknis, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tipe A.
- f. Unit Organisasi bersifat Khusus terdiri dari :
- 1) Rumah Sakit Muhammad Sani;
 - 2) Rumah Sakit Tanjung Batu Kundur.
- g. Kecamatan terdiri dari 12 Kecamatan terdiri dari :
- 1) Kecamatan Karimun;
 - 2) Kecamatan Meral;
 - 3) Kecamatan Tebing
 - 4) Kecamatan Moro
 - 5) Kecamatan Kundur
 - 6) Kecamatan Buru
 - 7) Kecamatan Kundur Barat
 - 8) Kecamatan Kundur Utara
 - 9) Kecamatan Meral Barat
 - 10) Kecamatan Durai
 - 11) Kecamatan Ungar
 - 12) Kecamatan Belat



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Karimun pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakekatnya adalah merupakan "Pertanggungjawaban Publik".

Laporan Kinerja selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak-pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen pemerintahan, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Karimun.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini :

1. Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah
2. Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam pencapaian kehematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, sebagai upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Karimun tahun 2016-2021.
3. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya jangka pendek dan jangka menengah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

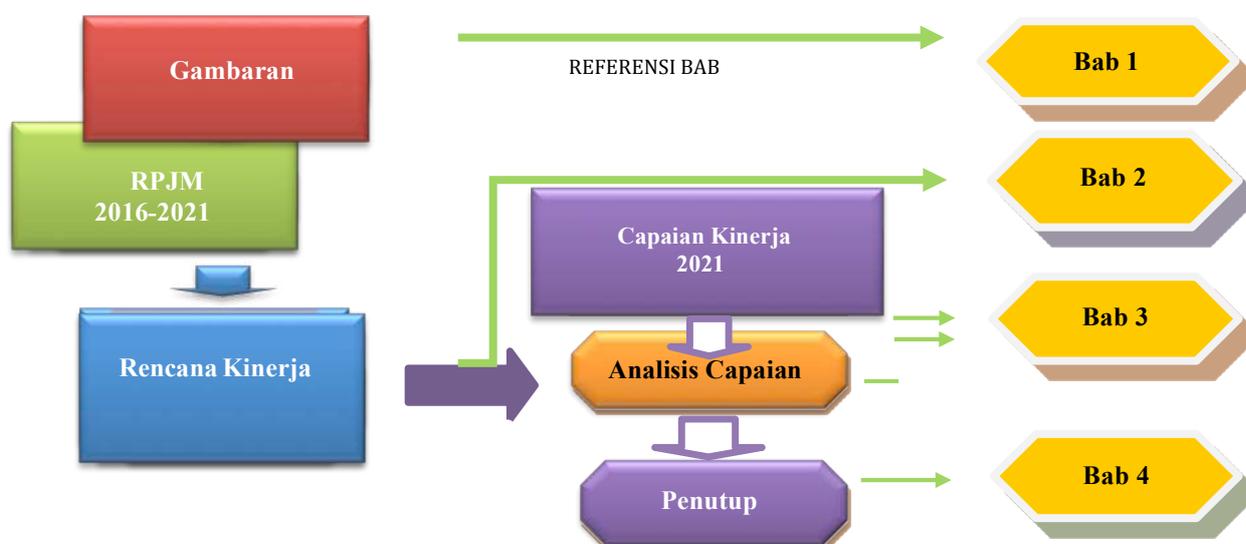
Laporan ini disajikan dalam kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Strategis di sini

dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plans*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gaps*) bagi perbaikan kinerja di masa datang

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021 diilustrasikan pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2.
SISTIMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:



- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Karimun, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, landasan hukum, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Rencana Strategis, menjelaskan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Karimun untuk periode 2016–2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2021, dan menjelaskan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun 2021.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten karimun secara makro berkaitan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian kinerja hasil pembangunan untk Tahun 2021
- BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 dan saran perbaikan yang diperlukan di masa mendatang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2016-2021.

1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Pemerintah Kabupaten Karimun yang merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Karimun yang ingin diwujudkan dalam rangka memantapkan landasan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2016 - 2021, yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Petumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.



2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun, Bupati/Wakil Bupati Karimun menetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA SAING)
2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI);
3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN DALAM INFRASTRUKTUR);
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN);
5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP);
6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (TERDEPAN DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN);
7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM PELAYANAN BIROKRASI).

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan “BERSIH” yaitu; Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.



Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

a. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

b. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

c. Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

d. Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun ditetapkan 8 (delapan) tujuan dan 16 (Enam belas) sasaran, sebagai berikut :



Tabel 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN 2016-2021

	TUJUAN	SASARAN	
PERTAMA	Pertumbuhan ekonomi	1.	Meningkatnya aktivitas ekonomi dipusat pertumbuhan ekonomi baru.
KEDUA	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis maritim dan pertanian	2.	Meningkatnya produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan
KETIGA	Mengembangkan potensi wisata	3.	Terwujudnya Karimun sebagai Daerah Wisata
KEEMPAT	Menghubungkan antar wilayah dengan infrastruktur yang andal dalam mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan	4.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah
		5.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar
KELIMA	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial	6.	Menurunnya penduduk miskin
		7.	Meningkatnya derajat kesehatan
		8.	Meningkatnya kualitas pendidikan
		9.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal
		10.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
		11.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
KEENAM	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	12.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang
		13.	sesuai dengan tata ruang wilayah Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
KETUJUH	Meningkatkan pelestarian budaya lokal dan kehidupan beragama dalam bermasyarakat	14.	Meningkatnya aktivitas – aktivitas keagamaan
KEDELAPAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui pemantapan reformasi birokrasi	15.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah
		16.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan

B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupten Karimun 2021 yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2021.

Tahun 2020 merupakan tahun ke 21 (Dua puluh satu) sejak terbentuknya Pemerintah Kabupaten Karimun dan merupakan tahun ke 3



(tiga) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun periode 2016-2021. Mencermati arah dan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021 maka pada tahun 2021 disusun 5 (Lima) prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari RPJMD, dimana kelima prioritas pembangunan tersebut yang menjadi fokus pada tahun 2021 ini merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan Provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan, maka Kabupaten Karimun menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis Maritim Menuju Karimun yang Tedepan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1 Prioritas Pertama : Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya Infrastruktur Jalan dalam rangka Peningkatan Akses dan Daya Saing Daerah.
- 2 Prioritas Kedua : Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi Guna Mengurangi Titik Banjir.
- 3 Prioritas Ketiga : Peningkatan Aksesibilitas terhadap Layanan Air Bersih bagi Masyarakat.
- 4 Prioritas Keempat : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan bagi Masyarakat.
- 5 Prioritas Kelima : Peningkatan sektor Pariwisata dan pertanian dalam arti luas guna mendukung ekonomi kerakyatan berbasis kemaritiman

Selanjutnya dari kelima prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 maka disusun arah dan sasaran kegiatan pokok pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.



Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.

**PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021**

SASARAN TAHUN 2021	PROGRAM	
Meningkatnya aktivitas ekonomi dipusat pertumbuhan ekonomi baru	1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	3.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	4.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	5.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
Meningkatnya Produktivitas dan Produksi sektor pertanian dan perikanan	1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	2.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	3.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
	5.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	6.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Tercapainya konsumsi energi pangan	1.	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
	2.	Program Pananganan Kerawanan Pangan
	3.	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
	4.	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
	5.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Terwujudnya karimun sebagai Daerah wisata	1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	3.	Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya Sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	3.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Lingkungan dan Permukiman



Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar	1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman
	3.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Menurunnya penduduk miskin	1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya
	2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Derajat Kesehatan	1.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	2.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	3.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	3.	Program Pendidikan Non Formal
	4.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	1.	Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja
	2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Keberdayaan	1.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Perempuan dan Kesenjangan Gender	2.	Menular Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	3.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	4.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	5.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
	6.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
	7.	Program Pengembangan Kota Layak Anak
	Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk	1.
	2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Peran Kapasitas Pembinaan
	3.	Kesejahteraan Keluarga Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan
	4.	Pembangunan Keluarga (KKBPK)
	5.	Program Pengembangan Data/Informasi
	Terwujudnya Pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1.
	2.	Program Pemanfaatan Ruang
	3.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	2.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	4.	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	5.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	6.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	7.	Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan Infrastruktur 4 bidang
Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1	Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	2.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas Pelayanan	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan
	5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan
	6.	Program Pengembangan Data/Informasi
	7.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

C. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk Tahun 2021 pelaporan kinerja telah diperbaiki dengan terbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja sebagai perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mencapai tujuan strategis tersebut telah menerapkan tata laksananya dengan baik



meliputi 16 (enam belas) sasaran strategis. Kemudian sasaran strategis tersebut dimuat dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja yang tertera pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3.

16 (ENAM BELAS) SASARAN DAN 38 (TIGA PULUH DELAPAN) INDIKATOR SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET2020	INSTANSI	
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonom	1.	Nilai ekspor (USD)	1,400,000,000.00	Dinas Perdagangan, Koperasi,UKM dan ESDM
		2.	Nilai investasi (Rp)	22,89 T	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2.	Meningkatkan produktivitas dan Produksi sektor Pertanian dan Perikanan	1.	Jumlah produksi tanaman pangan dan Perkebunan(ton/thn)		Dinas Pangan dan Pertanian
			-Padi	250	
		-Jagung	320		
		-Karet	3800		
2.	Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan(Ton/Ha)	- Padi	2.4	Dinas Pangan danPertanian	
		- Jagung	2.9		
		3.	Jumlah produksiperikanan	56.000 ton	Dinas Perikanan Kabupaten karimun
		4.	Jumlah ekspor usaha perikanan	7.800 ton	Dinas Perikanan Kabupaten karimun
3.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	1.	Jumlah kunjungan wisatawan asing	105.000 orang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2.	Rata-rata lama wisatawan menginap	1,5 hari	as Pariwisata danKebudayaan
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana	1.	Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisibaik	643.98 KM	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang



	penghubung antar wilayah	2.	Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	1.133 Titik	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		3.	Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut reguler	62,90%	Dinas Perhubungan
		4.	Persentase pelabuhan laut yang memadai	85,09%	Dinas Perhubungan
5.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	65,04%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		2.	Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	70,07%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3.	Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	90 %	Bagian Humas Sekretariat Daerah
6.	Menurunnya penduduk miskin	1.	Persentase penduduk miskin	6,50 %	Dinas Sosial
7.	Meningkatnya derajat kesehatan	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	79,85 per 100.000 kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan
		2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	14,30 per 1000 kelahiran hidup (KH)	Dinas Kesehatan
		3.	Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	<0,22 %	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD / MI - SMP / MTs	108,25 % 96,00 %	Dinas Pendidikan
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) - SD / MI - SMP / MTs	98,00 % 76,00 %	Dinas Pendidikan
		3.	Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI - SMP / MTs	25 % 20 %	Dinas Pendidikan
		4.	Angka melek huruf	98,00 %	Dinas Pendidikan
		5.	Angka harapan lama sekolah	12,17 Tahun	Dinas Pendidikan
9.	Meningkatnya pertumbuhan	1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,98 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



	tenaga kerja lokal	2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,8 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
10.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1.	Indeks Pembangunan Gender	92,52 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA
11.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,70 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA
12.	Terwujudnya pola dan strukturuang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tataruang	99,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Terjaga keselestarian lingkungan hidup	1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72 %	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Nilai Adipura	> 75	Dinas Lingkungan Hidup
		3.	Luas ruang terbuka hijau	191.12 Ha	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		4.	Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	58 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1.	Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	550 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
		2.	Jumlah muzaki	1.250 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
15.	Meningkatnya transparansi dan	1.	Indeks akuntabilitas	75	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Baperlitbang 3. Inspektorat
	akuntabilitas pemerintah	2.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1.	Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/D IV(orang)	> 3,5	1.RUSD Muhammad Sani 2.Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran Karimun Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 ada pada Tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.4.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET2020	INSTANSI
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi	1. Nilai ekspor (USD)	1.400.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi,UKM dan ESDM
		2. Nilai investasi (Rp)	22,89 T	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPSTP)
2.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun)		Dinas Pangan dan Pertanian
		- Padi	250	
		- Jagung	320	
		- Karet	3.800	
		- Kelapa	830	



		2.	Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	2.4 2.9 0.38 0.70	Dinas Pangan dan Pertanian
		3.	Jumlah produksi perikanan	56.000 ton	Dinas Perikanan Kabupaten karimun
		4.	Jumlah ekspor usaha perikanan	7.800 ton	Dinas Perikanan Kabupaten karimun
		3.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	1.	Jumlah kunjungan wisatawan asing
		2.	Rata-rata lama wisatawan menginap	1,5 hari	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1.	Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	643.98 KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.	Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	1.133 Titik	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		3.	Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut regular	62,90%	Dinas Perhubungan
		4.	Persentase pelabuhan laut yang memadai	85,09%	Dinas Perhubungan
5.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	65,04%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		2.	Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	70,07%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3.	Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	90 %	Bagian Humas Sekretariat Daerah
6.	Menurunnya penduduk miskin	1.	Persentase penduduk miskin	6,50 %	Dinas Sosial
7.	Meningkatnya derajat kesehatan	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	79,85 per 100.000 kelahiran Hidup (KH)	Dinas Kesehatan



		2.	Angka KematianBayi (AKB)	14,30 per 1000 kelahiran hidup (KH)	Dinas Kesehatan
		3.	Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	<0,22 %	Dinas Kesehatan
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD / MI - SMP / MTs	108,25 % 96,00 %	Dinas Pendidikan
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) - SD / MI - SMP / MTs	98,00 % 76,00 %	Dinas Pendidikan
		3.	Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI - SMP / MTs	25 % 20 %	Dinas Pendidikan
		4.	Angka melek huruf	98,00 %	Dinas Pendidikan
		5.	Angka harapan lama sekolah	12,17 Tahun	Dinas Pendidikan
9.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60.98 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,8 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
10.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	1.	Indeks Pembangunan Gender	92,25 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA
11.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,70 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA
12.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	1.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	99,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Terjaga keselestarian lingkungan hidup	1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72 %	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Nilai Adipura	> 75	Dinas Lingkungan Hidup
		3.	Luas ruang terbuka hijau	191.12 Ha	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan
		4.	Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	58 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



14.	Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1.	Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	550 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
		2.	Jumlah muzaki	1.250 orang	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
15.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1.	Indeks akuntabilitas	75	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Baperlitbang 3. Inspektorat
		2.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1.	Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/D IV (orang)	> 3,5	1. RUSD Muhammad Sani 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB III

AKUNTABILITAS

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi Baru	1. Nilai ekspor (USD)	1.400.000.000	1.876.960.780,98	134,07%
		2. Nilai investasi (Rp)	22,89 T 50,68 T (**)	51,47 T (**)	101,56 %
2.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1. Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun)			
		- Padi	250	27,80	11,12 %
		- Jagung	320	238,96	74,68 %
		- Karet	3.800	5,180	136,31 %
		- Kelapa	830	1,687	203,25 %
2. Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha)					
- Padi	2,4	2,84	118,33 %		
- Jagung	2,9	3,24	111,72 %		
- Karet	0,38	0,80	210,52 %		
- Kelapa	0,70	1,31	187,14 %		
3.		3. Jumlah produksi perikanan	56.000 Ton	34,545,42 Ton	61,69 %
4.		4. Jumlah ekspor usaha perikanan	7.800 Ton	3,858 Ton	48,23 %
3.	Terwujudnya Karimun sebagai	1. Jumlah kunjungan wisatawan asing	105.000 org 15000 org(**)	14451 Orang (**)	96,34%



	daerah wisata	2.	Rata-rata lama wisatawan menginap	1,5 hari	1,04 Hari	69,33%
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1.	Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	643.98 Km	631,61 Km	98,07%
		2.	Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	1.133 titik		
				1.265 Titik(**)	1.215 Titik (**)	
		3.	Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut reguler	62,90%	40 %	63,59 %
		4.	Persentase pelabuhan laut yang memadai	85,09 %	85%	99,89 %
5.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	65,04 %	55,90%	85,94 %
		2.	Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	70,07%		
		3.	Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	95% (**)	93 (**)	97,89
6.	Menurunnya penduduk miskin	1.	Persentase penduduk miskin	6,50 %	6.85 %	94.62 %
7.	Meningkatnya derajat kesehatan	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	135 (**)	144,68 (**)	92,8
		2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	14,30	14,47	98,8
		3.	Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	0,09 (**)	0,07 (**)	122,2
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
			- SD / MI - SMP / MTs	108,25 % 96,00 %	108,85 % 92,76 %	96,63 % 100,50 %
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM)			
- SD / MI - SMP / MTs	98,00 % 76,00 %	98,49 % 73,62 %	96,87 % 71,36 %			
3.	Angka pendidikan yang ditamatkan					



			- SD / MI	25 %	32,16 %	106,55 %
			- SMP / MTs	20 %	18,69 %	100,90 %
		4.	Angka melek huruf	98,00 %	98,78%	100,16 %
		5.	Angka harapan lama sekolah	12,17 Tahun	12,42 Tahun	98.00 %
9.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,22 %	60.86%	99.41%
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja local	50,50% (**)	50,42 % (**)	99,84%
10.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender	92,52	91,25	98,63 %
11.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,11 %	1,04 %	106,31 %
12.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	99,00 %	99,87%	100,88%
13.	Terjaga kelestarian lingkungan hidup	1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	69,31%	96,26 %
		2.	Nilai Adipura	≥ 75	≥71,41	94,20 %
		3.	Luas ruang terbuka hijau	191,12 Ha	213,12 Ha	115,11 %
		4.	Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	43 Ha	43,09 Ha	100,21 %
14.	Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan	1.	Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	550 Orang / 800 (** orang)	794 (**)	99,25%
		2.	Jumlah muzaki	1.250 Orang	782 Orang	63 %
15.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1.	Indeks akuntabilitas	73	72.08	98,74 %
		2.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1.	Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/D IV (orang)	3,5	3,49	0,99%

Catatan:

- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.



B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Pengukuran kinerja .dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini dan juga dijelaskan terkait analisis dari capaian masing-masing indikator 16 sasaran dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.2
PERBANDINGAN DATA CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN	INDIKATOR	Tahun 2020			Tahun 2021			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat pertumbuhan ekonomi Baru	1.	Nilai ekspor (USD)	1.400.000.000,00	1.005.351.931,19	134,07%	1.400.000.000	1.876.960.780,98	134,07%
		2.	Nilai investasi (Rp)	22,89 Triliun	40,68 Triliun	101,56 %	22,89 T		
				50,68 T	51,47 T	101,56 %			
2.	Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan	1.	Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	250	140,50	11,12 %	250	27,80	11,12 %
				320	273,50	74,68 %	320	238,96	74,68 %
				3.800	3743	136,31 %	3.800	5,180	136,31 %
				830	819	203,25 %	830	1,687	203,25 %
		2.	Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha) - Padi - Jagung - Karet - Kelapa	2,4	1,20	118,33 %	2,4	2,84	118,33 %
		2,9	2,69	111,72 %	2,9	3,24	111,72 %		
		0,38	0,36	210,52 %	0,38	0,80	210,52 %		
		0,70	0,63	203,25 %	0,70	1,31	187,14 %		
		3.	Jumlah produksi perikanan	56.000 Ton	52.952,82 Ton	61,69 %	56.000 Ton	34,545,42 Ton	61,69 %
		4.	Jumlah ekspor usaha perikanan	7.800 Ton	4.192,63 Ton	48,23 %	7.800 Ton	3,858 Ton	48,23 %
3.	Terwujudnya Karimun sebagai daerah wisata	1.	Jumlah kunjungan wisatawan asing	105.000 orang	14.451 orang	96,34%	105.000 org 15000 org (**)	14451 Org(**)	96,34%
		2.	Rata-rata lama wisatawan menginap	1,5 hari	1,5 Hari	69,33 %	1,5 hari	1,04 Hari	69,33 %



4.	Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah	1.	Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	643.98 Km	625,59 Km	98,07%	643.98 Km	631,61 Km	98,07%
		2.	Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4	1.133 titik	1.212 Titik	63,59 %	1.133 titik	1.215 Titik	63,59 %
		3.	Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut reguler	62,90%	40 %	98,91 %	62,90%	40 %	98,91 %
		4.	Persentase pelabuhan laut yang memadai	85,09 %	84,17 %	73,66%	85,09 %	40%	73,66%
5.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar	1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	65,04 %	53,60 %	103,4 %	65,04 %	67,28 %	103,4 %
		2.	Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	70,07 %	68,72 %	98,07%	70,07%	68,72	98,07%
		3.	Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	90 %	93 %	101%	95% (**)	93 (**)	97,89
6.	Menurunnya penduduk miskin	1.	Persentase penduduk miskin	6,50 %	6,83 %	103%	6,50 %	6,85 %	94,62 %
7.	Meningkatnya derajat kesehatan	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	79,85 per 100.000 kelahiran Hidup (KH)	134,4	104%	135 (**)	144,68 (**)	92,8
		2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	14,30 per 1.000 kelahiran hidup (KH)	13	101%	14,30	14,47	98,8
		3.	Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	<0,22 %	0,22%	100%	0,09 (**)	0,07 (**)	122,2
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD / MI - SMP / MTs	108,25 % 96,00 %	108,85 % 92,76 %	96,63 % 100,50 %	108,25 % 96,00 %	108,85 % 92,76 %	96,63 % 100,50 %
		2.	Angka Partisipasi						



			Murni (APM) - SD / MI - SMP / MTs	98,00 % 76,00 %	98,49 % 73,62 %	107% 98,34%	98,00 % 76,00 %	98,49 % 73,62 %	96,87 % 71,36 %
		3.	Angka pendidikan yang ditamatkan - SD / MI - SMP / MTs	25 % 20 %	32,16 % 18,69 %	107% 98,34%	25 % 20 %	32,16 % 18,69 %	106,55 % 100,90 %
		4.	Angka melek huruf	98,00 %	98,78%	101%	98,00 %	98,78%	100,16 %
		5.	Angka harapan lama sekolah	12,17 Tahun	12,42 Tahun	98%	12,17 Tahun	12,42 Tahun	98,00 %
9.	Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal	1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	60,98 %	59,76 %	89%	61,22 %	60,86%	99,41%
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,8 %	3,77 %	99,64%	50,50% (**	50,42 % (**	99,84%
10.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender	92,52 %	90,91 %	96,64%	92,52	91,25	98,63 %
11.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,70 %	1,11 %	105%	1,11 %	1,04 %	106,31 %
12.	Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	99,00 %	99,87 %	100%	99,00 %	99,87%	100,88%
13.	Terjaga kelestarian lingkungan hidup	1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72	71,92	98%	72	69,31%	96,26 %
		2.	Nilai Adipura	≥ 75	≥ 71	94%	≥ 75	≥71,41	94,20 %
		3.	Luas ruang terbuka hijau	191,12 Ha	159 Ha	80%	191,12 Ha	213,12 Ha	115,11%
		4.	Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	58 Ha	69,19 Ha	102%	43 Ha	43,09 Ha	100,21%
14.	Meningkatnya aktivitas keagamaan	1.	Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	550 Orang	219 Orang	76%	550 Orang / 800 (** orang	794 (**	99,25%
		2.	Jumlah muzaki	1.250 Orang	871 Orang	80%	1.250 Orang	782 Orang	63 %



15.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1.	Indeks akuntabilitas	75	73.22	98,74%	73	72.08	98,74 %
		2.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan	1.	Kualifikasi tenaga pendidik sekurang-kurangnya S1/D IV (orang)	> 3,5	3,35	100 %	3,5	3,49	0,99%

Berikut akan dijelaskan analisis capaian masing-masing indikator dari 16 sasaran sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA AKTIVITAS EKONOMI DI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU

Wilayah Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura menjadikan Kabupaten Karimun memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini tentu menjadi potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Salah satu potensi ekonomi dimaksud adalah dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik guna menangkap limpahan (*spill over*) positif dari negara-negara tetangga. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan sasaran Meningkatkan Aktivitas Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru sebagai sasaran ke-1 yang ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021.

Adapun indikator pendukung sebagai ukuran keberhasilan dari capaian sasaran ini adalah indikator nilai ekspor, nilai investasi dan jumlah kawasan strategis. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.3
CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR SASARAN 1

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Ekspor (US \$)	1.400.000.000	1.876.960.780,98	134,07%
2	Nilai Investasi (Rp)	22,89 T		
		50,68 (**)	51,47 T (**)	101,56 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				117,81 %

Catatan:

- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.

Dari tabel capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi dari target sasaran pertama, diperoleh rata-rata capaian sebesar 117.81 % dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian yang diperoleh adalah sangat baik. Sasaran ini pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan dijelaskan pada masing – masing indikator yang mendukung sasaran ini.

Indikator pendukung sasaran ini adalah **Nilai Ekspor**. Nilai Ekspor Kabupaten Karimun Januari s/d Desember 2021 mencapai US\$ 1.876.960.780,98 atau naik sebesar US\$ 676.960.780,00. Kenaikan tersebut terjadi hampir diseluruh komoditas maupun negara tujuan. Kenaikan tersebut juga berpengaruh terhadap realisasi capaian 2021 yang menargetkan US\$ 1.400.000.000, dimana persentase capaian meningkat menjadi sebesar 134,068 % persen. Ekspor migas (bahan bakar mineral) 2021 mengalami kenaikan yang signifikan mencapai US\$ 1.621.191.970 atau 191,1 persen dibandingkan pada tahun 2020 sebesar US\$ 848.012.986,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor Kabupaten Karimun bukan sebagai daerah penghasil migas dan PT. Oiltanking Karimun sebagai satu-satunya perusahaan pengeksport olahan migas mengalami kenaikan penurunan produksi untuk pangsa ekspor walaupun Kabupaten Karimun bukan sebagai daerah penghasil migas.



Ekspor nonmigas terbesar 2021 berasal dari sektor pertambangan yakni timah batangan sebesar US\$ 80.334.350,00 yang mengalami penurunan sebesar US\$ 5.851.725,00 atau 6,92 persen dari tahun 2020 sebesar US\$ 86.186.075,00. Hal ini dikarenakan penambangan bijih timah di Kabupaten Karimun hanya digerakkan oleh PT. Timah Kundur. Sedangkan dua perusahaan penambangan timah lainnya, yakni PT. Unindo Usaha Mandiri dan PT. Karimun Mining berhenti berproduksi yang ditandai dengan berhentinya operasional peleburan (smelter) bijih timah menjadi timah batangan di Desa Pangke sejak tiga tahun terakhir.

Sektor pertambangan lainnya yang memasuki pasar ekspor adalah produksi batu granit dan olahannya. BPS tidak secara spesifik mencatat tentang realisasi ekspor granit tahun 2021. Namun dari hasil pantauan lapangan, juga terjadi penurunan produksi. Tercatat, sebanyak 7 perusahaan granit yang beroperasi di Pulau Karimun, hanya beberapa perusahaan saja yang mengekspor produknya diantaranya PT. Karimun Granite, PT. Pasific Ganitama, PT. Wira Penta Kencana dan PT. Bukit Granite Minning Mandiri. Sedangkan perusahaan tambang granit lainnya lebih cenderung berproduksi untuk memenuhi pasar lokal.

Kelesuan produktivitas juga dialami perusahaan eksportir sektor kemaritiman seperti PT. Saipem Indonesia, PT. Karimun Sembawang Shipyard dan PT. Karimun Marine Shipyard, PT. Multi Ocean Shipyard yang diharapkan berkontribusi besar memacu pertumbuhan ekspor sektor maritim. Sepinya order menjadi penyebab ekspor komoditas utama kemaritiman menurun. Walaupun selama tahun 2021 terjadi pandemic covid 19 tetapi tidak menyebabkan nilai ekspor menurun dari tahun 2020, tercatat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yakni pada komoditas besi dan baja yang berada pada urutan komoditas ekspor terbesar ke empat sebesar US\$ 47.808.249,00 naik sebesar US\$ 47.575.679,00 dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar US\$ 232.570,79. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 tidak mencatat secara spesifik asal/sumber produsen komoditas tersebut, namun dari



hasil analisis data tahun 2020, hanya perusahaan maritim yang mengekspor produk tersebut yakni PT. Saipem Indonesia dan PT Karimun Sembawang Shipyard. Adapun data ekspor berdasarkan komoditas berdasarkan urutan nilai tertinggi tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
DATA EKSPOR BERDASARKAN KOMODITAS DARI URUTAN NILAI
TERTINGGI S/D TERENDAH TAHUN 2020 – 2021

NO	TAHUN 2020		NO	TAHUN 2021	
	KOMODITI	NILAI EKSPOR (US\$)		KOMODITI	NILAI EKSPOR (US\$)
1	2	3	4	5	6
1	Bahan bakar mineral	848,012,986	1	Bahan bakar mineral	1.621.191.970
2	Timah	86,186,075	2	Timah	80.334.350
3	Garam, belerang, kapur	36,264,375	3	Garam, Belerang, Kapur	56.068.772
4	Bahan kimia organic	10,270,909	4	Benda-benda dari Besi dan Baja	47.808.249
5	Perabot, penerangan rumah	6,853,708	5	Kapal Laut	31.477.630
6	Ikan dan udang	6,409,116	6	Bahan Kimia Organik	22.290.401
7	Buah-buahan	5,323,488	7	Buah-Buahan	7.098.194
8	Benda-benda dari besi dan baja	3,402,720	8	Ikan dan Udang	5.004.448
9	Kendaraan dan bagiannya	1,159,088	9	Perabot, Penerangan Rumah	1.923.438
10	Mesin-mesin/pesawat mekanik	984,098	10	Besi dan Baja	1.336.898
11	Karet dan barang dari karet	354,041	11	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	734.904
12	Besi dan baja	232,570	12	Kendaraabn dan Bagian Lainnya	477.973
13	Mesin/Peralatan listrik	213,945	13	Mesin/Peralatan Listrik	442.062
14	Susu, mentega telur	127,491	14	Susu, mentega telur	273.120
15	Perangkat optic	133,151	15	Minuman	155.410
16	Alumunium	101,007	16	Kapas, Gumpalan, Tali	49.867
17	Minuman	81,876	17	Olahan dari Tepung	47.434
18	Sari bahan samak & celup	60,603	18	Sari Bahan Samak dan Celup	41.558
19	Kayu dan barang dari kayu	52,728	19	Perangkat Optik	32.927
20	Berbagai barang logam dasar	50,410	20	Kayu dan Barang dari Kayu	22.902
21	Seng	19,152	21	Alumunium	21.610
22	Kapal laut	17,826	22	Seng	20.911
23	Kertas dan karton	10,066	23	Perkakas, Perangkat Potong	19.395
24	Lak, getah, dan damar	8,474	24	Karet dan Barang Karet	14.577
25	Plastik dan barang dari plastic	7,648	25	Kertas/Karton	12.110



26	Bahan kimia anorganik	5,616	26	Lak, Getah dan Damar	10.539
27	Berbagai produk kimia	3,416	27	Berbagai Makanan Olahan	8.586
28	Sayuran	2,330	28	Plastik dan Barang Plastik	3.284
29	Lokomotif dan peralatan K. Api	1,810	29	Berbagai Produk Kimia	1.844
30	Tembaga	586	30	Berbagai Barang Logam dasar	1.534
31	Kaca dan barang dari kaca	261	31	Lokomotif dan Peralatan Kereta Api	1.497
			32	Kaca dan Barang dari Kaca	1.050
			33	Olahan dari Buah-buahan/Sayuran	966
			34	Perekat, Enzim	160
			35	Tembaga	120
			36	Produk Keramik	91
TOTAL		1,005,351,931	TOTAL		1.876.960.781

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan ekspor menurut negara tujuan utama, tahun 2021, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor tertinggi dengan nilai mencapai US\$ 1.106.513.643 diikuti Malaysia sebesar US\$ 220.330.161 dan Singapura sebesar US\$ 209.683.441. Adapun data nilai ekspor menurut negara tujuan utama tahun 2020-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
DATA EKSPOR BERDASARKAN NEGARA TUJUAN UTAMA DARI
NILAI TERTINGGI S.D. TERENDAH TAHUN 2020- 2021.

TAHUN 2020			TAHUN 2021		
NO	NEGARA TUJUAN EKSPOR	NILAI EKSPOR (USD)	NO	NEGARA TUJUAN EKSPOR	NILAI EKSPOR (USD)
1	2	3	4	5	6
1	Tiongkok	217.948.536	1	Tiongkok	1.106.513.643
2	Singapura	128.118.411	2	Malaysia	220.330.161
3	Malaysia	97.424.763	3	Singapura	209.683.441
4	Philipina	79.172.710	4	Taiwan	71.307.562
5	Belanda	65.444.002	5	Belanda	59.510.805
6	Jepang	44.330.513	6	Hongkong	54.739.327
7	Korea Selatan	43.998.250	7	Inggris	33.192.874
8	Taiwan	42.180.683	8	Uni Emirat Arab	25.763.074
9	Brunei Darusalam	39.078.266	9	Vietnam	24.327.050



10	Amerika Serikat	23.898.104	10	Srilanka	23.422.772
11	Spanyol	20.885.371	11	Jepang	16.525.575
12	Uni Emirat Arab	11.633.952	12	Amerika Serikat	14.260.250
			13	Bangladesh	10.125.653
			14	India	3.225.699
			15	Australia	2.247.270
			16	Italia	1.785.625
TOTAL		1.005.351.931	TOTAL		1.876.960.781

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Untuk tahun 2021 nilai ekspor tertinggi menurut pelabuhan utama adalah melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun dengan nilai ekspor mencapai US\$ 1.864.433.000 diikuti Pelabuhan Tanjung Batu dengan nilai ekspor mencapai US\$ 6.881.617 dan kemudian diikuti Pelabuhan Pasir panjang dengan nilai ekspor mencapai US\$ 5.646.162 . Adapun nilai ekspor menurut pelabuhan utama tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
REALISASI EKSPOR KABUPATEN KARIMUN MENURUT PELABUHAN UTAMA
TAHUN 2020-2021 DALAM US\$

TAHUN 2020			TOTAL	TAHUN 2021			TOTAL
PELABUHAN ASAL				PELABUHAN ASAL			
TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BATU	PASIR PANJANG		TANJUNG BALAI KARIMUN	TANJUNG BATU	PASIR PANJANG	
91,981,908.74	256,157.00	409,219.43	92,647,285.17	158,932,600.06	427,122.74	435,099.50	159,794,822.30
128,026,614.09	321,200.00	321,138.82	128,668,952.91	223,307,818.11	616,644.74	408,298.97	224,332,761.82
43,698,732.87	329,208.00	254,440.40	44,282,381.27	288,941,894.64	642,765.21	534,881.42	290,119,541.27
82,644,819.26	475,448.40	230,482.40	83,350,750.06	270,503,376.72	625,901.76	390,087.04	271,519,365.52
78,107,324.51	346,008.10	52,769.04	78,506,101.55	153,859,727.25	500,049.90	434,321.76	154,794,098.91
59,025,301.52	397,425.00	211,111.35	59,633,837.87	197,053,971.63	719,687.50	587,414.35	198,361,073.48
91,583,650.03	537,489.30	102,427.31	92,223,566.64	61,279,374.84	524,344.80	426,531.13	62,230,250.77
48,109,042.87	435,526.90	44,424.58	48,588,994.35	102,329,814.61	427,720.66	400,333.50	103,157,868.77
60,336,688.46	439,315.32	52,040.94	60,828,044.72	146,304,188.84	270,501.28	572,864.84	147,147,554.96
72,208,570.50	523,818.40	467,383.14	73,199,772.04	34,282,526.26	692,274.37	621,549.09	35,596,349.72
90,935,590.43	583,186.28	420,588.99	91,939,365.70	133,683,960.64	573,240.07	393,531.28	134,650,731.99
150,150,342.67	746,239.69	586,296.45	151,482,878.81	93,953,747.03	861,364.55	441,249.89	95,256,361.47
996,808,585.95	5,391,022.39	3,152,322.85	1,005,351,931.19	1,864,433,000.63	6,881,617.58	5,646,162.77	159,794,822.30

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2021



Tabel 3.7
DATA PERBANDINGAN NILAI EKSPOR MENURUT PELABUHAN DI
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

NO	PELABUHAN	NILAI EKSPOR (US\$)	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Moro Sulit	-	-
2	Pasir Panjang	3.152.322	5.646.162
3	Tanjung Batu	5.391.022	6.881.617
4	Tanjung Balai Karimun	996.808.585	1,864.433.000
JUMLAH		1,005.351.931	1. 876. 960. 780

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi fluktuasi nilai ekspor pada pelabuhan yang berbeda tahun 2020-2021 dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Moro Sulit pada tahun 2020 tidak terdapat aktivitas ekspor sama sekali begitu juga pada tahun 2021.
- b. Pelabuhan Pasir Panjang pada tahun 2020 terdapat aktivitas ekspor dengan nilai sebesar US\$ 3.152.322.85 dan tahun 2021 aktifitas ekspor naik dengan nilai sebesar US\$ 6.881.618.70 sehingga terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar US\$ 2.493.841.70 atau 94.01 persen.
- c. Pelabuhan Tanjung Batu pada tahun 2020 terdapat aktivitas ekspor dengan nilai sebesar US\$ 5.391.022.39 dan tahun 2021 aktifitas ekspor dengan nilai sebesar US\$ 6.881.618.70 sehingga terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar US\$ 1.490.596,70 atau 78.33 persen.
- d. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun pada tahun 2020 terdapat aktivitas ekspor dengan nilai sebesar US\$ 996.808.585.95 dan tahun 2021 terdapat aktifitas ekspor dengan nilai sebesar US\$ 1,864.433.001.24, sehingga terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar US\$ 867.624.416,39 atau 53.46 persen.

Kegiatan perdagangan luar negeri merupakan salah satu sektor yang memiliki fungsi dan peran strategis sebagai salah satu tulang punggung perekonomian suatu wilayah atau negara. Kegiatan perdagangan tidak saja memberi peran penting dalam pertumbuhan lapangan kerja bagi



masyarakat tetapi juga dapat menjadi penyebab timbulnya efek ganda (multiplier effect) yang akan mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, pertambangan ataupun industri yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan devisa negara yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi bangsa.

Ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan luar negeri yang memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau suatu negara. Kecenderungan terhadap membaiknya perekonomian dunia akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah terutama aktivitas perdagangan luar negeri atau ekspor impor, artinya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor impor adalah kondisi perekonomian dunia. Jika kondisi perekonomian dunia membaik maka akan berdampak positif terhadap aktivitas atau kegiatan ekspor impor di daerah.

Rencana aksi lanjutan akan terus dijalankan dalam meningkatkan realisasi ekspor. Hal terpenting adalah meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha ekspor-impor untuk meningkatkan pengetahuan dan produktivitas.

Adapun rencana aksi yang akan dijalankan adalah :

1. Menjalankan kegiatan pendukung yang dapat memacu peningkatan ekspor seperti pembinaan terhadap para pelaku usaha ekspor-impor, sosialisasi perundangan ekspor impor dan misi dagang;
2. Mengoptimalkan promosi produk unggulan daerah dengan memanfaatkan sarana promosi yang tersedia (fisik) maupun sarana promosi website (elektronik);
3. Memproyeksikan target realisasi ekspor dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan kemungkinan capaian pada kondisi terkini (target tidak terlalu tinggi) sehingga realisasi capaian target dapat lebih realistis dan mudah di ukur.



Indikator kedua yang mendukung sasaran ini adalah **Nilai Investasi**. Investasi merupakan faktor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah, tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pula dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai.

Jika di tinjau dari target OPD yaitu sebesar Rp. 50.68 triliun, realisasi tercapai sebesar Rp 51,47 triliun, maka persentase capaian sebesar 101,56%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang sudah melebihi target menjadi dasar mengapa penghitungan target tidak berdasarkan target jangka menengah.

Dasar penghitungan target OPD di tinjau dari realisasi tahun 2020 sebesar 40.68 triliun (realisasi dari tahun 2014 sd tahun 2020) maka untuk target tahun selanjutnya 2021 ditargetkan sebesar Rp 10 triliun, Adapun target nilai investasi yang diajukan oleh Provinsi untuk Kabupaten Karimun sebesar Rp. 18 triliun, namun Kabupaten Karimun sanggup menargetkan sebesar Rp. 10 triliun. (masih dalam kondisi covid)

Berdasarkan data realisasi investasi PMA Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) total investasi di Kepri baik dari PMDN maupun PMA mencapai Rp 24,7 triliun. Provinsi Kepri pada tahun 2021 menduduki peringkat ke-12 dalam daftar provinsi dengan jumlah investasi asing atau PMA terbesar Rp 15 triliun dan menduduki peringkat ke-14 dengan investasi PMDN terbesar Rp 9,7 triliun . Peringkat investasi Kepri ini turun pada tahun 2020, Kepri menduduki peringkat ke-6 dengan realisasi investasi asing sebesar 22 triliun. Berikut terkait data 10 (sepuluh) Provinsi yang menjadi tempat favorit investor asing (PMA) tahun 2021 yaitu :



Tabel 3.8
PROVINSI YANG MENJADI TEMPAT FAVORIT INVESTOR ASING (PMA)
TAHUN 2021

No	Provinsi	Total Investasi (Rp)
1.	Jawa Barat	5.2 Miliar
2.	Jakarta	3.3 Miliar
3.	Maluku Utara	2.82 Miliar
4.	Sulawesi Tengah	2.71 Miliar
5.	Banten	2.19 Miliar
6.	Riau	1.91 Miliar
7.	Jawa Timur	1.85 Miliar
8.	Sulawesi Tenggara	1.62 Miliar
9.	Papua	1.50 Miliar
10.	Jawa Tengah	1.48 Miliar

Sumber : DPMPTSP Kab. Karimun, Tahun 2021

Capaian sasaran meningkatnya Minat Investasi pada indikator nilai realisasi investasi bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Selengkapnya nilai realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Karimun dapat di lihat pada tabel jumlah nilai investasi berikut :

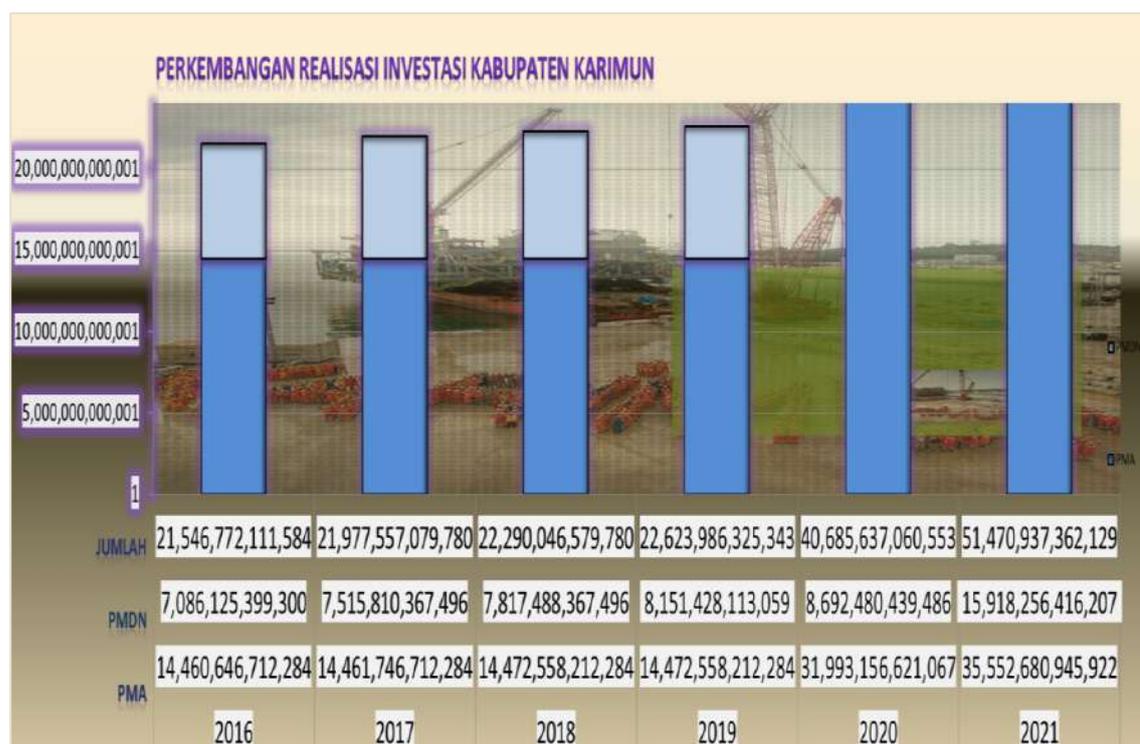
Tabel 3.9
PERKEMBANGAN INVESTASI BERDASARKAN JENIS INVESTASI PMA,PMDN
KABUPATEN KARIMUN S.D TAHUN 2021

TAHUN	NILAI INVESTASI (Rp)		
	PMA	PMDN	JUMLAH
2014	10,794,134,319,576	2,315,818,549,300	13,109,952,868,876
2015	14,085,403,827,824	6,853,500,399,300	20,938,904,227,124
2016	14,460,646,712,284	7,086,125,399,300	21,546,772,111,584
2017	14,461,746,712,284	7,515,810,367,496	21,986,557,079,780
2018	14,472,558,212,284	7,817,488,367,496	22,290,046,579,780
2019	14,472,558,212,284	8,151,428,113,059	22,623,986,325,343
2020	31,993,156,621,067	8,692,480,439,486	40,685,637,060,553
2021	35,552,680,945,922	15,918,256,416,207	51,470,937,362,129

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021



Grafik 3.1
PERKEMBANGAN INVESTASI BERDASARKAN JENIS INVESTASI PMA, PMDN
s.d TAHUN 2021



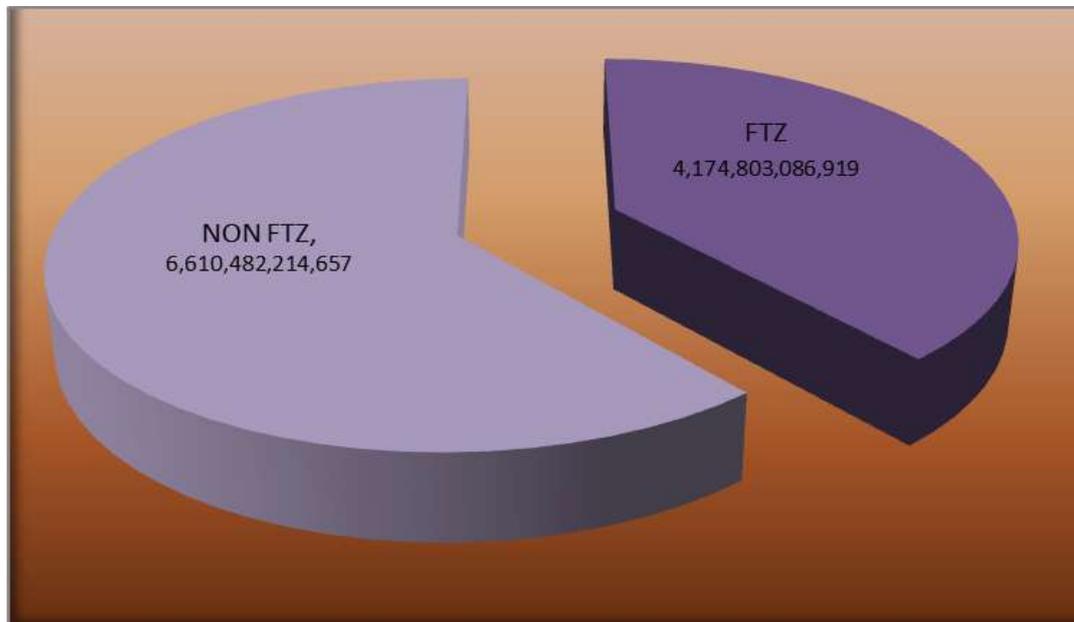
Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021

Tabel 3.10
NILAI INVESTASI DALAM KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS MAUPUN LUAR KAWASAN TAHUN 2021

Uraian	Jumlah Perusahaan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Nilai Tambahan Realisasi Modal Tetap Tahun 2021
		Nilai Tambahan Realisasi Modal Tetap				
PMA	14	829,052,142,068	1,740,916,170,182	1,118,636,856,552	439,031,697,617	4,127,636,866,419
FTZ	11	827,746,644,561	1,740,738,199,516	1,118,636,856,552	439,031,697,617	4,126,153,398,246
NON FTZ	3	1,305,497,507	177,970,666	-	-	1,483,468,173
PMDN	91	6,404,821,488,556	39,291,385,773	9,154,460,241	204,381,100,587	6,657,648,435,157
FTZ	16	31,764,153,403	6,123,953,536	4,974,215,634	5,787,366,100	48,649,688,673
NON FTZ	75	6,373,057,335,153	33,167,432,237	4,180,244,607	198,593,734,487	6,608,998,746,484
Jumlah	105	7,233,873,630,624	1,780,207,555,955	1,127,791,316,793	643,412,798,204	10,785,285,301,576

Sumber : Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Karimu

Grafik 3.2
NILAI INVESTASI DALAM KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS (FTZ) MAUPUN LUAR KAWASAN (NON FTZ) TAHUN 2021



Sumber : *Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021*

Grafik 3.3
REALISASI INVESTASI DALAM KBPB DAN DI LUAR KBPB
PER TRIWULAN TAHUN 2021



Sumber : *Badan Pengusahaan Kawasan & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021*



Dari seluruh uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi investasi penanaman modal baik dari investor domestik maupun investor asing di Kabupaten Karimun tahun 2021 berjumlah **Rp 10.785.285.301.576.-** dan pada tahun 2020 berjumlah **Rp 18.061.650.735.210.-**, ini berarti pada tahun 2021 terjadi penurunan hal ini di sebabkan adanya Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian di tengah merebaknya virus Corona adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi. Adanya pembatasan atau *lockdown* membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan RRT, baik ekspor maupun impor.

Adanya pembatasan atau *lockdown* membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan RRT, baik ekspor maupun impor. Adanya pembatasan atau *lockdown* membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material, baik ekspor maupun impor.

Ditengah-tengah upaya Pemerintah yang dilakukan dalam menekan angka penyebaran Covid-19, namun di pertengahan tahun 2021 kasus Covid-19 tersebut mengalami lonjakan drastis, bahkan mencapai puncaknya tercatat ada 55 ribu kasus konfirmasi positif Covid-19, untuk menekan penularan yang massif, pemerintah langsung memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hal ini tentu saja harus di ikuti oleh seluruh wilayah terutama di Provinsi



Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia.

Banyak perusahaan yang sudah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di tahun 2021 namun dikarenakan perusahaan tersebut baru merasakan dampak dari Covid-19 maka realisasi investasi yang mereka sampaikan nihil. Dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami penurunan terhadap permintaan barang yang mereka produksi. Apalagi Kabupaten Karimun berada di daerah perbatasan Singapura dan Malaysia sehingga kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia maupun luar mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ini terjadi pada Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA). Dan pelaku usaha tersebut juga mengalami kendala dalam pembelian material yang mereka butuhkan di karenakan penutupan Singapura dan Malaysia tersebut, ongkos produksi jadi jauh lebih tinggi sehingga mereka kesulitan dalam menetapkan harga dari barang yang mereka produksi.

Untuk perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami penurunan ini juga di karenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sehingga banyak perusahaan-perusahaan menengah kebawah terpaksa di tutup di karenakan sepi nya pelanggan. Pada tahun 2021 Petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melakukan pengawasan dengan turun langsung ke beberapa perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Karimun dalam hal ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut, selain dari permasalahan Covid-19 yaitu :

1. Kurangnya informasi mengenai tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),
2. Kurangnya Informasi mengenai *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)*,



3. Banyaknya perusahaan yang berada di pulau-pulau, sehingga jaringan internet merupakan kendala bagi para pelaku usaha tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas petugas DPMPTSP juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi terkait tata cara pengisian LKPM dan OSS RBA.

Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran meningkatnya minat investasi dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tiga kegiatan yakni Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, pada anggaran ketiga kegiatan tersebut bersumber dari dana DAK yang dialokasikan untuk Daerah dengan tujuan peningkatan nilai investasi, adapun besaran dana yang diterima sebesar Rp. 370.981.660,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 312.205.600, (**84,16%**).

Tabel 3.11
ANALISIS EFISIENSI BIAYA MENINGKATNYA MINAT INVESTASI
TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Ket.
Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	101,56	370.981.660,-	312.205.600,-	84.16	Cukup efisien

Sumber : DPMPTSP Kab. Karimun, Tahun 2021



Tabel 3.12
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Ket.
1	2	3	4=2-3	5
Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	101,56	84.16	17,4	efisien

Sumber : DPMPTSP Kab. Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas terjadi efisiensi. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pembinaan pelaksanaan dengan melakukan kegiatan sosialisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik fasilitasi Penanaman Modal, dimana kegiatan ini untuk menunjang nilai investasi. Pemberian informasi juga dilakukan kepada pelaku usaha yang langsung datang ke loket informasi agar mengurus perizinan sesuai dengan usahanya dan mengisi laporan kegiatan penanaman modalnya per triwulan agar izin usahanya tetap berlanjut. Pengawasan juga dilakukan dengan langsung turun ke pelaku usaha jika ada kendala, hambatan dalam pengurusan perizinan.

2. SASARAN MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

Upaya optimalisasi pemanfaatan lahan produktif dilakukan melalui pelibatan partisipasi dan kerjasama pengelolaan masyarakat disamping penegakan aturan agraria, sarana produksi pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah optimisasi produksi padi, jagung, karet, dan kelapa, pupuk bersubsidi, pengembangan sektor peternakan dilaksanakan melalui peningkatan populasi dua ternak utama yaitu sapi dan kambing.

Peningkatan produksi dan ekspor produk perikanan dilakukan melalui upaya yang terpadu dari hulu hingga hilir dan lintas sektor serta



pelaku (nelayan, pembudidaya, dan pelaku industri pengolahan) merupakan strategi sasaran ketiga yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021.

Adapun capaian dari indikator 1 dan 2 pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13
CAPAIAN DARI MASING-MASING INDIKATOR 1 DAN 2 PADA SASARAN 2

Indikator		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (ton/tahun)			106,34
	- Padi	250	27,80	11,12
	- Jagung	320	238,96	74,68
	- Karet	3.800	5.180	136,31
	- Kelapa	830	1.687	203,25
2.	Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (ton/ha)			156,92
	- Padi	2,4	2,84	118,33
	- Jagung	2,9	3,24	111,72
	- Karet	0,38	0,80	210,52
	- Kelapa	0.70	1.31	187,14
3	Jumlah produksi produk perikanan (ton)	56.000 Ton	34.545,42 Ton	61,69
4	Jumlah ekspor produk perikanan (ton)	7800 Ton	3.858 ton	48,23
Rata-Rata Tingkat Capaian				93,29

Berdasarkan dari tabel di atas rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 93,29 % atau bermakna sangat baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian sasaran ini belum mencapai 100%, walaupun pada dasarnya sudah memuaskan, evaluasi dan analisis dapat dilihat pada uraian dari masing-masing indikator.

Indikator pertama yang mendukung sasaran ini adalah jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (ton/tahun) dan indikator keduanya relevan mendukung sasaran ini adalah produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (ton/ha). Capaian sasaran dari masing-masing indikator ini juga memberikan nilai baik sekali dimana untuk indikator pertama tingkat capaian sebesar 106,34 % dan



indikator kedua sebesar 156,92 %. Adapun uraian dari indikator dapat dijelaskan sesuai dengan komoditas dari masing-masing indikator itu sendiri.

Realisasi pencapaian jumlah produksi baik tanaman pangan dan perkebunan untuk semua komoditas tanaman utama bervariasi dari target yang ditetapkan. Produksi merupakan total hasil panen yang diperoleh dari kegiatan budidaya pertanian dalam rentang waktu satu tahun. Adapun hasil rekapitulasi evaluasi capaian realisasi jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PADI DAN JAGUNG TAHUN 2019 S.D 2021
KECAMATAN

No	Kecamatan	Komoditas					
		Padi			Jagung		
		Produksi (Ton/Tahun)			Produksi (Ton/Tahun)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Moro	-	-	-	17	3,55	1,76
2	Durai	-	-	-	1	-	-
3	Kundur	-	-	-	31	-	30,00
4	Kundur Utara	83	31,73	11,20	39	-	4,00
5	Kundur Barat	65	9,21	16,10	43	-	49,20
6	Karimun	-	-	-	9	-	10,80
7	Tebing	-	-	0,50	32	-	34,60
8	Meral	-	-	-	11,6	-	7,20
9	Meral Barat	-	-	-	53	-	99,00
10	Buru	-	-	-	12,6	8,92	2,40
11	Belat	-	-	-	7	-	-
12	Ungar	-	-	-	2	-	-
	Jumlah	148	40,94	27,80	258,2	12,47	238,96

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021



Tabel 3.15
JUMLAH PRODUKTIVITAS TANAMAN PADI DAN JAGUNG
TAHUN 2019 s.d 2021 PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Komoditas					
		Padi			Jagung		
		Produktivitas (Ton/Ha)			Produktivitas (Ton/Ha)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Moro	-		-	3	2	1,35
2	Durai	-		-	0.1	0.1	-
3	Kundur	-		-	2.3	2.4	1,67
4	Kundur Utara	2,1	1,82	2,80	2.1	3.6	8,00
5	Kundur Barat	1,7	2,36	2,93	3.1	3.9	3,78
6	Karimun	-		-	2.1	1.6	3,48
7	Tebing	-		1,6	1.8	2	5,41
8	Meral	-		-	1.7	2	4,50
9	Meral Barat	-		-	3.1	4.6	3,38
10	Buru	-		-	2.2	2.2	4,00
11	Belat	-		-	2.3	2	-
12	Ungar	-		-	1.1	1	-
	Jumlah	1,90	1,92	2,84	2.08	2.49	3,24

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel 3.15 diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi produksi tanaman Padi adalah sebesar 27,80 ton dari target yang direncanakan sebesar 250 ton atau capaian 11,12%, dan realisasi tanaman Jagung adalah sebesar 238,96 ton dari target yang direncanakan sebesar 320 ton atau dengan tingkat capaian 74,68%.

Pada Tahun 2021 tercatat ada tiga Kecamatan yang memberikan kontribusi produksi terhadap komoditas tanaman padi, yaitu Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat dan Tebing . Pencapaian realisasi produksi tanaman padi adalah 27,80 ton mencapai 11,12% dari target 250 ton. Produksi di Kecamatan Kundur Utara 11,20



Ton dengan tingkat produktivitas 2,80 Ton, Kecamatan Kundur Barat produksi 16,10 Ton dengan produktivitas 2,93 ton serta produksi Kecamatan Tebing 0,50 Ton dengan produktivitas 1,67 Ton.

Sebaliknya untuk tanaman jagung realisasi produksi 238,96 ton mencapai 74,68% dari target 320 ton dengan tingkat produktivitas 3,24 % . komoditas Jagung yang ditanam petani terbagi menjadi jagung manis (panen muda) dan jagung pipilan, angka produksi diatas adalah jagung manis karena harga jagung manis lebih menjanjikan dari pada harga jagung pipilan.

Produktivitas untuk tanaman pangan utama padi dan jagung seperti pada tabel 3.27 diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas untuk tanaman padi realisasi adalah 2,84 ton/ha dari target yang direncanakan 2,4 ton/ha atau dengan capaian 118,33 % dan untuk tanaman jagung realisasi adalah 3,24 ton/ha dari target yang direncanakan 2,9 ton/ha atau dengan capaian 111,72%.

Adapun penyebab utama belum tercapainya target pada tanaman padi tahun 2021 adalah tidak terakomodirnya kegiatan optimalisasi tanaman padi pada tahun 2021, sedangkan jumlah petani yang menanam padi juga berkurang secara signifikan (hanya 3 kelompok tani yang masih melakukan penanaman padi dari total jumlah 5 kelompok tani), sedangkan upaya yang dilakukan mengantisipasi hal tersebut diatas antara lain dengan menyiapkan anggaran untuk kegiatan optimlisasi padi serta secara terus menerus memberikan bimbingan teknis budidaya baik oleh petugas teknis tanaman pangan maupun oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) dilokasi tersebut.

Selanjutnya hasil rekapitulasi evaluasi capaian realisasi rata-rata produksi perkebunan komoditas karet dan kelapa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.16
PRODUKSI TANAMAN KARET DAN KELAPA TAHUN 2019 S.D 2021
PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Komoditas					
		Karet			Kelapa		
		Produksi (Ton/Tahun)			Produksi (Ton/Tahun)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Moro	23	55	29,57	12	18,50	0,42
2	Durai	25	154,90	136,18	6	5	76,87
3	Kundur	653	1201	961,25	125	118	576,75
4	Kundur Utara	1245	2650	1.902,59	89	60,50	138,23
5	Kundur Barat	630	630,50	641,10	121	115	86,81
6	Karimun	65	110,60	3,29	21	23,50	23,59
7	Tebing	15	13	40,35	6	1,30	28,85
8	Meral	14	14	10,28	25	25,60	22,36
9	Meral Barat	12	12,40	1,25	15	15,30	10,14
10	Buru	45	155	176,42	58	45,50	64,87
11	Belat	789	2442	972,00	119	108	71,77
12	Ungar	132	395	306,53	221	191,50	586,39
Jumlah		3.648	7.833	5.180,81	818	727,70	1.687,41

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Tabel 3.17
PRODUKTIVITAS TANAMAN KARET DAN KELAPA TAHUN 2019 S.D 2021
PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Komoditas					
		Karet			Kelapa		
		Produktivitas (Ton/Ha)			Produktivitas (Ton/Ha)		
		2018	2019	2021	2018	2019	2021
1	Moro	0,10	0,14	0,49	0,42	0,03	0,01
2	Durai	0,04	0,15	0,76	0,21	0,01	2,02
3	Kundur	0,21	0,77	1,15	0,31	1,64	1,65
4	Kundur Utara	1,20	1,03	1,08	0,41	0,78	0,92
5	Kundur Barat	0,22	0,31	0,55	0,61	0,68	0,49
6	Karimun	0,13	0,73	0,07	0,31	0,56	0,54
7	Tebing	0,02	0,12	4,04	0,12	0,06	3,21
8	Meral	0,41	0,14	0,93	1,16	0,34	1,02
9	Meral Barat	0,53	0,04	0,05	1,10	0,31	0,68
10	Buru	0,20	0,12	1,17	0,76	0,35	0,89
11	Belat	0,30	0,47	0,55	0,67	1,61	0,52
12	Ungar	0,23	0,13	0,66	0,66	1,31	2,67
JUMLAH		0,30	0,35	0,80	0,56	0,64	1,31

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Tanaman karet dan kelapa adalah komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di



Kabupaten Karimun, Daerah penghasil tanaman perkebunan di Kabupaten Karimun adalah Pulau Kundur dimana karet dan kelapa menjadi komoditas utama yang banyak ditanam oleh petani. Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat dan Kecamatan Belat merupakan Kecamatan penghasil karet terbesar yaitu Kecamatan Utara sebanyak 1.902,59 ton dengan produktivitas 1,08 ton/ha diikuti oleh Kecamatan Belat dengan produksi sebesar 972,00 ton dengan produktivitas 0,55 ton/ha. Realisasi produksi karet Kabupaten Karimun adalah sebanyak 5.180,81 ton dengan produktivitas 0,80 ton/ha yang berarti bahwa pada tahun yang akan datang besar kemungkinan produksi tanaman karet akan mengalami peningkatan, untuk tahun 2021 komoditi tanam karet produksi dan produktivitas tetap mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dengan capaian 136,31% untuk produksi dan 210,52% untuk produktivitas.

Untuk Tanaman kelapa Kecamatan Ungar penyumbang produksi kelapa terbesar diikuti oleh Kecamatan yang lain dengan masing-masing jumlah produksi Kecamatan Ungar 586.39 ton dengan produktivitas 2,67 ton/ha, Kecamatan Kundur produksi 576,75 ton dengan produktivitas 1,65 ton/ha, dan Kecamatan Kundur Utara produksi 138,23 ton dengan produktivitas 0,92ton/ha. Realisasi produksi kelapa Kabupaten Karimun adalah sebesar 1.687,41 ton dengan produktivitas 01,31 ton/ha, yang berarti bahwa pada tahun 2021 untuk komoditi tanaman kelapa produksi dan produktivitas melebihi target yang direncanakan dengan capaian 1.697,41 ton produksi atau 203,25% dan produktivitas target yang direncanakan tercapai 1,31 ton/ha atau 187%. Pada tahun 2021

Indikator pendukung sasaran ketiga ini dari sektor perikanan adalah *Jumlah Prodiuksi Usaha Perikanan*. Adapun target pada tahun 2021 adalah **56.000 Ton dengan realisasi target hanya sebesar 34.545,42 Ton**, dengan capaian **61,69 %**.**Pada dasarnya** Jumlah produksi perikanan dikembangkan dari sub sector perikanan tangkap dan subsector perikanan budidaya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 3.18
VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN MENURUT KECAMATAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

Kecamatan	Penangkapan		Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Karimun	7.686,93	304.111.050	0,41	8.280
Meral	9.140,91	386.126.410	85,37	1.814.325
Tebing	1.686,40	56.518.292	31,54	824.200
Kundur	315,74	10.085.207	0	-
Kundur Barat	579,54	18.475.054	1,03	23.900
Kundur Utara	441,99	12.549.873	0,79	38.000
Buru	1.965,46	68.050.345	0	-
Moro	8.602,47	276.353.369	684,2	3.434.500
Durai	945,11	30.123.107	0,3	24.000
Meral Barat	1.271,94	50.232.948	1,25	37.390
Belat	504,92	12.402.395	0	-
Ungar	598,69	15.923.294	0,415	10.540
Jumlah	33.740,08	1.240.951.349	805,3	6.215.135

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas, jumlah produksi perikanan di Kecamatan Meral memiliki Volume produksi tertinggi di sektor penangkapan (9.140.91 ton) dan di Kecamatan Moro memiliki volume produksi tertinggi di sektor budidaya (684.2 ton). Adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Karimun berupa sarana prasarana berupa armada penangkapan ikan dan alat tangkap menjadi kunci utama bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

Tabel 3.19
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN TANGKAP 2020 S.D. 2021

Produksi	Tahun 2020	Tahun 2021	Peningkatan (%)
Perikanan Tangkap	52.521	33.740,08	(-35,76%)
Perikanan Budidaya	431,82	805,33	(+84,49%)

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas, diketahui produksi perikanan tangkap pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 35,76 % dari tahun sebelumnya.



Tabel 3.20
ARMADA PENANGKAPAN PERIKANAN PER KECAMATAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)					JUMLAH (Unit)	
		PTM	PERAHU BERMOTOR	MOTOR TEMPEL	< 5 GT	5 - 30 GT		> 30 GT
1	MORO	222	1014	339	881	68	3	2,527
2	DURAI	20	132	4	224	1		381
3	KUNDUR	12	71	2	14	-		99
4	KUNDUR UTARA	17	59	-	14	-		90
5	KUNDUR BARAT	30	281	9	55	-		375
6	UNGAR	24	230	-	72	-		326
7	BELAT	129	158	1	60	-		348
8	KARIMUN	23	210	23	112	7		375
9	BURU	2	376	41	149	23		591
10	MERAL	85	125	2	303	102	123	740
11	TEBING	33	143	127	166	-		469
12	MERAL BARAT	67	105	32	126	-		330
JUMLAH		664	2,904	580	2,176	201	126	6,651

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Tabel 3.21
VOLUME DAN PRODUKSI PERIKANAN 2014 s.d 2021

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Nilai (Rp,-)
2014	40.487,93	1.508.009.813,-
2015	46.710,00	1.584.955.990,-
2016	62.127,00	1.585.650.000,-
2017	60.116,00	1.887.966.468,-
2018	66.387,00	2.029.508.642,-
2019	57.621,22	1.996.308.683,-
2020	52.952,82	1.864.502.760,-
2021	34.545,42	1.247.166.484,-

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel 3.21 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Karimun dengan angka produksi pada tahun 2021 yaitu **34.545,42 Ton** sedangkan pada tahun 2020 yaitu **52.952,82 Ton**.



Ada beberapa Faktor penyebab turunnya Produksi Perikanan di Kabupaten Karimun yang mencakup sector perikanan tangkap dan budidaya, yaitu :

- a. *Pandemi Virus Corona*. Wabah Virus Corona yang masih terjadi sampai saat ini di Indonesia, masih berdampak pada pembelian masyarakat konsumen, dimana nilai beli masyarakat menurun, disamping itu volume ekspor ikan juga menurun disebabkan karantina wilayah di beberapa Negara sehingga banyak restoran-restoran baik luar dan dalam negeri yang tutup.
- b. *Iklim*. Selain itu Perubahan Iklim mengakibatkan kenaikan suhu permukaan air laut, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, perubahan pola curah hujan dan fenomena el-ninodan la-nina, serta peningkatan frekuensi ombak besar yang menjadi rintangan dan nelayan jika ingin menjangkau fishing ground, sehingga berdampak kepada hasil produksi ikan;
- c. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Ketersediaan BBM;
- d. Pertengahan tahun 2020 tutupnya indomeren, dimana indomeren yang berada di kecamatan Moro , yang bergerak di bidang budidaya laut dari tahun ke tahun sebagai penyumbang tertinggi untuk produksi budidaya laut (kakap putih)

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perikanan Kabupaten Karimun dalam menangani turunnya jumlah produksi perikanan di sector perikanan tangkap yaitu :

- a. pengendalian dan peningkatan sarpras penangkapan ikan kab. Karimun;
- b. penertiban dan pengawasan penangkapan ikan agar potensi penangkapan ikan bisa dikelola secara optimal.



Sementara dalam sector perikanan budidaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perikanan Kabupaten Karimun yaitu :

- a. Peningkatan dan penambahan sarpras Budi daya perikanan;
- b. Optimalisasi potensi budidaya yang dimiliki;
- c. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha budidaya;
- d. Pengaturan dan pengelolaan panen.

Indikator selanjutnya yang mendukung sasaran ini adalah **Jumlah Ekspor usaha perikanan**. Target tahun 2021 sebesar 7.800 ton dengan realisasi target sebesar **3.858 ton atau capaian** hanya mencapai 48,23%. Berikut jumlah data ekspor perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22
JUMLAH EKSPOR PRODUK PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2015 s.d . 2021

NO	URAIAN	PRODUKSI (Ton)						
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Jumlah ekspor perikanan budidaya	2200	2.335	-	-	-	-	-
2.	Jumlah ekspor perikanan tangkap	16.350	16.655	10.111	7.000,014	4.961,66	4.192,63	3.858
3.	Jumlah ekspor pengolahan perikanan	3.360	3.771	-	-	-	-	-
JUMLAH		21.910	22.761	10.111	7.000,14	4.961,66	4.961,66	3.858

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa volume ekspor perikanan mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan ekspor khususnya untuk tujuan negara Malaysia ditambah lagi dengan masa pandemi Covid-19, dimana negara tujuan ekspor kita adalah Malaysia dan Singapura menerapkan lockdown dinegaranya. Sehingga permintaan akan komoditi perikanan menurun dan aturan masuknya barang ekspor



di dua negara tersebut juga diperketat sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menyebabkan volume ekspor perikanan mengalami penurunan.

Dengan adanya kejadian tersebut yang menyebabkan ekspor perikanan turun setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menata ulang jalur ekspor ke Malaysia dan Singapura agar realisasi ekspor meningkat.
2. Mengoptimalkan potensi ekspor yang dimiliki Kabupaten Karimun.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Karantina Perikanan, Beacukai dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepelabuhanan dan Pengawasan Perikanan).
4. Menjajaki peluang potensi ekspor produk perikanan lainnya

Untuk Perkembangan produksi dan nilai ekspor perikanan per-triwulan untuk tahun 2021 di Kabupaten Karimun disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.23
VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN SELAMA TAHUN 2021

NO	BULAN	VOLUME (Ton)	NILAI (Rp.)
1	JANUARI-MARET	1.026,66	29.173.250
2	APRIL-JUNI	1.209,03	21.300.796
3	JULI-SEPTEMBER	964,72	24.359.270
4	OKTOBER-DESEMBER	657,60	16.538.750
JUMLAH		3,858	91.372.066

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

3. SASARAN TERWUJUDNYA KARIMUN SEBAGAI DAERAH WISATA

Terwujudnya Karimun sebagai Daerah Wisata pada Tahun 2021 merupakan sasaran ke-3 pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 yaitu *Terwujudnya Karimun sebagai Daerah Wisata.*



Adapun yang menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran ini adalah Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Indikator Rata-Rata Lama Wisatawan Menginap. Hasil realisasi dan capaian kedua indikator dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
CAPAIAN INDIKATOR

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah Kunjungan	105.000 org		
	Wisatawan Asing	15000 org (**)	14451 Orang (**)	96,34%
2.	Rata-rata lama wisatawan menginap	1,5 Hari	1,04 Hari	69,33 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				82,83 %

Catatan:

- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata capaian dari kedua indikator tersebut adalah sebesar 82,83% yang bermakna *baik* dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Adapun evaluasi dan analisis dari capaian kedua indikator yang mendukung sasaran ke-3, pada indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing pada Tahun 2021 target yang ditetapkan adalah sebanyak 15.000 orang* yang mana target tersebut menggunakan target Dinas Pariwisata bukan target yang telah ditetapkan pada sasaran kinerja Kepala Daerah, dikarenakan target pada sasaran kinerja Kepala Daerah terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi target dari indikator jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun 2020. Untuk realisasi target pada indikator ini diambil dari realisasi tahun 2020 sebanyak 14.451 orang, dikarenakan tahun 2021 kunjungan wisatawan asing mengalami penurunan 100 persen yaitu nol 0 (nol), hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih ditutupnya pintu masuk pelabuhan internasional untuk wisatawan asing di Kabupaten Karimun.



Hal ini terjadi diakibatkan karena adanya Pandemi Coronacovid disease-19 (Covid-19), dan adanya pembatasan transportasi antar Negara serta adanya penutupan pintu masuk untuk wisatawan asing ke wilayah Kabupaten Karimun.

Namun akan menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun pada masa Pandemi Coronacovid disease-19 (Covid-19) agar bisa menarik kembali kunjungan wisatawan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dapat membuka kembali pintu masuk untuk Wisatawan Mancanegara yaitu pintu masuk pada pelabuhan internasional. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kembali kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara akan memperbaiki hal-hal yang belum optimal agar untuk tahun berikutnya nilai capaian bisa lebih dari target yang ditentukan.

Adapun data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Karimun dari tahun 2015-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN ASING KE KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2015 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN (Orang)	PENINGKATAN (PENURUNAN) %
1	2015	99.802	- 1,96
2	2016	99.026	- 0,78
3	2017	93.517	-5,57
4	2018	84.718	-9,40
5	2019	112.753	33,09
6	2020	14.451	-87,18
7	2021	0	-100

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel 3.25 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2018 jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Karimun terus mengalami penurunan sebesar -9,40% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 33,09% perbandingan dengan tahun 2018. Namun



pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar (-87,18) atau selisih sebanyak 98.302 orang dibanding tahun 2019.

Tahun 2021 kembali terjadi penurunan yang sangat jauh dari tahun – tahun sebelumnya sebesar -100%, dapat disimpulkan tahun 2021 tidak ada wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Karimun. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Karimun kembali menurun berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak seperti pihak imigrasi, administrasi pelabuhan dan pelaku pariwisata lainnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi Covid-19 (coronavirus disease -19) yang menjadi dampak penurunan kunjungan wisatawan asing.
2. Masih ditutupnya pintu masuk pelabuhan internasional sehingga wisatawan dari negara tetangga belum bisa masuk.
3. Belum maksimalnya promosi dalam festival, event, sales mission berskala internasional, kerjasama dengan berbagai Travel Agent, serta melakukan famtrip untuk para media, jurnalis, blogger, influencer, serta vlogger.
4. Masih kurangnya pengelolaan usaha kawasan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung.
5. Belum terbenahi dan tertatanya sarana dan prasarana wisata yang ada di Kabupaten Karimun.
6. Kurangnya infrastruktur yang menunjang kepariwisataan.
7. Belum optimalnya, kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara ke Kabupaten Karimun adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan rekomendasi beberapa pegawai Dinas Pariwisata untuk meningkatkan kemampuan melalui jenjang pendidikan baik melalui tugas belajar, izin belajar, maupun pelatihan singkat. Memberikan pembekalan pada



pelaku pariwisata melalui pelatihan pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

b. Melakukan penataan objek wisata Kabupaten Karimun, seperti Objek wisata Air Panas Tanjung Hutan Kecamatan Buru yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun dan penataan objek wisata Pantai Pelawan yang dilaksanakan langsung Dinas Pariwisata yang berada di Kecamatan Meral Barat.

c. Meningkatkan kualitas infrastruktur menuju objek wisata dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti telah selesai pengerjaannya yaitu jalan menuju objek wisata Air Panas Tanjung Hutan di Kecamatan Buru, sedangkan jarak tempuh dari pelabuhan terdekat ± 15 menit menuju objek wisata Air Panas Tanjung Hutan.

Untuk selanjutnya mengusulkan jalan menuju objek wisata Air Terjun Pongkar, mengusulkan revitalisasi Kolam Utama Air Panas Tanjung Hutan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat. Tahun 2021 dalam rangka penataan objek wisata Pantai Pelawan telah dibangun 15 (lima belas) unit Plaza Kuliner, 508 M² Tempat Parkir, 902 M² Jalan Dalam Kawasan, serta melakukan pemeliharaan terhadap aset – aset pariwisata yang ada di beberapa objek wisata.

d. Dengan beralihnya kunjungan wisata mancanegara keluar Karimun karena struktur dan infrastruktur yang lebih tertata, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun berupaya terus untuk menarik kunjungan dengan suguhan alternatif lain seperti peningkatan penampilan event budaya, atraksi wisata dan melakukan promosi wisata melalui Media Digital (Website, Facebook dan Instagram). Alamat Website: www.karimuntourism.com, Instagram: Karimun tourism, Facebook: Karimun tourism.



Sebagai perbandingan kunjungan wisatawan mancanegara di kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.26
JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN KAB/KOTA SE PROV.KEPRI TAHUN 2017-2021

NO	PINTU MASUK	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Karimun	85.771	84.718	112.753	21.537	15*
2	Bintan	371592	522.399	634.735	64.234	155*
3	Batam	1.504.275	1.887.284	1.947.943	306.777	2104*
4	Tanjung Pinang	117.882	140.603	169.364	18.700	0*

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kepri

Dari tabel 3.25 dan 3.26 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Karimun. Hal ini untuk tabel kedua data yang diambil melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Karimun pada tahun 2021 berjumlah 15 orang, sedangkan tabel data yang diambil dari Kantor Imigrasi wilayah Kabupaten Karimun untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 nihil. Sebelum tahun 2021 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pantai Telunas Kabupaten Karimun masuk dari pintu kedatangan Batam, dan pada bulan April 2020 s.d tahun 2021 Pantai Telunas masih ditutup untuk wisatwan mancanegara.

Untuk indikator kedua yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya rata-rata lama wisatawan menginap di Kabupaten Karimun. Adapun rata-rata lama wisatawan menginap tahun 2021 dapat dilihat dari tingkat hunian hotel di Kabupaten Karimun yang tertera pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.27
TINGKAT HUNIAN HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	NAMA HOTEL	JUMLAH KUNJUNGAN		PENINGKATAN/PENURUNAN	
		2020	2021	HARI	%
1	Hotel Aston	1.772	1244	-528	-29,79683973
2	Hotel Artha	0	0	0	0
3	Hotel Alishan	4932	0	-4.932	-100
4	Hotel Asia	3364	0	-3.364	-100
5	Hotel "A"	1800	167	-1.633	-90,72222222
6	Hotel Balai Indah	2992	1609	-1.383	-46,22326203
7	Hotel Balai View	3470	3097	-373	-10,74927954
8	Hotel Century 21	0	0	0	0
9	Hotel Erison	876	0	-876	-100
11	Hotel Family	2498	796	-1.702	-68,13450761
12	Hotel Gabion	652	648	-4	-0,613496933
13	Hotel Golden	0	0	0	0
15	Hotel Himalaya	1532	209	-1.323	-86,35770235
16	Hotel Holiday Karimun	2472	6500	4.028	162,9449838
17	Hotel H3	894	497	-397	-44,40715884
18	Hotel Indah	2260	318	-1.942	-85,92920354
19	Hotel Karimun City	0	0	0	0
20	Hotel King Star	724	261	-463	-63,95027624
21	Hotel Lika	1358	0	-1.358	-100
22	Hotel Mahkota	0	0	0	0
23	Hotel Maximilian	3136	1757	-1.379	-43,97321429
24	Hotel Megah	3134	1276	-1.858	-59,28525846
25	Hotel Milenium	5404	2653	-2.751	-50,90673575
26	Hotel New City	432	0	-432	-100
27	Hotel Nirwana	2744	0	-2.744	-100
28	Hotel Paradise	1500	941	-559	-37,26666667
29	Hotel Paragon	896	0	-896	-100
30	Hotel Rasa Indah	2090	1326	-764	-36,55502392
31	Hotel Rama Shinta	4094	2054	-2.040	-49,82901808
32	Hotel Royal	0	463	463	100
33	Hotel Satria	0	0	0	0
34	Hotel Shangrila	530	842	312	58,86792453
35	Hotel SKY	36	2452	2.416	6711,111111
36	Hotel Super 888	348	759	411	118,1034483



37	Hotel Taman Bunga	982	707	-275	-28,00407332
38	Hotel Taman Kelapa	5490	890	-4.600	-83,78870674
39	Hotel Tanjung Balai	2134	897	-1.237	-57,96626054
40	Hotel Top Star	3542	795	-2.747	-77,55505364
41	Hotel Victoria	1978	959	-1.019	-51,51668352
42	Hotel 21	0	0	0	0
43	Hotel Wikoria	3000	570	-2.430	-81
44	Hotel Wiko	0	241	241	100
45	Hotel Holiday Kundur	1322	90	-1.232	-93,19213313
46	Hotel Mataram	262	0	-262	-100
47	Hotel Prima	2952	1908	-1.044	-35,36585366
48	Hotel Gembira	1264	0	-1.264	-100
49	Hotel Berlian Kundur	1688	2050	362	21,44549763
50	Hotel Hocky	272	0	-272	-100
51	Hotel Pelangi	510	0	-510	-100
52	Hotel Safari Raya	0	0	0	0
53	Hotel Tanjung Batu	0	0	0	0
54	Hotel Nostalgia	0	0	0	0
55	Hotel Pondok Wisata Fajar	1400	901	-499	-35,64285714
56	Hotel Telunas Resort	1420	0	-1.420	-100
57	Hotel 868	988	0	-988	-100
JUMLAH		85.144	39.877	-45.267	-53

Sumber: Rekapitulasi Laporan hunian bulanan hotel Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten.Karimun Tahun 2021.

Dari tabel 3.27 diatas dapat diketahui bahwa jumlah atau tingkat hunian hotel pada tahun 2021 berjumlah 39.877 hari (kamar hotel terjual), dengan ini mengalami penurunan (53%) dari tahun 2020 berjumlah 85.144 hari (kamar hotel terjual), Data tabel diatas menunjukkan ada 23 hotel tidak mengirimkan laporan huniannya pada setiap bulan, sehingga ditulis laporannya nol (0). Namun dari target yang telah ditetapkan pada indikator sasaran rata – rata lama wisatawan menginap yaitu 1,5 hari dan realisasi 1,04 hari dengan capaian 69,33%, dapat dijelaskan rata – rata wisatawan menginap hanya 1 hari saja. *Realisasi target pada indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah*



kunjungan wisatawan nusantara yaitu untuk tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karimun sebanyak 38.166 orang, dengan formula perhitungannya:

$$\frac{\text{Jumlah Hunian Hotel}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan}} = \text{Hari} \quad \frac{39.877}{38.166} = 1,04 \text{ Hari}$$

Semenjak adanya pandemi Covid-19 yang berdampak dari tahun 2020 hunian hotel banyak diisi oleh wisatawan nusantara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau yang lebih banyak melakukan perjalanan wisata ke Kabupaten Karimun, sebagai perbandingan dapat dilihat dari tabel dibawah ini untuk tingkat hunian hotel di Kabupaten Karimun.

Tabel 3.28
TINGKAT HUNIAN HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016-2021

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN	PENINGKATAN (PENURUNAN) %
1	2016	99.554 Kamar	-
2	2017	128.934 Kamar	29,51
3	2018	150.730 Kamar	16,90
4	2019	306.274 Kamar	103,19
5	2020	85.144 Kamar	-72,20
6	2021	39.877 Kamar	-53,16

Sumber: Rekapitulasi Laporan Hunian Hotel Tahun 2016-2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dari tabel 3.28 diatas dapat dijelaskan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat hunian hotel mengalami kenaikan dan tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, selain dari dampak pandemi covid-19 masih terdapat hambatan yang lain.

Berdasarkan data hasil capaian kinerja dapat diketahui indikator kinerja menunjukkan hasil capaian yang belum memuaskan, serta masih dijumpai kendala dan tantangan dilapangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pariwisata:

1. Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Kabupaten Karimun perlu ditingkatkan pada pasar wisman,



terutama pada masa pandemi covid-19 ini wisatawan nusantara yang perlu ditingkatkan.

2. Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
3. Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan.
4. Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikat profesi masih kurang.
5. Akses menuju objek wisata perlu ditingkatkan.
6. Sarana dan prasarana objek wisata perlu ditingkatkan baik dari kenyamanan dan kebersihan.

Adapun untuk sarana dan prasarana yang telah dibangun pada Objek Wisata Pantai Pelawan dari Tahun 2018 – 2021 sebanyak 7 (tujuh) pembangunan yaitu Panggung Kesenian, Gazebo, Tempat Ibadah, Jalan Dalam Kawasan, Kios Cenderamata, Menara Pandang (Viewer Deck), dan Ruang Ganti/Toilet, Tempat Parkir, Plaza Kuliner dan Jalan Dalam Kawasan kembali dibangun pada tahun 2021. Anggaran pembangunan tersebut melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pariwisata. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.29
INSFRATRUKTUR YANG SUDAH DIBANGUN PADA OBJEK WISATA PANTAI PELAWAN DARI TAHUN 2018- 2021

No	Tahun	Kegiatan	Volume	% Fisik
1.	2018	Pembangunan Panggung Kesenian	1 Unit	100
		Pembangunan Gazebo	15 Unit	100
		Pembangunan Tempat Ibadah	1 Unit	100
2.	2019	Pembuatan Jalan Dalam Kawasan	650 Meter	100
3.	2020	Pembangunan Kios Cenderamata	2 Unit	100
		Pembangunan Menara Pandang (Viewer Deck)	1 Unit	100
		Pembuatan Ruang Ganti / atau Toilet	2 Unit	100
4.	2021	Pembangunan Tempat Parkir	508 M2	100
		Pembangunan Jalan Dalam Kawasan	902 M2	100
		Pembangunan Plaza Kuliner	15 Unit	100

Sumber : Data Aset Dinas Paeiwisata dan Kebudayaan

Penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata, terdiri atas 2 (dua) efisiensi yaitu efisiensi



sumber daya biaya dan efisiensi sumber daya manusia.

Dalam penggunaan sumber daya biaya untuk pengembangan destinasi pariwisata yaitu penyediaan sarana dan prasarana objek wisata dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata agar kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara semakin meningkat, dan wisatawan bisa lebih dari satu hari tinggal di Kabupaten Karimun. Tahun 2021 Dinas Pariwisata mendapatkan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebesar Rp.2.447.473.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.148.095.587,- (realisasi keuangan 87,77 % dan realisasi fisik 100%), dengan pembangunan 508 M2 Tempat Parkir, 902 M2 Jalan Dalam Kawasan, 15 Unit Plaza Kuliner dan termasuk untuk Desain Perencanaan Kontraktual serta Jasa Konsultansi Pengawasan Kontraktual. Secara teori anggaran sebesar diatas hanya untuk penggunaan belanja modal saja tanpa adanya anggaran pendukung seperti belanja pegawai, belanja barang pakai habis dan belanja perjalanan dinas. Namun tanpa adanya anggaran pendukung dan dengan keterbatasan sumber daya manusia Dinas Pariwisata yang berkualitas, kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata tetap terlaksana dan memberikan hasil yang baik.

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah diberikannya pelatihan dasar bagi pelaku usaha pariwisata dan pegawai Dinas Pariwisata, pelatihan tersebut sebagai berikut:

1. Pelatihan Pengelolaan Toilet di Destinasi Wisata.
2. Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata.
3. Pelatihan Kebersihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Wisata.
4. Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Pariwisata (termasuk digitalisasi)
5. Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi.



Pembekalan yang telah diberikan sudah mulai dilaksanakan oleh pelaku usaha pariwisata dan SDM Dinas Pariwisata sendiri.

4. SASARAN MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENGHUBUNG ANTAR WILAYAH

Kabupaten Karimun adalah daerah yang memiliki banyak pulau. hal ini menyebabkan akses untuk menuju ke suatu tempat membutuhkan waktu dan biaya. Membangun jalan dan jembatan yang mampu menghubungkan antar daerah pemukiman penduduk perdesaan di masing-masing daerah kecamatan yang masih terisolir merupakan suatu langkah yang strategis untuk memudahkan masyarakat menuju ke suatu tempat sehingga Pemerintah Kabupaten Karimun membuat sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penghubung Antar Wilayah mejadi sasaran ke-4 pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021.

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran ke-4 ditentukan oleh 4 indikator yaitu Indikator Panjang Jalan Terhubung Antar Wilayah Dalam Kondisi Baik, Indikator Jumlah Titik Akses Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk Minimal Dilalui Roda 4, Indikator Persentase Pulau Berpenghuni yang Terjangkau Transportasi Laut Regular dan Indikator Persentase Pelabuhan Laut Yang Memadai. Adapun realisasi dan capaian dari empat indikator sasaran ke-4 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30
CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Panjang Jalan Terhubung Antar Wilayah Dalam Kondisi Baik	643,98 KM	631,61 Km	98,07%
2.	Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk minimal dilalui roda 4	1.133 Titik		
		1.265 Titik (**)	1.215Titik (**)	96,04%
3.	Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut regular	62,90%	40%	63.59%
4.	Persentase pelabuhan laut yang memadai	85,09%	85%	99,89%
RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN				89,40%



Tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian dari 4 indikator sasaran ke-4 adalah sebesar 89,40 %, Hal ini menjelaskan bahwa hasil yang sudah dicapai bermakna baik sekali dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Dari hasil capaian kinerja setiap indikator sangat memuaskan, sehingga penetapan target tahun depan perlu ditingkatkan guna mendukung kinerja pemerintah akan datang Pencapaian sasaran ini didukung dengan indikator kinerja antara lain :

Meningkatnya sarana dan prasarana penghubung antar wilayah secara memadai diukur melalui panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik dan **Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik**. Maksud terhubung antar wilayah yaitu menghubungkan atau mengkoneksikan suatu desa/kelurahan yang terisolir dari ibukota kecamatan, dalam hal ini untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan didaerah pedesaan, sedangkan maksud dalam kondisi baik disini adalah jalan dalam kondisi beraspal yang masih dapat dilalui. Indikator ini diukur dengan Realisasi Panjang Jalan Beraspal sampai dengan Tahun 2021. Tahun 2021 target yang ditentukan sebesar 461,42 Km atau dengan asumsi sebesar 52,117% dari total panjang jalan Kabupaten Karimun sepanjang 885.342 Km. Adapun panjang jalan terhubung antar wilayah sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan panjang kondisi(%) tercatat Baik sepanjang 288.472 Km atau 32,58%, tercatat Sedang sepanjang 415.828 Km atau 46,97%, tercatat Rusak Ringan sepanjang 133.127 Km atau 15,04%, tercatat Rusak Berat sepanjang 47.915 Km atau 5,41% dari total panjang jalan di Kabupaten Karimun sepanjang 885.342 Km. Dari tingkat capaian panjang jalan terhubung antar wilayah terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan jalan aspal terhadap ruas jalan yang kondisi jalan Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat dan disebabkan adanya pandemi Virus Corona atau COVID-19 secara global terjadi diseluruh dunia sehingga harus melakukan



Refocusing anggaran atau penyesuaian/rasionalisasi anggaran dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan wabah COVID-19, menyebabkan beberapa kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah yang bersumber dari APBN melalui Tranfer Keuangan ke Daerah (TKKD) terpaksa harus dirasionalisasi atau dibatalkan.

Berikut panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik di Kabupaten Karimun sampai dengan tahun 2021 (Meter):

Tabel 3.31

PANJANG JALAN TERHUBUNG ANTAR WILAYAH DALAM KONDISI BAIK DI KABUPATEN KARIMUN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 (METER)

Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan									
	Aspal			Kerikil, Semen, Lapen			Tanah			Jumlah
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020
Moro	57,21	69,92	71,42	86,509	82,20	82,20	12,955	11,43	9,93	163,55
Durai	3,200	3,20	3,20	52,250	52,25	52,25	40,679	40,68	40,68	96,13
Kundur	89,827	95,22	97,54	12,569	10,04	10,75	79,124	76,27	73,23	181,52
Kundur Utara	65,800	65,80	66,40	4,700	4,70	5,15	94,475	94,48	93,42	164,98
Kundur Barat	45,387	45,85	47,31	1,550	1,55	1,55	7,563	7,10	5,64	54,50
Ungar	10,500	10,50	10,50	15,500	15,50	15,50	-	-	-	26,00
Belat	-	-	-	15,000	15,00	18,38	18,800	18,80	15,42	33,80
Karimun	87,304	87,30	88,23	938	0,94	0,94	3,528	3,53	2,60	91,77
Buru	79,900	83,01	83,01	3,760	0,65	0,65	250	0,25	0,25	83,91
Meral	51,536	51,54	51,54	0	-	-	0	-	-	51,54
Tebing	74,565	76,97	79,53	2,711	1,71	0,51	2,500	1,10	0,30	79,78
Meral Barat	25,775	26,51	26,91	-	-	-	2,075	1,34	0,94	27,85
Jumlah	597,875	615,81	625,59	195,487	184,53	187,88	261,949	254,97	242,40	1.055,31

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa agar tidak menjadi necropolis city. Ada beberapa faktor pendorong kebutuhan infrastruktur, antara lain:

- Pertumbuhan penduduk

Adanya pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Terutama untuk kebutuhan



pokok, antara lain makanan, pakaian, dan perumahan. Maka dari itu pemenuhan sarana prasarana sangat diperlukan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat.

- Urbanisasi

Tingginya angka urbanisasi masuk ke kota menyebabkan meningkatnya kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contoh-contoh infrastruktur tersebut antara lain: transportasi, telekomunikasi, energi, perumahan, fasilitas umum, dsb.

- Bencana alam

Munculnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, air rob, gempa bumi, dll merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan akan infrastruktur sangat diperlukan saat terjadinya bencana alam karena berfungsi sebagai alat pertolongan atau sebagai pengganti infrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut, contoh pembangunan infrastruktur karena bencana alam misalnya pembangunan jalan dan jembatan, telekomunikasi, perumahan, fasilitas umum, klinik, listrik, dll.

Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan diperlukan berbagai infrastruktur. Antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dsb. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor jalan, subsektor transportasi dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Pembangunan jalan sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut akan mempengaruhi pada



pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur salah satu contohnya seperti jaringan jalan juga akan memberi manfaat kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Berdasarkan peran dan fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi), maka dapat disimpulkan bahwa sektor infrastruktur merupakan fundamental perekonomian di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Karimun pada khususnya.

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah Pemerintah telah melakukan beberapa langkah – langkah sebagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Melakukan Pembangunan dan peningkatan Jaringan Jalan yang menjangkau ke seluruh wilayah dalam satu pulau secara berkelanjutan;
2. Melakukan usulan dan koordinasi baik melalui Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam Pemanfaatan Integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
3. Meningkatkan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah.

Program dan kegiatan diatas masih atau tergolong cukup rendah dari pagu anggaran yang ada. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan Dana Transfer Keuangan Ke Daerah (Dana TKKD) baik dari pusat maupun provinsi dan Pencapaian Pendapatan yang tidak sesuai dengan target, sehingga ada beberapa program dan kegiatan harus dilakukan tunda bayar ke tahun berikutnya. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan



bahwa pada tahun 2021 target fisik sudah tercapai namun secara umum tidak terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya anggaran.

Masih banyak keterlambatan pembangunan dalam menghubungkan antar wilayah – wilayah perdesaan ke pusat kegiatan lokal tidak berarti memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan terus berjalan walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah, hal tersebut sangat diharapkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti Para anggota DPRD, LSM dan Tokoh Masyarakat untuk dapat mendukung program pembangunan yang menghubungkan wilayah perdesaan/terpencil ke pusat kegiatan lokal. Masih banyak keterlambatan pembangunan dalam menghubungkan antar wilayah – wilayah perdesaan ke pusat kegiatan lokal menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan dari upaya yang dilakukan diatas tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam meningkatkan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah, hal tersebut sangat diharapkan dukungan dari berbagai

elemen masyarakat seperti Para anggota DPRD, LSM dan Tokoh Masyarakat untuk dapat mendukung program pembangunan yang menghubungkan wilayah perdesaan/terpencil ke pusat kegiatan local. Indikator kedua yang mendukung sasaran ini adalah *Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk minimal dilalui roda 4*. Tahun 2021 target jumlah titik penghubung dari Ibu Kota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk sejumlah 1.265 titik dengan realisasi target sejumlah 1.215 atau capaian 96,04% . Dibandingkan tahun 2020 terdapat penambahan titik sebanyak 79 titik. Perbandingan data jumlah titik akses penghubung dapat di lihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.32
TITIK AKSES PENGHUBUNG TAHUN 2019 -2021

Nama Pulau/ Nama Kecamatan	Jumlah Titik Akses Sampai Dengan Tahun 2019	Jumlah Titik Akses Sampai Dengan Tahun 2020	Jumlah Titik Akses Sampai Dengan Tahun 2021
Pulau Karimun			
- Kecamatan Karimun	204 Titik	219 Titik	224 Titik
- Kecamatan Meral	163 Titik	178 Titik	190 Titik
- Kecamatan Meral Barat	53 Titik	71 Titik	73 Titik
- Kecamatan Tebing	174 Titik	189 Titik	195 Titik
Pulau Kundur			
- Kecamatan Kundur	195 Titik	200 Titik	201 Titik
- Kecamatan Kundur Barat	101 Titik	115 Titik	116 Titik
- Kecamatan Kundur Utara	133 Titik	138 Titik	140 Titik
Pulau Buru			
- Kecamatan Buru	14 Titik	14 Titik	14 Titik
Pulau Moro			
- Kecamatan Moro	86 Titik	86 Titik	88 Titik
Pulau Durai			
- Kecamatan Durai	4 Titik	6 Titik	6 Titik
Pulau Ungar			
- Kecamatan Ungar	8 Titik	8 Titik	8 Titik
TOTAL	1.105 Titik	1.184 Titik	1.215 Titik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pencapaian sasaran selanjutnya didukung dengan indikator kinerja *Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut reguler*. Kabupaten karimun memiliki 54 Pulau berpenghuni, dari 54 pulau berpenghuni yang didata ada 35 pulau yang memerlukan transportasi laut reguler dengan tujuan dari pulau tersebut ke ibu kota kecamatan ataupun ibu kota kabupaten. Target di tahun 2021 sebesar 62.90% yaitu 33 pulau berpenghuni akan terlayani oleh transportasi laut reguler, sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 40 %, yaitu baru sebesar 14 pulau berpenghuni yang telah terjangkau transportasi laut reguler, ketidak berhasilan pencapaian dari indikator ini adalah karena tidak bertambahnya pulau-pulau berpenghuni yang terlayani oleh transportasi laut reguler, ditahun 2021 ini moda transportasi laut dan trayek angkutan laut tidak bertambah. Tidak tercapai target pada indikator ini penyebabnya adalah :



1. Tidak bertambahnya moda angkutan laut dan trayek baik dari pemerintah/trayek perintis maupun pengusaha angkutan laut.
2. Besarnya biaya pengoperasian angkutan laut yang tidak ditunjang dengan jumlah penumpang/pengguna jasa angkutan untuk melayani angkutan kepulau-pulau berpenghuni.

Tabel 3.33
PULAU-PULAU BERPENGHUNI YANG TERLAYANI TRANSPORTASI LAUT
REGULER TAHUN 2017 S.D 2021

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PULAU BERPENGHUNI PERLU DIJANGKAU TRAYEK TRANSPORTASI LAUT REGULER	Trayek angkutan laut reguler				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tebing	Pongkar	1 Tokonghiu Kecil	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
2	Karimun		2 Kenipan	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			3 Parit	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			4 Tulang	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			5 Karimun	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buru		6 Buru	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			7 Gunung papan	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Belat	Sebele	8 Belat	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			9 Degong	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			10 Seraya	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			11 Panjang	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			12 Junge	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			13 Pelangkat	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			14 Serenteng	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
5	Kundur Barat		15 Lalang	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
6	Kundur		16 Kundur	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			17 Ungar	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			18 Mandah	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			19 Ngal	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			20 Propos	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
7	Durai		21 Durai	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			22 Akat	Ada sekarang sudah mulai lancar	Ada	Ada	Ada	Ada
			23 Semembang	Ada sekarang sudah mulai lancar	Ada	Ada	Ada	Ada



NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PULAU BERPENGHUNI PERLU DIJANGKAU TRAYEK TRANSPORTASI LAUT REGULER		Trayek angkutan laut reguler				
					2017	2018	2019	2020	2021
8	Moro		24	Moro Darat	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			25	Moro Tengah	Belum lancar setiap hari	Ada	Ada	Ada	Ada
			26	Pauh	tidak ada	tidak ada			
			27	Jang	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			28	Citlim	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			29	Pisang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			30	Combol	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			31	Bahan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			32	Muraibatu	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			33	Pasai	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			34	Keban	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari
			35	Sugi Atas	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Jumlah					13	14	14	14	14
Jumlah Pulau yang memerlukan transportasi laut reguler									35

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Target di tahun 2021 sebesar 85,09% pelabuhan yang memadai di Kabupaten Karimun, realisasi target sebesar 85% dan capaian target pada tahun 2021 adalah sebesar 99,89%, atau telah terbangun 102 Unit pelabuhan laut yang memadai dari 120 unit pelabuhan yang memadai yang ini dimiliki sampai dengan tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah Pelabuhan bertambah 1 unit dengan dibangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal di Baran Kecamatan Meral, sehingga total Pelabuhan yang memadai berjumlah 102 unit. Berikut disampaikan jumlah pelabuhan yang memadai Kecamatan/Pulau se-Kabupaten Karimun Tahun 2018 s.d 2021.



Tabel 3.34
JUMLAH PELABUHAN LAUT YANG MEMADAI KECAMATAN / PULAU SE
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 s.d 2021

Kecamat an/Pulau	Th. 2018					Th. 2019					Th. 2020					Th. 2021				
	L	KL	TL	UB	T	L	KL	TL	UB	T	L	KL	TL	UB	T	L	KL	TL	UB	T
Karimun	8	-	1	2	11	8	-	1	2	11	8	-	1	2	11	8	-	1	2	11
Meral	1	1	1		3	1	1	1		3	1	1	1		3	2	1	1		3
Tebing	6	-	2	1	9	6	-	2	1	9	6	-	2	1	9	6	-	2	1	9
Buru	15	-	-		15	16	-	-		16	16	-	-		16	16	-	-		16
Kundur	8	1	-	1	10	8	1	-	1	10	8	1	-	1	10	8	1	-	1	10
Kundur Barat	7	-	1		8	7	-	1		8	7	-	1		8	7	-	1		8
Kundur Utara	7	-	-	1	8	7	-	-	1	8	7	-	-	1	8	7	-	-	1	8
Durai	8	-	-	1	9	8	-	-	1	9	8	-	-	1	9	8	-	-	1	9
Moro	24	-	3	2	29	28	-	-	1	29	28	-	-	1	29	28	-	-	1	29
Meral Barat	-	-	-		1	-	-	-		1	-	-	-		1	-	-	-		1
Belat	6	-	2	2	10	7	-	1	1	9	7	-	1	1	9	7	-	1	1	9
Ungar	5	-	1	1	7	5	-	1	1	7	5	-	1	1	7	5	-	1	1	7
JUMLAH	95	2	11	11	120	101	2	11	11	120	101	2	11	11	120	102	2	11	11	120

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Keterangan :

- L = Pelabuhan yang layak
- KL = Pelabuhan yang kurang layak
- TL = Pelabuhan yang tidak layak
- UB= Usulan Baru
- T = Total Pelabuhan

5. SASARAN MENINGKATNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR

Meningkatnya dan memelihara jalan yang telah dibangun, meningkatkan fasilitas layanan air minum (PDAM) untuk rumah tangga pada lingkungan pemukiman penduduk secara merata hingga ke pedesaan dan bertambahnya Luas RTH merupakan strategi yang harus dilakukan untuk tercapainya sasaran kedelapan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 3.35
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	65,04 %	67,28 %	103,4 %
2	Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik	70,07%		
3	Persentase Wilayah terlayani Jaringan Komunikasi	90%		
		95% (**)	93% (**)	103,4%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				94,63%

✓ *Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.*

Berdasarkan dari tabel di atas rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 94,63 % hal tersebut baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian dari masing – masing indikator yang mendukung sasaran ini dapat dikatakan berhasil walaupun masih ada yang belum mencapai 100%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kedua indikator ini mengalami peningkatan dan akan dijelaskan disetiap uraian inidaktor tersebut, beserta evaluasi dan analisisnya.

Sebagaimana telah dituangkan dalam INPRES tahun 2010 dan tahun 2011, ketentuan tersebut mengatur tentang tindakan “Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku” dengan sasaran “meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum”. Bidang Sumber Daya Air selaku Penyedia Air Baku bertanggung jawab di bagian hulu dan Bidang Cipta Karya di bagian hilir selaku Pembina Unit Usaha Air Bersih (UUAB) yang bertanggung jawab dalam pendistribusi air minum kepada masyarakat, sehingga tercipta program yang terpadu, saling menunjang dan tepat sasaran. Indikator ini diukur melalui Perbandingan Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Air Bersih dibagi Jumlah Keluarga/Rumah Tangga Se – Kabupaten dikali 100%.

Target indikator Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih tercatat pada Tahun 2021 sebesar 65,04 persen dan diasumsikan



sebanyak 53.084 KK dari jumlah KK sebanyak 81.619 KK. Realisasi target tahun 2021 sebesar 55,90 persen atau 45.633 KK dengan tingkat capaian 85,94 persen. Dibandingkan dengan tahun 2020 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Air Bersih mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan target yang sama tahun 2020 sebesar 65,04 namun pencapaian realisasi target hanya sebesar 53.60 persen atau sebanyak 43.750 KK, sehingga dapat disimpulkan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Air Bersih bertambah sebanyak 1.833 KK. Perbandingan data dengan tahun tahun sebelumnya Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.36
PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH

NO	NAMA KECAM ATAN	JUMLAH PENGGU NA AIR BERSIH (KK) TAHUN 2014	JUMLAH PENGGU NA AIR BERSIH (KK) TAHUN 2015	JUMLAH PENGGUN A AIR BERSIH (KK) TAHUN 2016	JUMLAH PENGGU NA AIR BERSIH (KK) TAHUN 2017	JUMLAH PENGGUN A AIR BERSIH (KK) TAHUN 2018	JUMLAH PENGGUNA AIR BERSIH (KK) TAHUN 2019	JUMLAH PENGGU NA AIR BERSIH (KK) TAHUN 2020	JUMLAH PENGGUN A AIR BERSIH (KK) TAHUN 2021
1	Karimun	9.923	9.926	9,931	10,097	10,424	10655	1.065	1.065
2	Meral	3.135	3.140	3,150	3,403	3,673	3.673	3.673	3.673
3	Tebing	2.574	2.574	2,580	2,730	3,230	3.351	3.551	3.551
4	Kundur	4.910	4.915	4,920	5,034	5,288	5.419	78	78
5	Kundur Barat	1.605	1.606	2,041	2,174	2,718	2.718	5.497	5.497
6	Kundur Utara	1.022	1.022	1,025	1,326	1,736	1.736	1.736	2.317
7	Buru	2.115	2.115	2,120	2,340	2,670	2.686	2.896	2.896
8	Moro	3.601	3.620	3,820	3,994	4,168	4.489	4.703	5.002
9	Durai	1.700	1.700	1,704	1,981	2,579	2.579	2.579	3.214
10	Meral Barat	2.537	2.537	2,540	3,064	3,616	3.737	3.839	3.839
11	Ungar	362	362	370	590	832	832	832	1.150
12	Belat	153	153	155	500	993	993	993	993
Total		33.637	33.670	34.356	37.233	41,927	42.954	43.750	45.633

Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah membuat sumur gali, sumur bor, air bersih tenaga surya, dan dengan menjadi pelanggan pada PDAM maupun swasta. Pembangunan penyediaan sarana air bersih ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan



masyarakat akan air bersih, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang ableve tinggi. Air tanah sudah mulai tercemar, khususnya di tempat-tempat yang padat penduduk, sementara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karimun belum dapat diandalkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah merencanakan strategis kebijakan tingkat tinggi, yang dapat menempatkan persoalan air bersih pada prioritas penanganan di daerah. Para anggota DPRD dan LSM juga melakukan langkah-langkah konstruktif, menempuh upaya-upaya politik tertentu agar pimpinan wilayah di daerah lebih serius menangani air bersih. Dukungan seperti ini diharapkan akan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi PDAM untuk dapat melaksanakan percepatan pelayanan air bersih bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan, khususnya daerah rawan air bersih perkotaan dan perdesaan. Terlayannya air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai diukur melalui proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik. Indikator kedua dari sasaran ini proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik, yang diukur melalui Perbandingan Panjang Jaringan Jalan Beraspal dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Jaringan Jalan Beraspal di Kabupaten Karimun dikali 100%. Tahun 2021 target yang ditentukan sebesar 32,58% atau dengan asumsi proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik sebesar 288,47 Km dari total panjang jalan beraspal di Kabupaten Karimun yang tercatat sepanjang 885,342 Km.

Hal ini dikarenakan tingginya target yang ditetapkan dan adanya Bencana Non Alam wabah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona atau COVID-19 secara global terjadi diseluruh dunia sehingga harus melakukan Refocusing anggaran atau penyesuaian/rasionalisasi



anggaran dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan wabah COVID-19, menyebabkan beberapa kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah yang bersumber dari APBN melalui Tranfer Keuangan ke Daerah (TKKD) terpaksa harus dirasionalisasi atau dibatalkan.

Berikut proporsi panjang jalan beraspal berdasarkan kondisi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37
PROPORSI PANJANG JALAN BERASPAL BERDASARKAN KONDISI
DI KABUPATEN KARIMUN

NO	PENYELENGGAR AN JALAN	PANJANG JALAN BERASPAL (M)	KONDISI JALAN							
			BAIK	%	SEDAN G	%	RUSAK RINGAN	%	RUSAK BERAT	%
1	JALAN NASIONAL	26,25	26,25	100,00	-	-	-	-	-	-
2	JALAN PROVINSI	143.72	133,52	92,90	5,2	3,62	3	2,09	2	1,39
3	JALAN KABUPATEN	885.342	288,472	32,58	415,828	46,97	133,127	15,04	47,915	5,41
TOTAL PANJANG JALAN DI KAB. KARIMUN		1055,312	448,2420	42,47	421,028	39,90	136,127	12,90	49,9150	4,73

Pemerintah Kabupaten Karimun tetap bertekad dan lebih gigih dalam mengambil langkah strategis untuk membangun, meningkatkan serta memelihara infrastruktur jalan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat untuk mendukung keterhubungan antar kawasan, membangun desa dalam rangka merajut simpul wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Karimun.

Untuk dapat mendukung perekonomian dalam mengarahkan strukturisasi pusat-pusat kegiatan serta mampu mengatasi persoalan tingginya harga kebutuhan ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan sangat mutlak diperlukan sebagai prasarana dalam pemasokan bahan, distribusi dan pemasaran hasil-hasil pertanian dan perkebunan, industri maupun usaha dibidang jasa. Untuk itu, harus ada akses dengan kapasitas yang mampu melayani akses ke permukiman, akses ke



pelabuhan laut, akses ke bandara, akses ke kawasan industri serta akses ke kawasan-kawasan wisata.

Sampai dengan tahun 2021 terdapat tantangan berupa menurunnya kualitas pelayanan jalan kabupaten, provinsi dan nasional di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan.

Berbagai tantangan lain yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten meliputi :

1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih.
2. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat produksi ke pemasaran, termasuk masih banyaknya daerah yang terisolasi.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat.
4. Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan dan pengembangan wilayah (termasuk daerah terisolasi, daerah perbatasan, pulau-pulau kecil) dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Adapun upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Tabel 3.38
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN			
		ANGGARAN	REALISASI	SILPA	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.554.992.320,00	2.093.833.978,00	461.158.342,00	81,95
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	27.992.583.043,00	25.820.024.446,00	2.172.558.597,00	92,24



1	2	3	4	5	5
III	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.207.682.220,00	844.775.500,00	4.362.906.720,00	16,22
IV	Program Pengembangan Permukiman	1.322.878.334,00	642.780.542,00	680.097.792,00	48,59
V	Program Penataan Bangunan Gedung	11.441.774.295,00	991.171.230,00	10.450.603.065,00	8,66
VI	Program Penyelenggaraan Jalan	61.126.530.476,00	11.456.351.715,00	49.670.178.761,00	18,74
VII	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	67.225.000,00	67.144.500,00	80.500,00	99,88
VIII	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.042.877.000,00	2.027.963.200,00	14.913.800,00	99,27
JUMLAH		111.756.542.688,00	43.944.045.111,00	67.812.497.577,00	39,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada program dan kegiatan diatas masih atau tergolong cukup rendah dari pagu anggaran yang ada. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan Dana Transfer Keuangan Ke Daerah (Dana TKKD) baik dari pusat maupun provinsi dan Pencapaian Pendapatan yang tidak sesuai dengan target, sehingga ada beberapa program dan kegiatan harus dilakukan tunda bayar ke tahun berikutnya. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya anggaran.

Saat ini jaringan komunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar dalam dimensi kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka memperluas jaringan telekomunikasi hingga seluruh wilayah berpenduduk yang ada di Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Karimun bertekad meningkatkan wilayah terlayani jaringan komunikasi yang merupakan indikator yang mendukung sasaran ini.

Target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 95 % dengan asumsi sebanyak 67 wilayah terlayani jaringan komunikasi dari 71 wilayah yang ada. Realisasi target yang dicapai sebesar 93% atau sebanyak 66 wilayah terlayani jaringan komunikasi dengan capaian sebesar 97,89%. Realisasi



ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan/penambahan dari jaringan telekomunikasi.

Hal ini dikarenakan adanya kendala yang di hadapi operator/provider telekomunikasi sehingga masih ada desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis Desa/Kelurahan yang sulit dijangkau oleh operator/provider telekomunikasi
2. Jumlah Penduduk di Desa/Kelurahan yang masih sedikit
3. Infstruktur Kurang Memadai (Listrik)

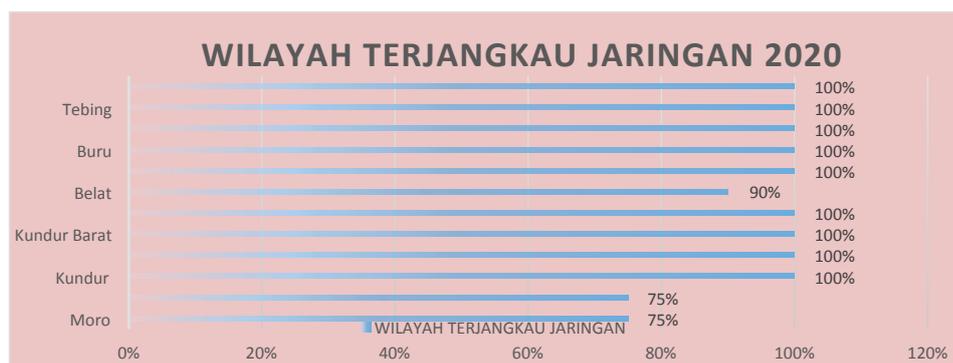
Untuk mengantisipasi kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun akan memfasilitasi masyarakat dengan meningkatkan kerjasama bersama penyedia jasa atau operator telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan sarana telekomunikasi seperti membangun BTS.

Tabel 3.39
INDIKATOR KINERJA, TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN
TAHUN 2020 DAN 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Wilayah Terlayani Jaringan Komunikasi	%	90	93	103.4	95	93	97,89

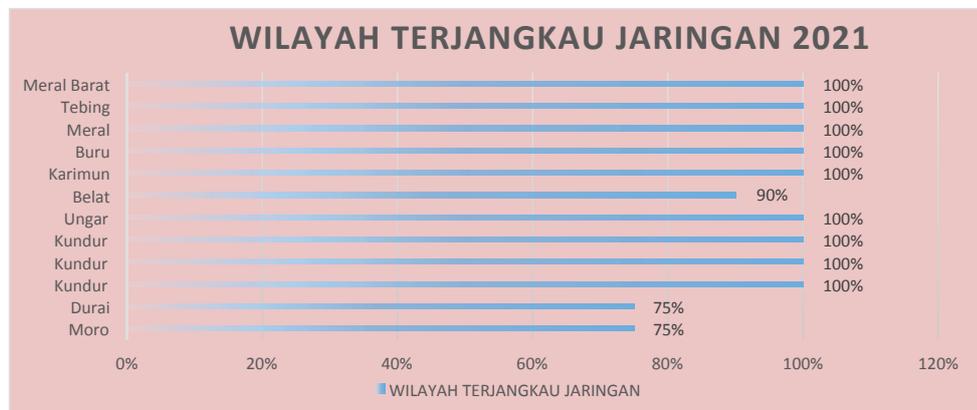
Adapun persentase wilayah Kabupaten Karimun yang terjangkau jaringan telekomunikasi tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 3.4
PERSENTASE WILAYAH KABUPATEN KARIMUN YANG TERJANGKAU
JARINGAN TELEKOMUNIKASI TAHUN 2020 DAN 2021





Grafik 3.5
PERSENTASE WILAYAH KABUPATEN KARIMUN YANG TERJANGKAU
JARINGAN TELEKOMUNIKASI TAHUN 2020



Kabupaten Karimun yang terdiri dari 12 Kecamatan yang terdiri dari 71 Kelurahan dan Desa, pada umumnya sudah terlayani jaringan telekomunikasi namun ada beberapa desa yang masih terjadi blank signal. Berikut data desa di Kabupaten Karimun yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi tahun 2020-2021 yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40
DATA DESA YANG BELUM TERJANGKAU JARINGAN TELEKOMUNIKASI
TAHUN 2020-2021

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG BELUM TERLAYANI JARINGAN KOMUNIKASI		KEBUTUHAN SARANA TELEKOMUNIKASI
		2020	2021	
1.	Moro	1. Desa Buluh patah 2. Desa Selat Me 3. Dusun Keridik	1. Desa Buluh patah 2. Desa Selat Me 3. Dusun Keridik	BTS
2.	Durai	1. Desa Sanglar	1. Desa Sanglar	BTS
3.	Belat	1. Desa Tebias	1. Desa Tebias	BTS

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Bagian Komunikasi dan Humas mendapat bantuan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bantuan ini merupakan relokasi titik Berupa antenna



Vsat akses internet dengan jangkauan 100 meter dari perangkat. Adapaun lokasi – lokasi internetnya adalah desa – desa yang mendapar relokasi titik internet tersebut antara lain :

Tabel 3.41
DATA RELOKASI TITIK INTERNET

No	Lokasi Semula	Lokasi Baru	Alasan Pemindahan
1	Cabjari Moro	Kantor Desa Prayon Kec. Kundur Utara	Hasil Survey Penyedia Di Cabjari Moro Telah Tersedia Fasilitas Internet Sehingga Direlokasi Ke Kantor Desa Prayon Kec. Kundur Utara
2	Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun (Double Existing)	Air Panas Tanjung Utan Buru	Hasil Survey Penyedia Di Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun (Double Existing) Telah Tersedia Fasilitas Internet Sehingga Direlokasi Ke Air Panas Tanjung Utan Buru
3	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun (Double Existing)	Sungai Asam Kec. Belat	Hasil Survey Penyedia Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun (Double Existing) Telah Tersedia Fasilitas Internet Sehingga Direlokasi Ke Sungai Asam Kec. Belat
4	MTSN Karimun Kab.Karimun	Desa Lubuk Kec. Kundur	Hasil Survey Penyedia Di MTSN Karimun Kab.Karimun Telah Tersedia Fasilitas Internet Sehingga Direlokasi Ke Desa Lubuk Kec. Kundur

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pada tahun 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui BAKTI mempunyai program penyediaan infrastruktur dalam bentuk teknologi informasi digital yang merupakan proyek prioritas strategis (major project).

Dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memperluas keterjangkauan jaringan telekomunikasi, lokasi yang diusulkan untuk bantuan ini yaitu Desa Selat Mie.

Adapun bantuan tersebut berbentuk Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet, Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Selat Mie, dengan lahan yang di perlukan sebesar 20 x 20 yang sudah disediakan oleh Camat Moro. Lahan tersebut merupakan tanah hibah masyarakat Dusun Setonggeng Desa Selat Mie Kecamatan Moro.



6 SASARAN MENURUNNYA PENDUDUK MISKIN

Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan yang dipakai sebagai ukuran, dibangun dari pengeluaran rumah tangga atau individu, komponen makanan dan non makanan, yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurunnya penduduk miskin merupakan strategi yang harus dilakukan untuk tercapainya sasaran keenam yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

TABEL 3.42
EVALUASI PENCAPAIAN

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase penduduk miskin	6.50 %	6.85 %	94.62 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				94.62 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa capaian sasaran mencapai 94,62 % atau bermakna baik sekali dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun pada umumnya, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Indikator yang mendukung sasaran ini adalah **Persentase Penduduk Miskin**. Adapun target yang ditetapkan sebesar 6,50 persen. Secara makro persentase penduduk miskin Kabupaten Karimun pada Tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,02 persen , dimana Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Karimun sebesar 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin 16.280 jiwa dan garis kemiskinan berada pada Rp. 411.052 per kapita, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 6,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.990 jiwa dan garis kemiskinan berada pada Rp. 422.961 per kapita.

Pencapaian Tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dimana kondisi ini terjadi dikarenakan masih dalam pandemi



Covid-19 dan adanya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Adapun tiga komoditas makanan terbesar yang memberikan sumbangan terhadap meningkatnya kemiskinan yakni beras, rokok kretek filter, serta daging ayam ras.

Berikut disampaikan perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah :

Tabel 3.43
PERBANDINGAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2021
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

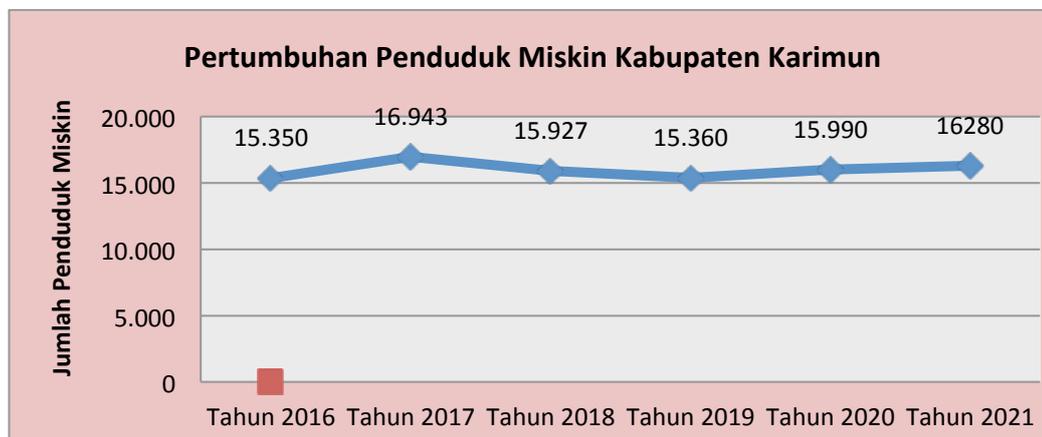
Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Kinerja					Target Akhir Jangka Menengah	Capaian
		2017	2018	2019	2020	2021		
Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	7,41%	6,90%	6,61%	6,83%	6,85%	6,55 %	95,42%

Jika melihat perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021, maka realisasi kinerja belum mencapai target jangka menengah. Hal ini dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 membuat persentase penduduk miskin di Kabupaten Berdasarkan data dari BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karimun selama enam tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, dimana pada Tahun 2019 merupakan angka kemiskinan terendah. Namun, akibat Karimun Tahun 2021 mengalami peningkatan. Secara rinci persentase penduduk miskin di Kabupaten Karimun dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.6
GRAFIK PERTUMBUHAN PENDUDUK MISKIN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 - 2021



Sumber : BPS Kab. Karimun

Grafik 3.7
GRAFIK PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 - 2021



Sumber : BPS Kab. Karimun

Kenaikan persentase penduduk miskin Kabupaten Karimun merupakan yang terendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan se Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan kelima diatas Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Lingga. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 3.8
GRAFIK ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021



Sumber : BPS Kab. Karimun

Secara mikro, penduduk miskin di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 145/HUK/2021

No	Kecamatan	Jumlah jiwa
1.	Moro	11.137
2.	Durai	4.593
3.	Tebing	7.907
4.	Meral	10.867
5.	Meral Barat	6.953
6.	Karimun	11.690
7.	Buru	9.203
8.	Kundur Utara	4.105
9.	Belat	5.468
10	Kundur	10.284
11.	Ungar	2.445
12.	Kundur Barat	10.052
JUMLAH		94.704

Sumber data: PUSDATIN Kemensos RI

Adapun upaya-upaya yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui Jaringan Pengaman Sosial adalah program-program yang langsung ke masyarakat. Program – program ini memberikan andil pada perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun.



Terutama penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran. Adapun beberapa program perlindungan sosial dalam menekan angka kemiskinan adalah sebagai berikut :

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Tabel 3.45
DATA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KAB. KARIMUN
TAHUN 2016 – 2021

No.	Kecamatan	Jumlah KPM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kundur	83	261	565	546	515	593
2	Kundur Utara	94	331	292	270	247	263
3	Meral	87	274	411	395	370	404
4	Buru	92	284	613	545	491	549
5	Moro	98	216	709	657	616	754
6	Kundur Barat	198	403	693	659	628	732
7	Belat	74	162	298	276	249	332
8	Karimun	99	361	448	421	395	430
9	Meral Barat	135	197	451	416	396	436
10	Tebing	97	189	281	264	247	301
11	Durai	111	211	325	317	303	334
12	Ungar	-	128	137	136	118	125
J U M L A H		1.168	3.017	5.223	4.904	4.575	5.253

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karimun, Tahun 2021

2) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako.

Program BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat



(KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan *e-voucher* tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di *e-waroeng*.

Program Sembako adalah pengembangan dari program BPNT. Nilai dari Program Sembako sebesar Rp150.000,- per bulan. Kriteria pangan yang diperoleh adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat. Jenis bahan pangan dalam program sembako yaitu sumber karbohidrat, seperti beras (dapat diganti jagung/sagu/ubi) dan sumber protein, seperti telur, daging/ayam/ikan, kacang-kacangan (misal tempe tahu). Komoditas bahan pangan sembako mengakomodir ketersediaan pangan lokal. KPM diberikan kebebasan untuk memilih bahan pangan tersebut.

Tabel 3.46
DATA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 – 2021

No.	Kecamatan	Jumlah KPM					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moro	1.401	1.026	1.056	1.051	1.006	874
2	Durai	482	503	504	504	487	406
3	Tebing	445	407	406	404	394	348
4	Meral	680	634	618	610	599	481
5	Meral Barat	641	623	603	602	590	591
6	Karimun	569	666	650	650	628	596
7	Buru	1.016	946	930	929	912	802
8	Kundur Utara	336	421	412	404	378	330
9	Belat	591	573	525	542	505	437
10	Kundur	1.096	854	873	887	853	747
11	Ungar	216	206	201	201	202	153
12	Kundur Barat	1.106	991	1.072	1.066	1027	873
J U M L A H		8.579	7.850	7.850	7.850	7.581	6.638

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karimun, Tahun 2021



3) Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Tabel 3.47
DATA PENERIMA MANFAAT PBI - JK
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima Manfaat		
		2019 (SK/134/HUK/2019)	2020 (SK/154/HUK/2020)	2021 (SK/146/HUK/2021)
1	Moro	8.751	9.147	8.015
2	Durai	3.204	3.137	2.685
3	Tebing	3.126	3.357	3.230
4	Meral	6.736	6.688	5.069
5	Meral Barat	295	380	2.880
6	Karimun	5.242	6.195	5.765
7	Buru	6.264	6.334	5.669
8	Kundur Utara	5.091	5.195	2.502
9	Belat	939	1.118	3.249
10	Kundur	7.565	7.515	6.111
11	Ungar	178	225	1.091
12	Kundur Barat	6.966	7.130	6.565
J U M L A H		54.357	56.421	52.831

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karimun, Tahun 2021

4) Program pemulihan ekonomi di pandemi covid-19 berupa Bantuan Pangan Non Tunai Program Sembako PPKM merupakan bantuan sosial yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada KPM Program Sembako.

Tabel 3.48
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PROGRAM SEMBAKO PPKM TAHUN 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima
1	2	3
1	Moro	1.103
2	Durai	272
3	Tebing	1.002
4	Meral	1.478
5	Meral Barat	698
6	Karimun	1.340



1	2	3
7	Buru	856
8	Kundur Utara	366
9	Belat	352
10	Kundur	1.095
11	Ungar	211
12	Kundur Barat	1.203
J U M L A H		9.976

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karimun, Tahun 2021

Pada tabel diatas bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- per bulan selama enam bulan yang dapat ditarik tunai dengan menggunakan kartu Sembako Kabupaten Karimun mendapatkan alokasi sebanyak 9.976 KK di 12 Kecamatan.

Pencapaian Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan Sumber Daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarsana dan prasarana serta anggaran. Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan melibatkan pilar-pilar sosial Pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan mitra kerja dalam fasilitasi pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga pelaksanaan bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

7. SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN

Derajat Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat menggambarkan derajat kesehatan tersebut digunakan tiga indikator sasaran utama yaitu angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) dan prevalensi terhadap penyakit HIV/AIDS. Indikator sasaran ini merupakan dukungan misi ke 4 (empat) Kabupaten Karimun yaitu “Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah”.



Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 49
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 7

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan (per 100.000 KH)	79,85		
	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan (per 100.000 KH)	135 (**)	144,68 (**)	92,8
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	14,30	14,47	98,8
3	Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS	0,22 %		
	Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS	0,09 (**)	0,07 (**)	122,2
Rata - Rata Tingkat Capaian				104,6 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karimun, Tahun 2021

Catatan:

- ✓ Ketiga indikator di atas mempunyai karakteristik komponen realisasi yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja.
- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian sasaran sebesar **104,6%** yang bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Dari tiga indikator diatas hanya indikator Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS yang capaiannya diangka 100% atau lebih. Selengkapnya nilai capaian sasaran indikator pada sasaran tujuh sesuai hasil pengukuran kinerja diuraikan sebagai berikut:



A. Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan (nifas) per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. AKI merupakan salah satu Indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah karena indikator ini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan penduduk

Target indikator di Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2021 untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 79,85 per 100.000 kelahiran hidup. Target ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 138,4 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga untuk indikator Angka Kematian Ibu digunakan target kinerja perangkat daerah yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan yaitu sebesar 135 per 100.000 kelahiran hidup.

Target AKI tahun 2021 sebesar 135 per 100.000 kelahiran hidup, diasumsikan dari jumlah kasus kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan (nifas) sebesar 4 orang/kasus dibagi jumlah bayi lahir hidup sebanyak 3.456 dikali 100.000.

Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2021 diperoleh dari jumlah kasus kematian ibu tahun 2021 di Kabupaten Karimun sebanyak 5 orang/kasus dibagi dengan jumlah bayi yang lahir hidup sebanyak 3.456 orang dikalikan 100.000 sehingga realisasi AKI sebesar 144,68 per 100.000 kelahiran hidup dengan pencapaiannya 92,8 %. Angka tersebut bermakna bahwa AKI berada diatas jumlah target (135 per 100.000 kelahiran hidup) dengan kategori tidak tercapai. Angka kematian ibu per Kecamatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.50
ANGKA KEMATIAN IBU PER KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JLH BAYI LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU				AKI
			HAMIL	BERSALIN	NIFAS	JUMLAH	
1	Moro	238	-	-	-	0	0,0
2	Durai	81	-	-	-	0	0,0
3	Kundur	415	-	-	1	1	240,96
4	Kundur Utara	144	-	-	-	0	0,0
5	Kundur Barat	274	-	-	-	0	0,0
6	Karimun	653	-	-	-	0	0,0
7	Buru	141	-	-	-	0	0,0
8	Meral	716	-	-	1	1	139,66
9	Tebing	384	-	-	1	1	260,42
10	Meral Barat	266	-	-	1	1	375,94
11	Belat	93	-	-	-	0	0,0
12	Ungar	51	-	-	1	1	1.960,78
JUMLAH		3.456	-	-	5	5	144,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karimun, Tahun 2021

Dari tabel 3.50 diketahui AKI terbesar tahun 2021 berada di Kecamatan Ungar yaitu sebesar 1.960,78 disusul Kecamatan Meral Barat dan Tebing dengan nilai sebesar 375,94 dan 260,42. Namun Angka Kematian Ibu per Kecamatan diatas tidak bisa dikonversikan karena jumlah bayi lahir hidup per kecamatan tidak mencapai angka 100.000.

AKI Kabupaten Karimun sepanjang lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif yang mana angka terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 12 kasus kematian. Sedangkan AKI terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3 kematian kemudian diikuti tahun 2018 yaitu 4 kematian. Jika dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu di tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 4,3%. Secara rinci perkembangan data angka kematian ibu dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
PERKEMBANGAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MELAHIRKAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 – 2021



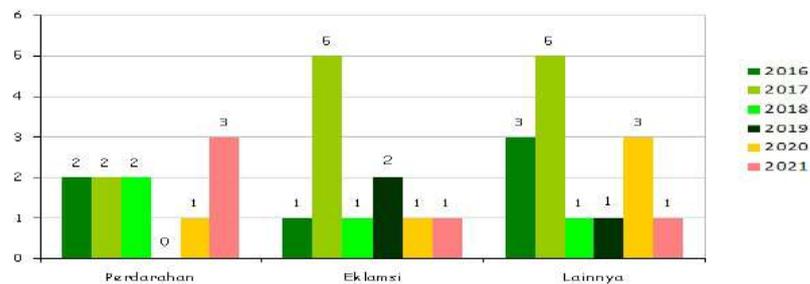
Dibandingkan dengan target Nasional (RPJMN 2020-2024) yang mana target AKI pada RPJMN s/d tahun 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup maka capaian AKI Kabupaten Karimun tahun 2021 berada dibawah target RPJMN yang bermakna telah mencapai target nasional. Dan jika dibandingkan terhadap target RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021 sebesar 300 per 100.000 kelahiran hidup, maka capaian tersebut juga telah mencapai target yang ditetapkan.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Karimun tahun 2021 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Untuk lebih jelasnya berikut uraiannya:

1. Penyebab Langsung, yaitu penyebab kematian sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan atau masa nifas dan segala intervensi/penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Penyebab langsung kematian ibu di Kabupaten Karimun tersebut sebanyak 4 (empat) kasus yaitu akibat eklamsi dan perdarahan.
2. Penyebab Tidak Langsung, yaitu merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan. Penyebab tidak langsung kematian

ibu tersebut sebanyak 1 (satu) kasus yaitu akibat penyebab lainnya (Covid-19).

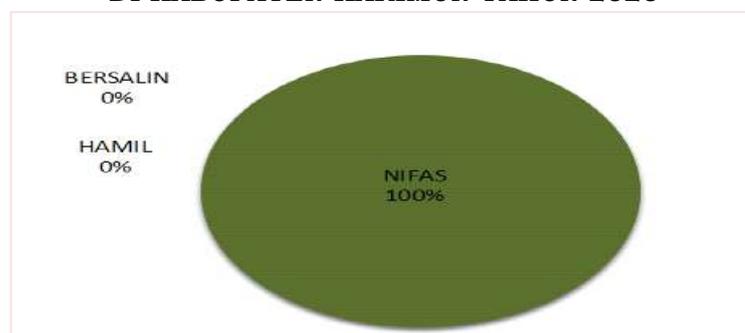
Grafik 3.10
PENYEBAB KEMATIAN IBU MELAHIRKAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 – 2021



Dari grafik ini terlihat bahwa penyakit penyebab terbesar kematian ibu selama tahun 2016-2021 bervariasi di setiap tahun. Di tahun 2021 perdarahan merupakan penyumbang kematian ibu tertinggi yaitu sebanyak tiga kasus.

Berdasarkan masa atau periode kematian ibu melahirkan di Kabupaten Karimun tahun 2021, kematian ibu semuanya tersebar pada periode nifas. Secara rinci distribusi masa atau periode kematian tersebut seperti terlihat pada diagram berikut:

Grafik 3.11
DISTRIBUSI MASA/PERIODE KEMATIAN IBU MELAHIRKAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020



Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2021 (144,68 per 100.000 KH) lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya (138,4 per 100.000 KH), hal ini diantaranya disebabkan oleh:



1. Jumlah kematian ibu secara absolut sebenarnya sama dengan tahun lalu yaitu 5 kasus, tapi karena kelahiran hidup tahun 2021 lebih kecil dari kelahiran hidup tahun lalu, sehingga apabila jumlah kematiannya di konversikan ke kelahiran hidup, maka akan terjadi peningkatan angka kematiannya
2. Kurang pedulinya masyarakat tentang faktor risiko dan tanda bahaya kehamilan sehingga merasa tidak perlu mendapatkan pelayanan antenatal dan pemantauan kehamilan yang adekuat
3. Terjadinya pandemic covid-19 merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian ibu di Kabupaten Karimun

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dilakukan beberapa upaya yaitu:

1. Setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan
2. Setiap komplikasi obstetric dan neonatal mendapat pertolongan yang adekuat
3. Setiap perempuan usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pasca keguguran.
4. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang melibatkan peran serta lintas sektor
5. Penjaringan dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi
6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) yaitu pembahasan kasus kematian oleh Tim AMP untuk mengetahui penyebab kasus kematian dan akan mengeluarkan rekomendasi upaya pencegahan kematian di masa yang akan datang baik kepada fasilitas kesehatan maupun ke masyarakat
7. Pelacakan kasus kematian ibu untuk mengetahui penyebab kematian dan petugas akan memberikan KIE kepada keluarga tentang perawatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mencegah kematian dan pengenalan tanda-tanda bahaya agar segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan

8. Pembinaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas baik dari segi pencatatan pelaporan maupun standar pelayanan yang berkualitas
9. Menyediakan fasilitas pelayanan ANC dan persalinan sesuai standar.

Kegiatan tahun 2021 yang mendukung menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Dinas Kesehatan adalah sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp.967.359.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.702.237.944 atau 72.59% yang bermakna terjadi efisiensi anggaran sebesar 27.41%.

Gambar 3.1
KEGIATAN DALAM RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



B. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB merupakan indikator kedua yang dianggap berhubungan erat mendukung keberhasilan sasaran ketujuh dalam rangka



meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat serta untuk mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Karimun. Selain itu AKB juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat serta menjadi tolak ukur atas meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, karena dengan meningkatnya kesadaran dan peran serta aktif masyarakat untuk merawat dan mengasuh bayi/ balitanya dengan baik serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan posyandu merupakan modal utama meningkatnya derajat kesehatan bayi dan anak balita.

Target AKB tahun 2021 sebesar **14,30 per 1.000 kelahiran hidup**. Angka tersebut diasumsikan dari jumlah kasus kematian bayi dibawah satu tahun sebesar **49 kasus dibagi jumlah kelahiran hidup sebesar 3.456 dikali 1.000**

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Karimun pada tahun 2021 diperoleh dari **50 kasus kematian bayi dibagi 3.456 jumlah kelahiran hidup dikali 1.000** sehingga **Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 14,47 per 1.000 kelahiran hidup** dengan pencapaian 98,8%. Indikator ini merupakan indikator yang mempunyai karakteristik komponen negatif yang artinya semakin kecil realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Angka capaian AKB berada diatas target kinerja tahun 2021 yang ditetapkan (14,30 per 1.000 kelahiran hidup) yang bermakna target tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan pencapaian AKB tahun 2020 (sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup) kondisi ini menunjukkan peningkatan AKB sebesar 1,3 per 1.000 Kelahiran Hidup atau 10%.



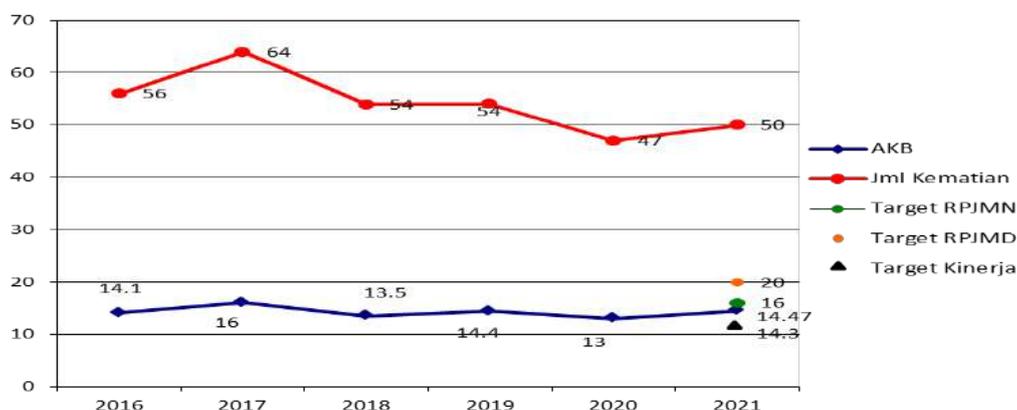
Tabel 3.51
ANGKA KEMATIAN BAYI PER KECAMATAN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JLH BAYI LAHIR HIDUP	JLH KEMATIAN BAYI	AKI (%)
1	Moro	238	4	16,8
2	Durai	81	2	24,69
3	Kundur	415	9	21,69
4	Kundur Utara	144	3	20,83
5	Kundur Barat	274	0	0
6	Karimun	653	7	10,72
7	Buru	141	2	14,18
8	Meral	716	8	11,17
9	Tebing	384	6	15,63
10	Meral Barat	266	5	18,8
11	Belat	93	1	10,75
12	Ungar	51	3	58,82
JUMLAH		3456	50	14,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui AKB terbesar tahun 2021 berada di Kecamatan Ungar yaitu sebesar 58.82 disusul Kecamatan Durai dan Kundur dengan nilai sebesar 24,69 dan 21,69. Namun Angka Kematian Bayi per Kecamatan diatas tidak bisa dikonversikan karena jumlah bayi lahir hidup per kecamatan tidak mencapai angka 1000.

Grafik 3.12
PERKEMBANGAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016-2021



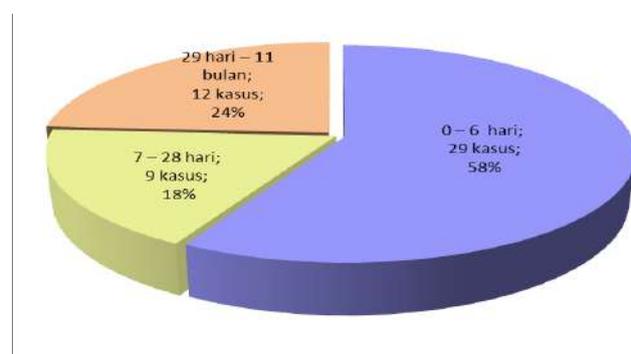
Dibandingkan dengan target AKB nasional (RPJMN tahun 2020-2024) sebesar 16 per 1.000 KH dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 14,3

per 1.000 kelahiran hidup, maka realisasi AKB tahun 2021 telah mencapai target nasional, sedangkan terhadap target RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021 sebesar 20 per 1.000 KH maka realisasi realisasi AKB tahun 2021 juga telah memenuhi target RPJMD yang ditetapkan.

Bila dilihat tren kasus AKB selama lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Karimun menunjukkan angka yang fluktuatif yang mana AKB tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2020 merupakan angka kasus AKB terendah.

Kematian bayi berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Karimun tahun 2021 (50 kasus) dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.13
DISTRIBUSI KEMATIAN BAYI MENURUT KELOMPOK UMUR
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



Dari grafik terlihat bahwa kematian bayi terbanyak terdapat pada kelompok Neonatal usia 0-6 hari sebanyak 29 kasus (58%), disusul pada urutan kedua kelompok post neonatal usia 29 hari - 11 bulan sebanyak 12 kasus (24%) dan kelompok Neonatal usia 7-28 hari sebanyak 9 kasus (18%).

Kematian bayi berdasarkan faktor penyebab kematian tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Tabel 3.52
DISTRIBUSI JUMLAH KASUS KEMATIAN BAYI (AKB) BERDASARKAN
FAKTOR PENYEBAB KEMATIAN TAHUN 2021

No	Penyebab Kematian	Jumlah
1.	Asfiksia	16
2.	BBLR	18
3.	Diare	3
4.	Pneumoni	3
5.	Kelainan Saluran Cerna	1
6.	Sepsis	2
7.	Aspirasi	3
8.	Ikterus	1
9.	Kelainan Jantung Bawaan	3
TOTAL		50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab kematian bayi terbesar yaitu sebanyak 18 kasus (36%) disusul penyakit asfiksia sebanyak 16 kasus (32%), diare, pneumoni, aspirasi dan kelainan jantung bawaan masing-masing sebanyak 3 kasus (6%), sepsis sebanyak 2 kasus (4%), dan disusul kelainan saluran cerna, ikterus masing-masing sebanyak 1 kasus (2%).

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2021 (14,47 per 1.000 KH) lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya (13 per 1.000 KH) atau meningkat 11,3% hal ini diantaranya disebabkan oleh:

- Tingginya jumlah komplikasi obstetric/ penyulit kehamilan seperti preeklamsi sehingga persalinan dilakukan sebelum waktunya (dipercepat). Kelahiran yang tidak cukup usia kehamilan mengakibatkan organ-organ bayi belum terbentuk dan berfungsi sempurna sehingga berbanding pada harapan hidupnya.

Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi dilakukan beberapa upaya yaitu:

- Pelacakan kasus kematian bayi untuk mengetahui penyebab kematian dan petugas akan memberikan KIE kepada keluarga tentang perawatan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru



- lahir untuk mencegah kematian dan pengenalan tanda-tanda bahaya agar segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan
2. Audit Maternal Perinatal (AMP) adalah pembahasan kasus kematian oleh Tim AMP untuk mengetahui penyebab kasus kematian dan akan mengeluarkan rekomendasi upaya pencegahan kematian di masa yang akan datang baik kepada fasilitas kesehatan maupun ke masyarakat
 3. Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan program bantuan pembiayaan persalinan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari keluarga tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan agar dapat melahirkan di fasilitas kesehatan yang kompeten
 4. Pembinaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas baik dari segi pencatatan pelaporan maupun standar pelayanan yang berkualitas

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di tahun 2021 untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karimun diantaranya sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp.997.514.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.727.308.244 atau 72,9% yang bermakna terjadi efisiensi anggaran sebesar 27,1%.

C. Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS

Perkembangan prevalensi penyakit HIV/AIDS menjadi indikator ketiga sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui menurunnya derajat infeksi dan penyakit menular di masyarakat Kabupaten Karimun.

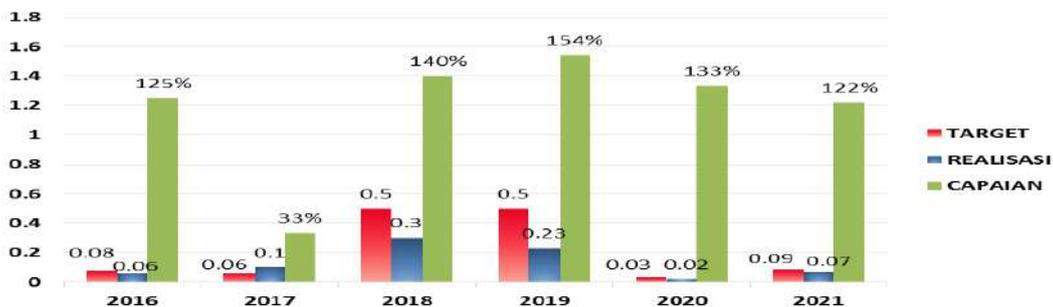


Target indikator di Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2021 untuk indikator Prevalensi penyakit HIV/AIDS sebesar 0.22%. Target ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 0.07% . Sehingga agar tidak terjadi kesenjangan capaian yang signifikan maka target kinerja untuk indikator ini disesuaikan dengan realisasi kinerja sehingga target Prevalensi penyakit HIV/AIDS tahun 2021 menjadi 0.09%

Berdasarkan target yang ditetapkan prevalensi penyakit HIV/AIDS tahun 2021 sebesar $0,09\%$. Target sebesar $0,09$ diasumsikan dari 4 kasus jumlah Bumil HIV Positif dibagi terhadap jumlah Bumil yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 4.205 dikalikan 100.

Capaian prevalensi penyakit HIV/AIDS tahun 2021 sebesar $0,07\%$, prevalensi penderita HIV/AIDS sebesar $0,07\%$ diperoleh dari pembagian jumlah kasus baru pada kelompok ibu hamil yaitu 3 kasus dibagi 4.205 ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan/test HIV/AIDS dalam kurun waktu tahun 2021 di wilayah Kabupaten Karimun dikali 100. Jika disandingkan dengan target kinerja ($0,09\%$) maka dihasilkan capaian sebesar $128,5\%$.

Grafik 3.14
PREVALENSI PENYAKIT HIV/AIDS
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016-2021



Catatan: Angka prevalensi di atas mempunyai karakteristik semakin kecil angka prevalensi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja.

Dari grafik 3.14 terlihat selama kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 angka realisasi prevalensi HIV/AIDS mengalami fluktuatif. Realisasi



terendah terjadi pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 0,02% dan realiasi tertinggi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 0,3%.

Tabel 3.53
DISTRIBUSI PENEMUAN KASUS BARU HIV/AIDS PADA IBU HAMIL
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	UNIT LAYANAN (Klinik)	IBU HAMIL		
		PERIKSA HIV/AIDS	POSITIF (+) HIV/AIDS	ANGKA PREVALENSI (%)
1	RSUD M.Sani	1564	0	0
2	Puskesmas Tg.Balai	730	2	0,27
3	Puskesmas Meral	153	0	0
4	Puskesmas Tebing	447	0	0
5	Puskesmas Tg.Batu	287	0	0
6	Puskesmas Kundur Utara	105	0	0
7	Puskesmas Moro	168	1	0,59
8	Puskesmas Meral Barat	247	0	0
9	Puskesmas Buru	82	0	0
10	Puskesmas Kundur Barat	285	0	0
11	Puskesmas Ungar	0	0	0
12	Puskesmas Belat	0	0	0
13	Puskesmas Durai	80	0	0
14	Puskesmas Niur Permai	57	0	0
15	RSBT	0	0	0
JUMLAH		4205	3	0,07

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karimun, Tahun 2021

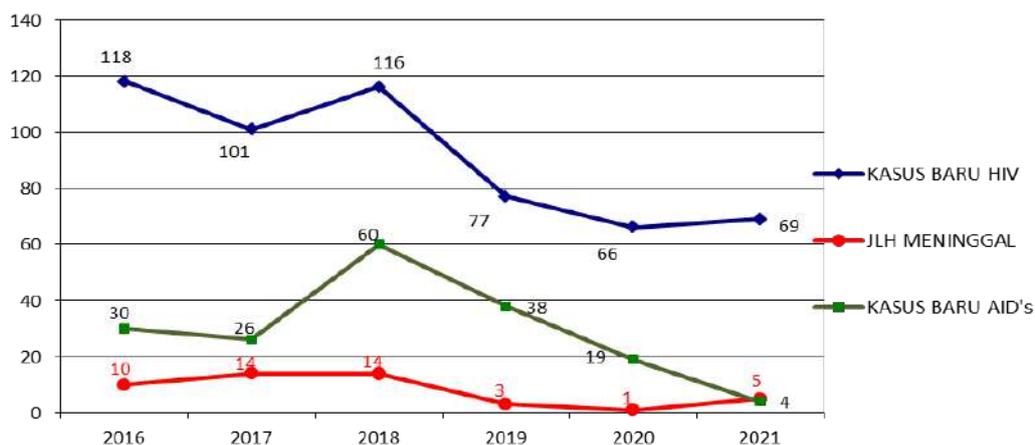
Dari tabel diatas diketahui bahwa ibu hamil yang diperiksa HIV/ AID's dan yang terkonfirmasi positif HIV/ AID's ditemukan di unit layanan (klinik) Moro yaitu sebanyak 1 orang dengan angka prevalensi sebesar 0,59% dan unit layanan (klinik) Tg. Balai yaitu sebanyak 2 orang dengan angka prevalensi sebesar 0,27% .

Perkembangan jumlah kasus HIV/ AID's tahun 2016-2021 mengalami fluktuatif. Dibandingkan tahun 2020, kasus baru HIV tahun



2021 mengalami peningkatan sebesar 4,5%. Kasus baru AID's ditahun 2021 menurun 78,9% jika dibanding tahun 2020. Sementara jumlah kematian mengalami peningkatan sebanyak 4 orang dibanding tahun sebelumnya. Secara rinci perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS, selama 6 tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

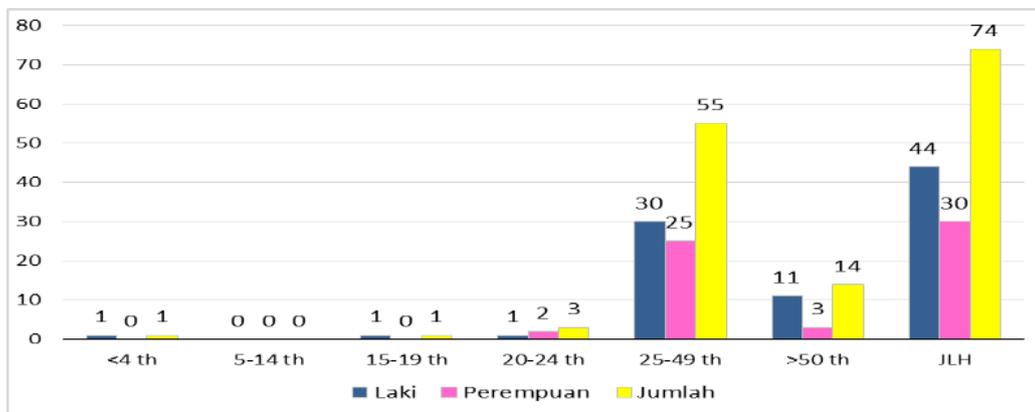
Grafik 3.15
PERKEMBANGAN JUMLAH KASUS HIV / AIDS
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 – 2020



Berdasarkan responsif kelompok umur penderita HIV secara umum tahun 2021 disimpulkan bahwa kelompok umur 25–49 tahun merupakan kelompok umur terbanyak penderita kasus baru HIV yaitu sebanyak 55 kasus (74,3%) dan kelompok umur penderita HIV terkecil adalah umur 5–14 yaitu sebanyak 0 kasus (0%).

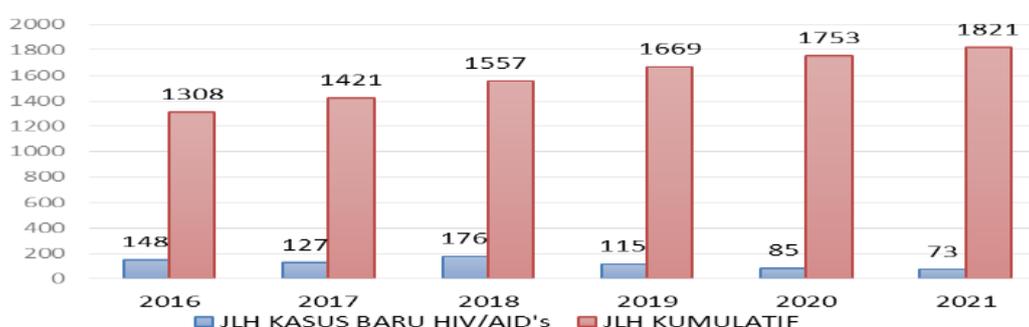
Sementara berdasarkan responsif gender diketahui bahwa jumlah penderita kasus baru HIV selama tahun 2021 terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44 jiwa (62,3 %) dibanding jenis kelamin perempuan sebanyak 30 jiwa (37,7%). Lebih jelasnya tentang responsif penderita baru HIV menurut kelompok umur dan gender dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.16
DISTRIBUSI JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



Dari realisasi 6 tahun terakhir hingga tahun 2021 tergambar bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS setiap tahunnya di Kabupaten Karimun, namun untuk jumlah kasus baru HIV/AIDS terjadi penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Secara rinci perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS dan jumlah kumulatif per tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

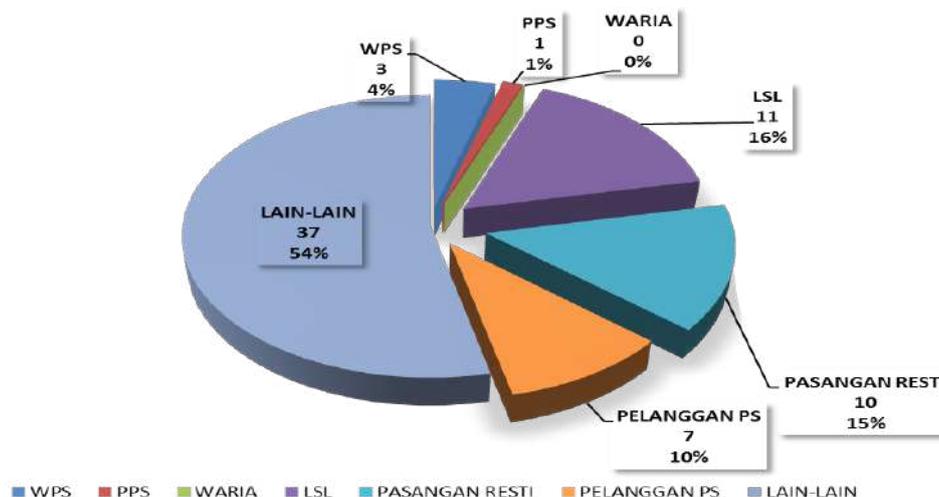
Grafik 3.17
PERKEMBANGAN JUMLAH KASUS HIV/AIDS DAN KUMULATIF
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 - 2021



(Jumlah Kumulatif adalah jumlah kasus baru tahun berjalan ditambah angka kumulatif tahun lalu dikurangi jumlah kematian tahun berjalan)

Proporsi penderita HIV/AIDS menurut faktor resiko sebagai berikut:

Grafik 3. 18
PROPORSI PENDERITA HIV/AIDS MENURUT FAKTOR RESIKO
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



Grafik ini menunjukkan bahwa proporsi faktor resiko penderita HIV/AIDS tertinggi adalah lain-lain sebanyak 54% disusul kelompok LSL 16% dan Pasangan Resiko Tinggi (Resti) 15%.

Berdasarkan target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021 sebesar 0,5% dan target RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 sebesar 0,5%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator prevalensi (angka kesakitan) HIV/AIDS di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 sebesar 0,07% terhadap target Kementerian Kesehatan RI dan RPJMD telah berada dibawah target dengan indikator capaian berhasil atau tercapai.

Keberhasilan atau tercapainya target kinerja baik target nasional dan daerah diantaranya dikarenakan dilaksanakannya kegiatan mobile klinik VCT ke lokasi dan populasi kunci yang mana kegiatan ini merupakan solusi pendeteksi dini HIV/AIDS, skrining ibu hamil di Posyandu, skrining ibu hamil di layanan praktek mandiri, terpenuhinya kebutuhan obat dan reagen bagi pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV/AIDS, kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan kerjasama dengan lintas sektor



dalam hal pendeteksi dini HIV/AIDS dan dibukanya layanan VCT dan IMS di UPT Puskesmas. Kegiatan skrining K1 dan K4 pada ibu hamil dan kegiatan skrining calon pengantin juga mempengaruhi capaian prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Karimun.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di tahun 2021 dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Karimun adalah kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp.4.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.434.500 atau 85,9% yang bermakna terjadi efisiensi anggaran sebesar 14,1%.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.54
ANALISIS EFISIENSI PER SASARAN

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan (per 100.000 KH)	92,8	72,6	20,2	efisien
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	98,8	72,9	25,9	efisien
	Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS	122,2	85,9	36,3	efisien
Rata-Rata		104,6	73	27	efisien

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karimun, Tahun 2021

Tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka kematian ibu (AKI) melahirkan tercapai sebesar 20.2% dari anggaran Rp.967.359.500. Indikator Angka kematian bayi tercapai 25.9% dari anggaran Rp.997.514.600 dan untuk indikator Prevalensi terhadap penyakit HIV/AIDS tercapai 36.3% dari anggaran Rp.4.000.000.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Dengan anggaran pendukung kegiatan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dilakukan beberapa upaya efisiensi agar output yang diharapkan tercapai seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya dengan menggantikan tenaga ahli yang sebelumnya dari Provinsi kepulauan Riau dengan tenaga ahli dari RSUD M.Sani sebagai pemateri, penilai dan pemberi masukan didalam kegiatan program perencanaan persalinan pencegahan komplikasi. Melibatkan kader posyandu dalam melaksanakan dan kegiatan review kematian ibu dan bayi diwilayahnya.



2. Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS

Untuk mencapai output kinerja maka kegiatan dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3. Kegiatan pendukung penurunan Prevalensi Terhadap Penyakit HIV/AIDS melibatkan lintas sektor, RSUD dan RS swasta, Komisi Penanggulangan AIDS dan LSM. Dengan keterlibatan pihak lainnya ini maka SDM yang belum terpenuhi di Dinas Kesehatan dapat terpenuhi sehingga output kegiatan tercapai.

8. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang lebih berdaya saing merupakan sasaran kesembilan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021. Sebagai tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran ini ditentukan dengan 7 indikator diantaranya adalah Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Indikator Angka Partisipasi Murni (APM), Indikator Angka Pendidikan Yang Ditamatkan, Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Persentase Sekolah Minimal Terakreditasi B, Persentase Angka Lulusan (AL) dan Persentase Guru yang telah Bersertifikat Pendidik. Adapun hasil capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.55 berikut ini :

Tabel 3.55
CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR	REALISASI	CAPAIAN
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	- SD/MI/Paket A	109,60 %	104,90 %
	- SMP/MTs/Paket B	92,52 %	99,73 %
2.	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	- SD/MI/Paket A	99,96 %	101,48 %
	- SMP/MTs/Paket B	74,31 %	100,92 %
3.	Angka pendidikan yang ditamatkan		
	- SD	29,66 %	102,27 %
	- SMP	21,60 %	116,76 %
4.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,57 Tahun	101,13 %
5.	Persentase Angka Melek Huruf (AMH)	98,35 %	101,08 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN			103,53 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021



Dari tabel 3.55 diatas diperoleh gambaran bahwa mayoritas indikator capaian sasaran mencapai 103,53 % atau bermakna baik sekali dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Sasaran ini pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang akan dijelaskan pada masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini.

a. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah. Sedangkan APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

APK dan APM merupakan jenis Indikator Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu strategi dalam pembangunan pendidikan.

Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Karimun telah dan akan terus melakukan berbagai upaya agar tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terus meningkat sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Pada jenjang SD/MI/Paket A, APK terus mengalami peningkatan yaitu 100,10 % pada tahun 2017 dan 109,60 % pada Tahun 2021. Dengan jumlah Siswa jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 28.954

siswa yang terdiri atas Jumlah Siswa Laki-laki sebanyak 15.275 siswa dan Siswa Perempuan sebanyak 13.679 Siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 -12 tahun sebanyak 26.417 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 13.108 orang dan perempuan sebanyak 13.309 orang. Untuk APM SD/MI/Paket A mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar 87,24 % dan pada tahun 2021 sebesar 99,96 %. Dengan jumlah siswa SD/MI/Paket A usia 7 – 12 Tahun sebanyak 26.406 Siswa, yang terdiri atas 13.869 Siswa Laki-laki dan 12.537 siswa Perempuan. Perkembangan Persentase APK dan APM jenjang SD/MI/Paket A di Kabupaten Karimun, tergambar seperti pada grafik berikut ini :

Grafik 3.19
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI/PAKET A DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 – 2021



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun(Data Olahan)

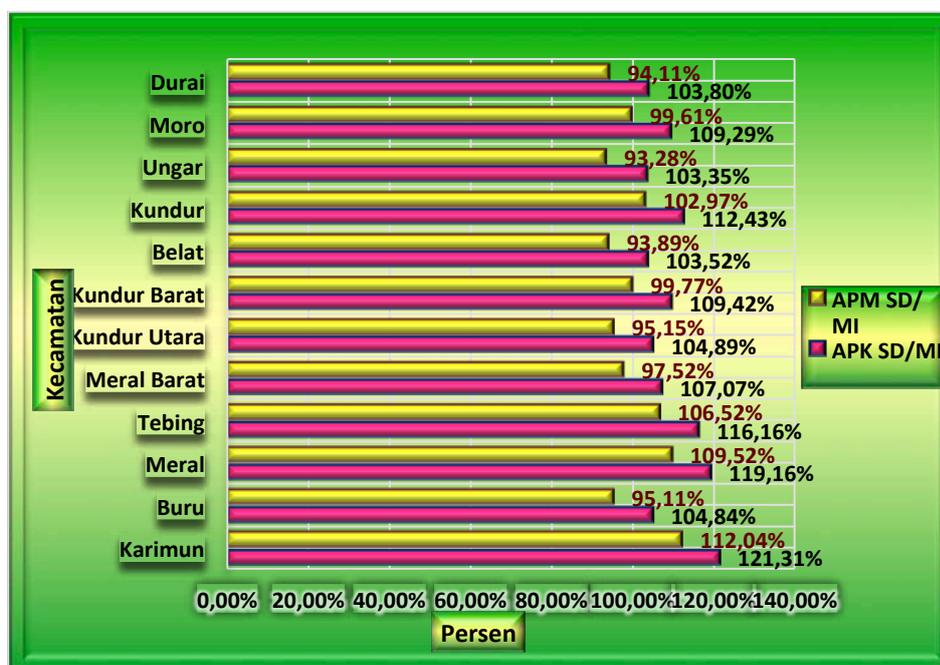
Pencapaian APK SD/MI/Paket A Tahun 2021 sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 104,48 %, dengan realisasi sebesar 109,60 %. Sedangkan pencapaian APM SD/MI/Paket A Tahun 2021 sudah memenuhi target yaitu dengan realisasi sebesar 99,96 % dari target yang ditetapkan sebesar 98,50 %.

Sebagaimana tergambar pada grafik 3.22, tampak bahwa APK SD/MI/Paket A di 9 (sembilan) kecamatan berada di atas target APK



SD/MI/Paket A Kabupaten Karimun, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara dan Moro. Sedangkan 3 (tiga) Kecamatan lainnya masih dibawah APK SD/MI/Paket A Kabupaten Karimun. Dengan perolehan angka terendah di Kecamatan Ungar sedangkan perolehan angka tertinggi diraih oleh Kecamatan Karimun. Sedangkan APM SD/MI/Paket A di 6 (enam) Kecamatan berada di bawah APM SD/MI/Paket A Kabupaten Karimun, yaitu Kecamatan Buru, Kecamatan Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Durai. Sedangkan 6 (enam) Kecamatan lainnya sudah diatas APM SD/MI/Paket A Kabupaten Karimun. Angka terendah berada di Kecamatan Ungar dan Kecamatan Karimun meraih angka tertinggi. Adapun APK dan APM SD/MI/Paket A berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Karimun tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.20 sebagai berikut :

Grafik 3.20
APK DAN APM SD/MI/PAKET A BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Data Olahan)



Pencapaian APK dan APM pada jenjang SD/MI/Paket A, APK lebih dari 100%, hal ini dikarenakan terdapat siswa yang berusia di luar rentang usia sekolah atau siswa bersekolah di luar domisili tempat tinggalnya. Begitu juga halnya dengan APM, dimana semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Idealnya, APM mencapai nilai maksimal yaitu 100%. Bila lebih besar dari 100%, hal ini dikarenakan adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu atau diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota atau daerah perbatasan. Pencapaian APM di Kabupaten Karimun tidak mungkin melebihi angka 100%, hal ini mengingat tidak mungkin ada anak usia sekolah yang bertempat tinggal dan menetap di luar Kabupaten Karimun tetapi bersekolah di Kabupaten Karimun. Namun, APM dapat mencapai angka melebihi 100% apabila APM Kabupaten Karimun dilihat per Kecamatan.

Selanjutnya, Persentase APK pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 92,77%. Sehingga persentase APK mengalami perubahan/fluktuasi dengan realisasi sebesar 92,39% pada tahun 2017 dan 92,52% pada Tahun 2021. Dengan Jumlah siswa jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 13.255 siswa yang terdiri atas 6.873 siswa Laki-laki dan 6.382 siswa Perempuan. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 14.327 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 7.486 orang dan perempuan sebanyak 6.841 orang. Untuk persentase APM SMP/MTs/Paket B mengalami perubahan/fluktuasi dengan realisasi sebesar 69,42% pada tahun 2017 menjadi 74,31% pada tahun 2021. Dengan jumlah Siswa jenjang SMP/MTs/Paket B usia 13 – 15 Tahun sebanyak 10.646 siswa yang terdiri atas 5.472 siswa Laki-laki dan 5.174 siswa Perempuan. Terkait dengan pencapaian realisasi APK SMP/MTs/Paket B di Tahun 2021 yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 92,77% dengan realisasi sebesar 92,52%. Hal ini

disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia 13 – 15 Tahun di tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020. Selain itu dipengaruhi oleh siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan ke pondok pesantren dan dari data pindah rayon terdapat 228 siswa lulusan SD/MI keluar dari Kabupaten Karimun. Sedangkan jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun relatif stabil antara tahun 2020 dan tahun 2021. Perkembangan APK dan APM pada jenjang SMP/MTs/Paket B, dapat digambarkan sebagaimana grafik 3.21 berikut ini :

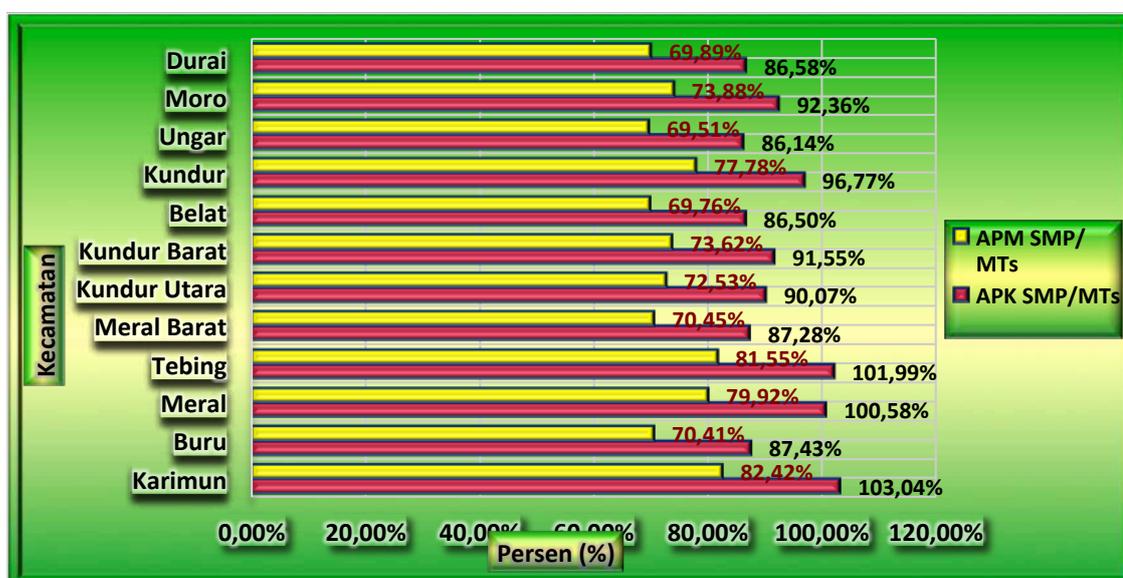
Grafik 3.21
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTs/PAKET B DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 – 2021



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Data olahan)

APK pada jenjang SMP/MTs/Paket B di tingkat Kecamatan yang telah melampaui target APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Karimun adalah APK SMP/MTs/Paket B di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing dan Kecamatan Kundur. Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya masih dibawah nilai target yang ditetapkan. APK Kecamatan Karimun merupakan yang tertinggi di Kabupaten Karimun, sedangkan APK terendah berada di Kecamatan Ungar. APM pada jenjang SMP/MTs/Paket B dengan persentase tertinggi diraih oleh Kecamatan Karimun sedangkan yang terendah berada pada Kecamatan Belat. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.22 berikut ini :

Grafik 3.22
APK DAN APM SMP/MTS/PAKET B BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021



Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun(Data Olahan)

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dengan menjangkau wilayah yang sulit terjangkau. Selain menyediakan lembaga/satuan pendidikan formal yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk yang permanen, Pemerintah Kabupaten Karimun juga membangun dan menyediakan infrastruktur yang dapat digunakan oleh penduduk usia sekolah untuk menjangkau sekolah terdekat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan antara lain dengan membangun jalan, dermaga dan penyediaan infrastruktur lain yang memudahkan penduduk usia sekolah melakukan mobilisasi.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Nonformal terus dilakukan. Selain menyediakan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kabupaten Karimun juga gencar menjangkau penduduk yang selama ini belum terjangkau dengan pendidikan. Terutama bagi sebagian masyarakat yang memiliki komunitas tersendiri dan belum bisa secara utuh bergabung serta berbaur dengan masyarakat umum, yaitu



komunitas yang berasal dari suku laut. Agar penduduk usia sekolah dapat bersekolah dan nyaman berada disekolah, pembangunan prasarana dan pengadaan sarana yang baik terus dilakukan dengan tujuan agar APK dan APM dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER, REHABILITASI RUANG KELAS DAN PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN PEMBANGUNAN RUANG UKS YANG BERSUMBER DARI APBN MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER TAHUN 2021

➤ **Pembangunan Laboratorium Komputer**



➤ **Rehabilitasi Ruang Kelas**



➤ **Pembangunan Ruang UKS**



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun

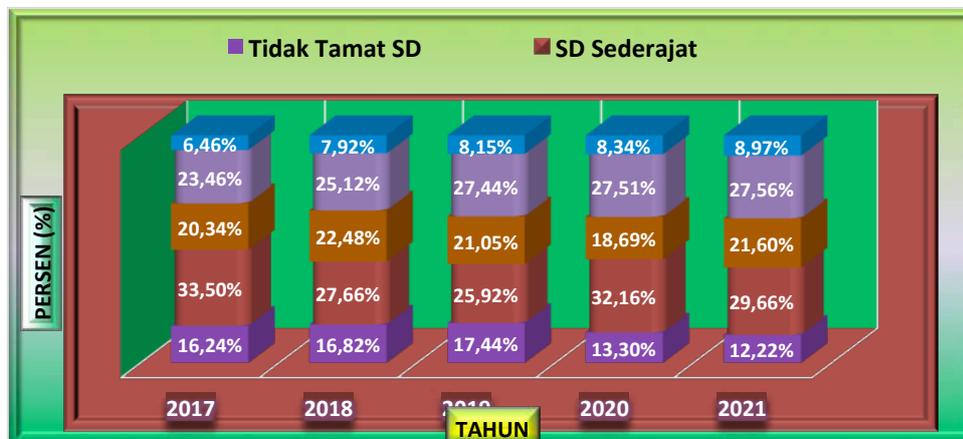
b. Indikator Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Indikator Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan atau Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilai tingkat pendidikan penduduk yang berpendidikan sarjana ke atas berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tidak pernah/belum sekolah, tidak/belum tamat SD dan tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan tamat Diploma/Sarjana.

Indikator Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan merupakan jenis indikator non-pendidikan, yang diperoleh dari data di luar pendidikan namun secara langsung dapat mempengaruhi kinerja pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, data non-pendidikan tidak

dapat dipisahkan dari data pendidikan yang ada melainkan sebagai pelengkap atau penunjang, seperti dapat dilihat pada grafik 3.23 berikut :

Grafik 3.23
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Karimun

Dari grafik 3.23 diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase penduduk yang tidak tamat SD pada tahun 2020 sebesar 13,30% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 12,22%. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SD Sederajat mengalami penurunan dari 32,16% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 29,66% pada tahun 2021. Ini bermakna bahwa target tahun 2021 sudah tercapai, karena semakin kecil persentase tingkat pendidikan yang tidak tamat SD dan yang tamat SD itu menunjukkan bahwa pendidikan yang ditamatkan pada jenjang yang lenih tinggi meningkat. Sebaiknya realisasi berada dibawah target karena tingkat pendidikan penduduk sebaiknya tidak ada yang tidak tamat Sekolah Dasar. Untuk tingkat SMP Sederajat mengalami peningkatan yaitu 18,69% pada tahun 2020 dan 21,60% pada tahun 2021, sedangkan untuk tamat SMA Sederajat mengalami peningkatan dari 27,51% pada tahun 2020 menjadi 27,56% pada tahun 2021. Sedangkan tamat Akademi/Universitas mengalami peningkatan dari 8,34% pada tahun 2020 menjadi 8,97% pada tahun 2021. Agar tingkat pendidikan masyarakat semakin membaik sementara usia untuk bersekolah dijenjang pendidikan formal (SD, SMP dan SMA) sudah



melebihi ketentuan, Dinas Pendidikan melaksanakan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) yang merupakan bagian dari program pendidikan nonformal.

Pendukung capaian kinerja indikator angka pendidikan yang ditamatkan adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Program Bantuan Operasional Sekolah untuk penduduk pada usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu 7-15 tahun, sedangkan untuk penduduk yang usianya diatas 15 tahun tergabung pada program pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan/paket).

c. Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) adalah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Adapun data perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada grafik 3.24 berikut ini

Grafik 3.24
ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (AHLS) KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Karimun



Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Karimun pada tahun 2017 sebesar 12,15 tahun dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi 12,57 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 sebesar 12,57 tahun, artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang adalah selama 12,57 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA Sederajat. Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya meningkatkan Pendidikan baik Formal maupun nonformal serta faktor non pendidikan lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendidikan di Kabupaten Karimun.

9. SASARAN MENINGKATNYA PERTUMBUHAN TENAGA KERJA LOKAL

Terjadinya pertumbuhan tenaga kerja lokal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Karimun. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan bahwa meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal sebagai sasaran ke 9 pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021. Adapun rata-rata capaian dari masing-masing indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.56
CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,22 %	60.86%	99.41%
2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,9%	50,42 % (**)	99,84%
		50,50% (**)		
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				99,63%

Catatan:

- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dari dua indikator adalah sebesar 99,63 persen. Nilai menunjukkan bahwa hasil capaian dikatakan sangat baik dari target yang ditentukan.

Sementara Perbandingan antara Realisasi dengan target jangka menengah dapat kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.57
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET
TAHUN 2019 – 2021

Sasaran	Indikator	Satuan	Target			Realisasi		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	60,71	60,96	61.22	58,09	59,76	60,86
	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	Persen	3,7	3,8	50,50**	3,29	3,77	50,42

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

**a. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.58
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

JENIS KEGIATAN	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Angkatan Kerja	71896	36520	108416
Bekerja	66842	33773	100615
Pengangguran Terbuka	5054	2747	7801
Bukan Angkatan Kerja	18801	50926	69727
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	90697	87446	178143
TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	79.27	41.76	60.86

Sumber; BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2021

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa *jumlah angkatan kerja* Kabupaten Karimun sebesar 10.8416 jiwa, sedangkan *jumlah penduduk usia kerja* sebesar 17.8143 jiwa, untuk itu :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% = \frac{10.8416}{17.8143} \times 100\% = 60,86\%$$



Dengan hasil rumus diatas maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun pada tahun 2021 yakni sebesar 60.86 persen.

Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019-2021 dapat kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.59
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KABUPATEN KARIMUN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN NASIONAL
TAHUN 2019 – 2021

No	Komponen	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1.	TPAK Kabupaten Karimun	Persen	58,09	59,76	60,86
2.	TPAK Provinsi Kepri	Persen	64,76	66,28	68,27
3.	TPAK Nasional	Persen	67,53	67,77	67,80

Sebagaimana tabel diatas bahwa TPAK pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 60,86 persen dibanding tahun 2020 dan 2019 hal ini bahwa :

1. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian
2. TPAK menggambarkan secara langsung naik turunnya faktor produksi akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja di Kabupaten Karimun.

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah :

1. Membuka kesempatan Kerja di Kabupaten Karimun sehingga perusahaan dapat menyerap tenaga kerja dalam permintaan yang besar, karna semakin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.
2. Melaksanakan pelatihan keahlian sesuai pasar kerja, sehingga calon tenaga kerja bisa ditempatkan sesuai yang dibutuhkan pasar kerja



dengan begitu TPAK akan meningkat dan pengangguran akan berkurang.

b. Indikator Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal

Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase Penerimaan Tahun ini (dikurang) Persentase Penerimaan Tahun lalu}$$

Untuk mengetahui Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana rumus diatas dapat kami jelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.60
PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN
TAHUN 2020 – 2021

Tahun	Pendaftar Pencaker	Pencaker Yang Ditempatkan	Persentase Penerimaan
2020	1.566	529	40,80%
2021	1.890	1.724	91,22%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021

Pada tahun tahun 2020 pendaftar pencari kerja (AK.1) berjumlah 1.566 Orang dan yang diterima oleh perusahaan berjumlah 529 orang, maka $529/1.566 \times 100\% = 40,80\%$, Sementara pada tahun 2021 pendaftar pencari kerja (AK.1) berjumlah 1.890 orang dan yang diterima oleh perusahaan berjumlah 1.724 orang dengan demikian $1.724/1.890 \times 100\% = 91,22\%$.

Selanjutnya Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) =

$$\frac{\text{Persentase Penreimaan Tahun ini [dikurang] Persentase Penerimaan Tahun lalu}}{91,22\% - 40,80\% = 50,42\%}$$

Maka Realisasi Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal pada tahun tahun 2021 sebesar 50.42 persen.



Berikut Pendaftar Pencari Kerja yang ditempatkan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.61
PENDAFTAR PENCARI KERJA (PENCAKER) YANG DITEMPATKAN
TAHUN 2021

Bulan	Pendaftar Pencaker		Pencaker yang Yang Ditempatkan		Keterangan Penempatan
	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	181	20	93	3	PT. SAIPEM KARIMUN BRANCH,PT. TRILINK INDONESIA,PT. SINAR SUMAN PRYANTO,PT ALLBEST MARINE,PT NUSALINK MITRA SUKSES
Februari	127	43	83	9	
Maret	97	25	153	13	
TW I	405	88	329	25	
	493		354		
April	205	7	231	12	PT. SAIPEM KARIMUN BRANCH,PT. TRILINK INDONESIA,PT BATU LINDO JAYA
Mei	187	23	25	9	
Juni	192	35	119	1	
TW II	584	65	375	22	
	649		397		
Juli	200	14	231	31	PT. SAIPEM KARIMUN BRANCH,PT CITRA KARIMUN MANDIRI,PT SURVEYOR INDONESIA
Agustus	70	18	201	16	
September	104	28	20	1	
TW III	374	60	452	48	
	434		500		
Oktober	91	14	66	18	PT SURVEYOR INDONESIA,PT CITRA KARIMUN MANDIRI,PT PROGRES MIORITA
November	98	23	140	13	
Desember	60	28	67	169	
TW IV	249	65	273	200	
	314		473		
Jumlah	1612	278	1429	295	
TOTAL	1890		1724		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021

Dari Tabel diatas bahwa pendaftar pencari kerja berjumlah 1890 orang sementara yang ditempatkan berjumlah 1724 Orang untuk itu realisasi atau persentase penerimaan sebesar 91,22 persen, sementara pendaftar pencari kerja tertinggi terdapat pada TW II (April, Mei, Juni) berjumlah 584 Orang terdiri dari 649 Orang Laki-laki dan 397 Orang Perempuan, sedangkan pencari kerja yang ditempatkan tertinggi terdapat



di TW III (Juli, Agustus, September) berjumlah 500 Orang terdiri dari 452 Orang laki-laki dan 48 Orang Perempuan.

Untuk Penerimaan Pencari Kerja di Kabupaten Karimun dapat kami jelaskan bahwa perekrutan tenaga kerja tidak juga melalui pemda karena pelaksanaan penempatan tenaga kerja juga boleh dilakukan oleh lembaga swasta berbadan hukum, dalam hal ini perusahaan yang merekrut tenaga kerja (Dasar Hukum Permen Transmigrasi RI Nomor : Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja BAB II Pasal 3) : Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ;
- (2) Lembaga Swasta yang berbadan Hukum.

Dapat kami jelaskan jumlah tenaga kerja lokal yang terdaftar menurut tingkat pendidikan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun pada Tahun 2021 yakni :

Tabel 3.62
PENCARI KERJA TERDAFTAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 2021

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar	230	5	235
Sekolah Menengah Pertama	284	15	299
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Kejuruan	1003	162	1165
Diploma I/II/II	27	19	46
Universitas	69	76	145
Jumlah/Total	1613	277	1890

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Dari tabel diatas bahwa Pencari Kerja tertinggi yakni pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan berjumlah 1165 Orang terdiri dari 1003 laki-laki dan 162 perempuan dan untuk Pencari Kerja pada tingkat Diploma berada di urutan terbawah, sementara Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.63
PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2021

Bulan	Umur 15-19		Umur 20-29		Umur 30-44		Umur 45-54		Umur 55+		Jumlah		Total
	LL	PR	LL	PR	LL	PR	LL	PR	LL	PR	LL	PP	
Januari	31	3	99	15	48	2	3	0	0	0	181	20	201
Februari	23	2	63	38	34	3	7	0	0	0	127	43	170
Maret	9	6	49	19	30	0	8	0	1	0	97	25	122
April	14	1	104	5	80	1	7	0	0	0	205	7	212
Mei	9	4	113	15	58	3	7	1	0	0	187	23	210
Juni	26	15	87	19	64	1	14	0	1	0	192	35	227
Juli	32	3	107	10	50	1	11	0	0	0	200	14	214
Agustus	17	6	32	11	19	0	2	1	0	0	70	18	88
September	19	13	49	15	30	0	6	0	0	0	104	28	132
Oktober	13	5	53	8	20	1	5	0	0	0	91	14	105
Nopember	12	4	52	18	29	1	4	0	1	0	98	23	121
Desember	9	4	36	23	15	1	0	0	0	0	60	28	88
Jumlah	214	66	844	196	477	14	74	2	3	0	1,612	278	1890
Total	280		1040		491		76		3		1890		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021

Dari tabel diatas bahwa pencari kerja menurut kelompok umur tertinggi berada pada kelompok umur 20-29 berjumlah 1040 orang terdiri dari 844 laki-laki dan 196 perempuan dan yang terendah pada kelompok umur >55 berjumlah 3 orang yakni hanya berjenis kelamin laki-laki.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.64
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	99,41%	0	99,41%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	99,84%	95,34%	4,5%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2021



Dari tabel diatas dapat dapat dijelaskan bahwa :

1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal terbagi 2 (dua) Indikator :

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan Capaian kinerja sebesar 99,41 persen sementara capaian anggaran nihil, hal ini tidak dianggarkan pertahun, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 untuk mendapatkan target/proyeksi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan selanjutnya hanya menunggu realisasi.

b. Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal

Persentase Peningkatan Penerimaan Pada tahun 2021 dengan Capaian Kinerja sebesar 99,84 persen dan Capaian Anggaran sebesar 95,34 persen dengan tingkat efisiensi sebesar 4,5 persen. Pada Tahun 2021 terjadi lonjakan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal dikarenakan berkurangnya wabah pandemi covid-19 di semua daerah termasuk di Kabupaten Karimun, hal ini lah memicu pengusaha untuk memperluas kesempatan kerja dengan membuka lowongan pekerjaan.

10.SASARAN MENINGKATNYA KEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

Capaian sasaran Meningkatkan Keberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender dilaksanakan secara sinergis dengan program dari Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dengan pemenuhan target-target yang merupakan strategi sasaran ke-11 yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021. Sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran ini ditentukan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender. Adapun capaian dari indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.65 berikut ini :



Tabel 3.65
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 10

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,52	91,25	98,63 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				98,63 %

Berdasarkan dari tabel 3.65 di atas rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 98,63 % atau bermakna belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dari hasil pembagian realisasi indikator tahun 2021 sebesar 91,25 poin terhadap target yang ditetapkan sebesar 92,52 poin serta dikalikan 100 persen. Capaian realisasi IPG tahun 2021 mengalami peningkatan hasil jika dibandingkan terhadap capaian realisasi IPG tahun 2019 sebesar 90,91 poin (meningkat 0,34 poin). Begitu juga jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, capaian realisasi IPG tahun 2021 sebesar 91,25 poin sudah melampaui target RPJMD tahun 2021 sebesar 91,16 poin (meningkat 0,09 poin).

Perhitungan indikator IPG pada tahun 2021 terhadap target yang ditetapkan menggunakan angka target pada tahun 2020, sementara capaian dan realisasi tahun 2021 masih menggunakan data hasil perhitungan IPG tahun 2020, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan realisasi indikator IPG Kabupaten/Kota tahun 2021 baru akan diumumkan/dipublikasi oleh Kementerian PPA dan BPS pada pertengahan tahun 2022. Berikut ini akan dijelaskan tentang capaian dari indikator sasaran 10.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah merupakan salah satu indikator pemerintahan yang Responsif Gender. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG sendiri memiliki 3 indikator; indikator pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Pada bidang pendidikan terdapat indikator melek huruf, akses pendidikan dasar, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Pada bidang kesehatan terdapat angka harapan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sedangkan pada bidang ekonomi kita bisa melihat dari pendapatan, daya beli, lapangan pekerjaan, status pekerjaan dan jenis pekerjaan.

Adapun data angka melek huruf (AMH)/Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dan angka harapan hidup (APH) Kabupaten Karimun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.66 berikut ini :

Tabel 3.66

**ANGKA MELEK HURUF (AMH)/ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (AHLS),
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK), ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM),
ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (ARLS) DAN ANGKA HARAPAN HIDUP
(AHH) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017-2021**

TAHUN	AMH/ AHLS	ARLS	APK		APM		AHH	
			SD	SLTP	SD	SLTP	LK	PR
2017	12,15	7,98	100,10	92,39	87,24	69,42	67,60	71,40
2018	12,16	8,01	117,06	77,22	72,53	72,44	67,76	71,56
2019	12,18	8,02	109,88	80,86	99,21	76,1	68,49	72,43
2020	12,42	8,17	108,77	80,35	99,24	75,98	70,46	71,44
2021	12,57	8,18	109,60	92,52	99,96	74,31	70,46	71,44

Sumber : BPS Dan Dinas Pendidikan Kab. Karimun tahun 2022



Berdasarkan perhitungan metode baru Rasio IPM terhadap IPG di Kabupaten Karimun tahun 2021 tercatat 127,73 poin menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebanyak 127,86 poin. Hal ini mengalami penurunan sebanyak 0,13 poin. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel tabel 3.67 berikut :

Tabel 3.67
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2016-2020

TAHUN	IPM	IPG	IDG	RASIO IPG TERHADAP IPM (%)
2016	69,84	91,18	55,55	131,74
2017	70,26	91,35	56,47	130,02
2018	70,56	91,48	57,03	129,70
2019	71,10	90,91	64,17	127,86
2020	71,44	91,25	64,05	127,73

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2022

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi). Salah satu indikator gender yang mampu menunjukkan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*). Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan,



ketenagakerjaan. Indeks ini diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Ketidaksetaraan gender terutama dalam hal ekonomi diprediksi semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek (Jayachandran, 2014). Pertama berkaitan dengan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dari pertanian menuju sektor industri dan jasa-jasa yang memungkinkan perubahan sistem dalam dunia kerja. Kedua, perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan domestik rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga. Ketiga, meningkatnya perbaikan sistem dalam dunia kesehatan yang menyebabkan risiko dan kerentanan anak terhadap penyakit menjadi turun. Dampaknya, perempuan menjadi lebih bebas dan tenang untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

Berdasarkan tingkat capaian Kabupaten Karimun untuk indikator sasaran ini pada tahun 2021 (masih menggunakan data capaian tahun 2020), capaian IPG sebesar 91,25 poin atau bermakna terjadi peningkatan capaian sebesar 0,34 poin jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2019 sebesar 90,91 poin. Capaian IPM sebesar 71,44 poin bermakna terjadi peningkatan capaian sebesar 0,34 poin jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2019 sebesar 71,10 poin, namun capaian IDG sebesar 64,05 poin pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian sebesar 0,12 poin jika dibandingkan terhadap capaian tahun 2020 lalu sebesar 64,17 poin.

Peningkatan capaian indikator IPG Kabupaten Karimun Tahun 2021 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun serta dukungan Kerjasama berbagai lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan mengerahkan segenap sumber daya dan



dukungan serta efisiensi anggaran OPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 antara lain : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), serta Program Perlindungan Khusus Anak.

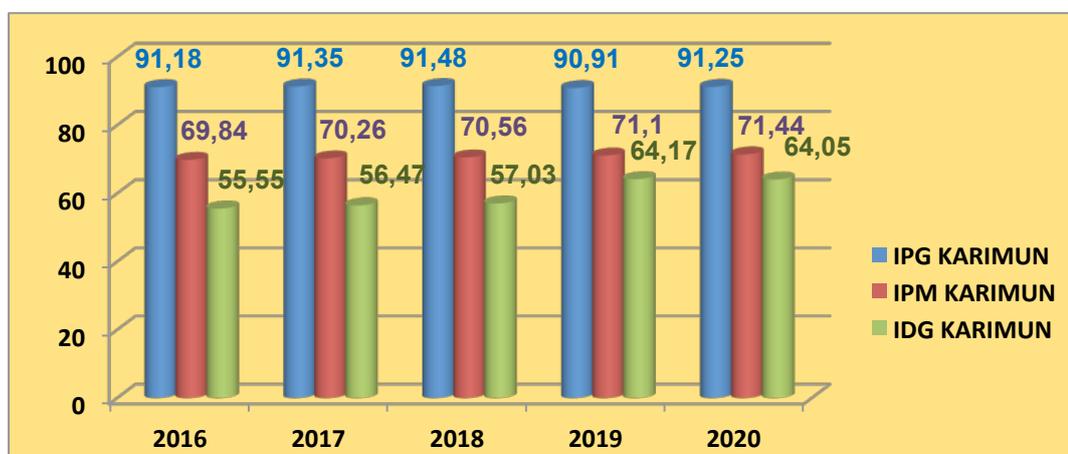
Beberapa capaian prestasi dan kinerja yang diperoleh Kabupaten Karimun berhubungan dengan capaian indikator IPG pada tahun 2021 antara lain :

1. Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama, dari Kementerian Negara PPA (Tahun 2020 Kategori Madya),
2. Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama, dari Kementerian Negara PPA,
3. Piagam Penghargaan Forum Anak Sebagai Penerima DAFA Award Kategori Website Terbaik, dari Kementerian Negara PPA.

Berikut Capaian IPG, IDG dan IPM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 3.25 di bawah ini :

Grafik 3.25

CAPAIAN IPG, IDG DAN IPM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016-2020



Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2022

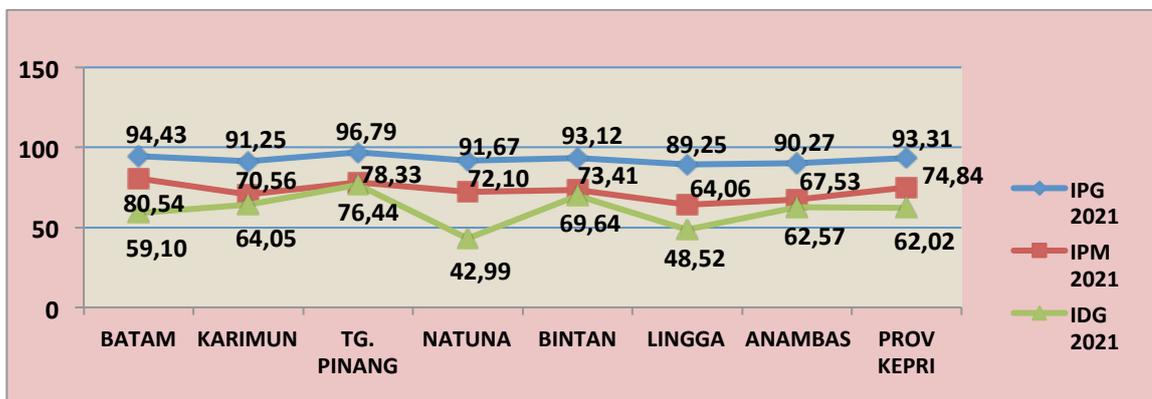


Pencapaian pembangunan gender adalah IPG yang merupakan turunan dari IPM. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Pencapaian pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama ini. IPG Kabupaten Karimun tahun 2021 sebesar 91,25 poin masih menduduki peringkat kelima dibandingkan dengan 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau, pencapaian tertinggi pada Kota Tanjung Pinang sebesar 96,79 poin dan pencapaian terendah pada Kabupaten Lingga yaitu sebesar 89,25 poin. Peningkatan atau perkembangan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang masih rendah. Sebagai akibatnya IPG menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 angka IPG Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 93,31 poin, meningkat 0,21 poin dari tahun 2019 sebesar 93,10 poin. Berikut data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau menurut Kab/Kota Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.26 di bawah ini :

Grafik 3.26
IPG, IPM DAN IDG PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021



Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2022

11. SASARAN TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Data capaian sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2021 diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Adapun capaian dari sasaran ke 11 ini dapat dilihat pada tabel 3.68 berikut ini :

Tabel 3.68
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 11

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,70%		
		1,11 %	1,04 %	106,31 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				106,31 %

Catatan:

- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.

Berdasarkan tabel 3.68 di atas dapat dilihat tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 106,31% atau mempunyai karakteristik



komponen realisasi capaian yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja serta semakin meningkat dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dari hasil pembagian realisasi indikator tahun 2021 sebesar 1,04 persen terhadap target yang ditetapkan sebesar 1,11 persen serta dikalikan 100 persen. Perhitungan target dan realisasi indikator LPP pada tahun 2021 disesuaikan dengan target dan realisasi kinerja yang telah dicapai OPD, sedangkan target yang digunakan pada perhitungan indikator ini menggunakan hasil realisasi yang dicapai OPD pada tahun 2020.

Capaian realisasi LPP tahun 2021 mengalami peningkatan hasil jika dibandingkan terhadap capaian realisasi LPP tahun 2020 sebesar 1,11 persen (berhasil menekan/menurunkan 0,07 persen). Namun jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, capaian realisasi LPP tahun 2021 sebesar 1,04 persen belum memenuhi target RPJMD tahun 2021 sebesar 0,70 persen (meningkat 0,34 persen).

Peningkatan capaian indikator LPP Kabupaten Karimun Tahun 2021 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun serta dukungan Kerjasama berbagai lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan mengerahkan segenap sumber daya dan dukungan serta efisiensi anggaran OPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 antara lain :

1. Program Pengendalian Penduduk,
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)



Berikut data penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.69 di bawah ini :

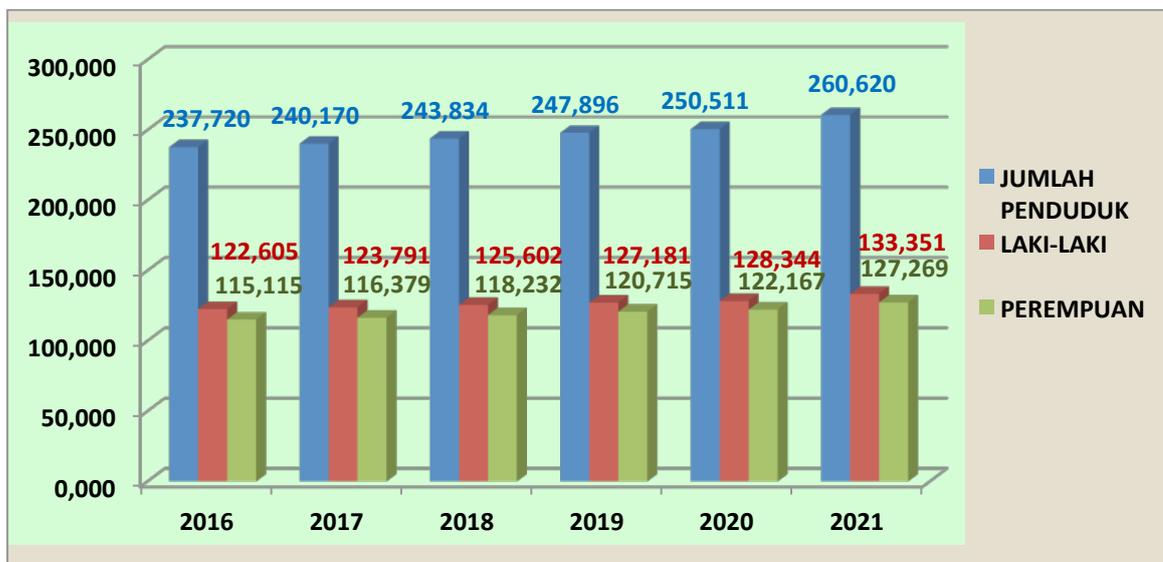
Tabel 3.69
DATA PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	KARIMUN	52.134	26.616	25.518	20,0
2	MERAL	50.188	25.905	24.283	19,3
3	MERAL BARAT	16.305	8.421	7.884	6,3
4	TEBING	31.169	15.854	15.315	12,0
5	BURU	10.313	5.315	4.998	4,0
6	KUNDUR	30.947	15.461	15.486	12,0
7	KUNDUR UTARA	12.810	6.577	6.233	5,0
8	KUNDUR BARAT	18.797	9.631	9.166	7,2
9	UNGAR	5.884	2.982	2.902	2,3
10	MORO	19.005	9.789	9.216	7,3
11	DURAI	6.278	3.243	3.035	2,4
12	BELAT	6.790	3.557	3.233	2,6
KAB. KARIMUN		260.620	133.351	127.269	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Karimun tahun 2021

Adapun indikator yang memiliki korelasi dan mendukung sasaran ini adalah angka kelahiran, angka kematian, penduduk datang dan penduduk pergi tahun 2021, target yang ditetapkan 1,11% dengan realisasi sebesar 1,04 atau capaian kinerja 106.31 %. Realisasi ini dihitung berdasarkan banyaknya penduduk tahun 2021 sebanyak 260.620 jiwa dibagi jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 250.511 jiwa lalu berbanding terbalik terhadap periode jangka waktu 1 tahun. Berikut perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.27
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 – 2021



Sumber: *Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2022*

Ada empat faktor yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) antara lain yaitu ;

1. Kelahiran

Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, Antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program Keluarga Berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Kedua yang menghambat kelahiran itu kerana menggunakan Program Keluarga Berencana. Selanjutnya melalui berbagai upaya kegiatan seperti Generasi Berencana (Genre) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun menurun atau dapat diturunkan.

Data angka kelahiran tahun 2021 di wilayah Kabupaten Karimun sebanyak 3.456 bayi, mengalami peningkatan kelahiran bayi jika dibandingkan terhadap kelahiran bayi tahun 2020 sebanyak 2.398 bayi. Selama tahun 2021 kelahiran bayi terbanyak terdapat di Kecamatan Meral sebanyak 716 bayi (20,72%), serta kelahiran bayi terendah terdapat di Kecamatan Ungar sebanyak 51 bayi (1,48%). Berikut data kelahiran



bayi di Kabupaten Karimun tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.70
DATA KELAHIRAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	BAYI LAHIR HIDUP TAHUN 2021				MEMILIKI AKTE ANAK		
		LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH
1	Karimun	319	334	653	18,89	7.913	7.386	15.299
2	Meral	367	349	716	20,72	8.130	7.467	15.597
3	Meral Barat	127	139	266	7,70	2.786	2.591	5.377
4	Tebing	204	180	384	11,11	5.234	4.889	10.123
5	Buru	61	80	141	4,08	1.421	1.371	2.792
6	Kundur	215	200	415	12,01	4.358	4.139	8.497
7	Ungar	28	23	51	1,48	756	794	1.550
8	Kundur Utara	77	67	144	4,17	1.879	1.677	3.556
9	Belat	44	49	93	2,69	989	924	1.913
10	Kundur Barat	133	141	274	7,93	2.786	2.591	5.377
11	Moro	126	112	238	6,89	2.831	2.691	5.522
12	Durai	35	46	81	2,34	943	835	1.778
TOTAL		1.736	1.720	3.456	100	40.026	37.355	77.381

Sumber: Dinkes, Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2022

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR (*Total Fertility Rate*) adalah peningkatan Angka pemakaian kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR). Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara (*proximate determinant*) fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Melalui sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau kepesertaan ber KB di masyarakat guna mengendalikan angka kelahiran penduduk.



Jumlah capaian angka pemakaian kontrasepsi/peserta KB aktif tahun 2021 sebanyak 50.350 dari PUS sebanyak 59.830 atau 84,15%. Persentase peserta KB aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Karimun sebesar 97,0% sebanyak 21.763 akseptor dari 21.133 total PUS, sedangkan persentase terendah terdapat di Kecamatan Durai sebesar 67,0% sebanyak 897 akseptor dari 1.331 total PUS. Berikut data PUS dan peserta KB aktif menurut kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.71 berikut ini :

Tabel 3.71
DATA PASANGAN USIA SUBUR DAN PESERTA KB AKTIF MENURUT
KECAMATAN DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JLH PUS	JLH PESERTA KB AKTIF	REALISASI (%)
1	Karimun	21.763	21.133	97
2	Meral	9.996	6.891	68
3	Meral Barat	2.226	1.771	79
4	Tebing	4.621	3.564	77
5	Buru	1.343	1.270	94
6	Kundur	3.894	3.017	77
7	Ungar	3.974	3.252	81
8	Kundur Utara	3.029	2.569	84
9	Belat	934	808	86
10	Kundur Barat	3.482	2.467	70
11	Moro	3.237	2.711	83
12	Durai	1.331	897	67
JUMLAH		59.830	50.350	84.15

Sumber: Disdalduk, KB, PP&PA 2022

2. Kematian

Menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh peningkatan perkembangan dalam bidang kesehatan atau medis, berbanding lurus dengan meningkatnya angka Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk memberi arti terhadap angka kelahiran yang tinggi dan umur yang panjang, tentulah mempengaruhi penduduk di wilayah Kabupaten Karimun semakin padat dan peningkatan kepada laju pertumbuhan



penduduk. Data kematian di Kabupaten Karimun yang dilaporkan dan terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2021 sebanyak 1.137 kasus kematian (0,44%) dari jumlah total 260.620 penduduk, salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka kematian tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2021. Persentase kematian penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Karimun sebesar 0,57% sebanyak 295 kematian dari 52.134 penduduk, sedangkan persentase kematian penduduk terendah terdapat di Kecamatan Durai sebesar 0,10% sebanyak 6 kematian dari 6.278 penduduk. Seperti terlihat pada tabel 3.72 di bawah ini :

Tabel 3.72
DATA KEMATIAN PENDUDUK DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEMATIAN PENDUDUK			
			LK	PR	JUMLAH	%
1	KARIMUN	52.134	187	108	295	0,57
2	MERAL	50.188	161	121	282	0,56
3	MERAL BARAT	16.305	50	30	80	0,49
4	TEBING	50.188	102	68	170	0,34
5	BURU	10.313	12	4	16	0,16
6	KUNDUR	30.947	64	39	103	0,33
7	UNGAR	5.884	8	8	16	0,27
8	KUNDUR UTARA	12.810	28	15	43	0,34
9	BELAT	6.790	15	16	31	0,46
10	KUNDUR BARAT	18.797	44	27	71	0,38
11	MORO	19.005	12	12	24	0,13
12	DURAI	6.278	5	1	6	0,10
TOTAL		260.620	688	449	1.137	0,44

Sumber: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2022

3. Pindah Datang

Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Karimun adalah penduduk yang datang dan pindah dari luar wilayah yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Berikut data Penduduk Pindah Datang



di Kabupaten Karimun tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.73 berikut ini :

Tabel 3.73
DATA PENDUDUK PINDAH DATANG DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PINDAH DATANG	%
1	Karimun	52.134	22.428	43,02
2	Meral	50.188	22.696	45,22
3	Meral Barat	16.305	5.746	35,24
4	Tebing	50.188	13.867	27,63
5	Buru	10.313	1.847	17,91
6	Kundur	30.947	8.257	26,68
7	Ungar	5.884	952	16,18
8	Kundur Utara	12.810	3.356	26,20
9	Belat	6.790	1.063	15,66
10	Kundur Barat	18.797	4.640	24,68
11	Moro	19.005	3.939	20,73
12	Durai	6.278	1.121	17,86
TOTAL		260.620	89.912	34,50

Sumber: *Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2022*

Penduduk pindah datang di Kabupaten Karimun selama tahun 2021 sebanyak 89.912 jiwa atau sebesar 34,5% dari 260.620 jiwa total penduduk, kondisi tersebut meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 1,60%. Berdasarkan data persentase penduduk pindah datang di wilayah kecamatan selama tahun 2021, terbanyak terdapat di Kecamatan Meral sebanyak 22.696 jiwa dari 50.188 jiwa jumlah penduduk yang ada (45,22%). Sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Belat sebanyak 1.063 jiwa dari 6.790 jiwa jumlah penduduk yang ada (15,66%).

4. Pindah Pergi

Penduduk yang pergi keluar daerah dapat terjadi jika penduduk di suatu wilayah datang ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja bahkan bisa dalam jumlah yang banyak seperti menjadi Tenaga Kerja (TKI) ke negara lain atau migrasi ke daerah lain di luar wilayah Kabupaten Karimun, hal ini bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk suatu daerah.



Data penduduk pindah pergi dari Kabupaten Karimun yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2021 sebanyak 94.135 jiwa dari 260.620 jiwa total penduduk atau sebesar 36,12%, kondisi tersebut menunjukkan peningkatan persentase capaian jika dibandingkan terhadap tahun 2020 sebesar 1,75%.

Berikut Data Penduduk Pindah Pergi dari wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.74
DATA PENDUDUK PINDAH PERGI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PINDAH PERGI	%
1	Karimun	52.134	26.569	50,96
2	Meral	50.188	19.620	39,09
3	Meral Barat	16.305	4.410	27,04
4	Tebing	50.188	10.943	21,80
5	Buru	10.313	2.576	24,98
6	Kundur	30.947	10.803	34,91
7	Ungar	5.884	1.465	24,90
8	Kundur Utara	12.810	3.907	30,50
9	Belat	6.790	1.673	24,64
10	Kundur Barat	18.797	5.332	28,37
11	Moro	19.005	5.205	27,39
12	Durai	6.278	1.632	26,0
TOTAL		260.620	94.135	36,12

Sumber: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah penduduk pindah pergi di wilayah kecamatan selama tahun 2021 terbanyak terdapat di Kecamatan Karimun sebanyak 26.569 jiwa dari 52.134 jiwa jumlah penduduk (50,96%). Sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Tebing sebanyak 10.942 jiwa dari 50.188 jiwa jumlah penduduk (21,80%).

12. TERWUJUDNYA POLA DAN STRUKTUR RUANG YANG SESUAI DENGAN TATA RUANG WILAYAH

Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah adalah merupakan sasaran ke 3 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten tahun 2019. Adapun sebagai tolak ukur keberhasilan mencapai sasaran ini adalah melalui indikator persentase



pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Berikut capaian indikator dari sasaran 13 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.75
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 13

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah	99,00%	99,87%	100,88%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				100.88%

Dari tabel 3.75 diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian yang diperoleh adalah sebesar 100,88 % atau baik sekali. Pada penyusunan laporan ini, kami hanya mampu memberikan gambaran tentang kondisi eksisting pemanfaatan ruang yang diukur berdasarkan jumlah rekomendasi izin mendirikan bangunan dan rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun di Pulau Karimun, yang merupakan kelanjutan dari pengukuran tahun 2019 yang hanya mampu mengukur Pulau Karimun dengan menggunakan Foto Udara yang meliputi Pulau Karimun besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah diukur melalui perbandingan antara total luas bangunan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah (Tahun 2020 = 12.484,28 Ha Khusus Pulau Karimun) dengan total luas wilayah (12.500 Ha Khusus Pulau Karimun).

Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah berkembang di Indonesia, dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sampai saat ini terdiri dari 12 kecamatan dengan 42 desa dan 29 kelurahan. Dengan luas wilayah seluas 7.984 KM² (798.400 Ha) dan Luas Daratan : 2.784 KM² (278.400 Ha) Kabupaten Karimun terdiri dari 249 buah pulau, 54 buah pulau berpenghuni dan 195 buah pulau belum berpenghuni.



Dari keterangan diatas dapat disampaikan bahwa Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang Tahun 2020 menargetkan sebesar 99,00% atau diasumsikan seluas 12.375 Ha dari luas wilayah pulau Karimun seluas 12.500 Ha. Adapun realisasi peruntukan ruang Pulau Karimun seluas 12.484,28 Ha, ada penambahan 121,22 Ha dari Tahun 2019 yang hanya 12,363.06 Ha. Realisasi Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Rung Wilayah sebesar 99,87%, dan tingkat capaian 100,88% dengan perhitungan sebagai berikut :

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW di pulau Karimun adalah 121,22 Ha + 12.363,06 Ha (Realisasi sampai dengan 2020) = 12.484,28 Ha

$$\begin{aligned} \text{\% Pemanfaatan Ruang} &= \frac{12.484,28 \text{ Ha}}{12,500 \text{ Ha}} \times 100 = 99,87\% \\ \text{Sesuai RTRW} & \end{aligned}$$

Berdasarkan dari penjelasan diatas terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengukur Indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:

1. Minimnya sarana pendukung guna membantu dan memudahkan dalam mengidentifikasi dan menghitung luas wilayah yang sudah terbangun sesuai dengan Tata Ruang Wilayah berupa Foto Citra Satelit, Aplikasi ARCGIS;
2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi tata ruang wilayah.
3. Kurangnya anggaran kegiatan yang menunjang dibidang tata ruang
Untuk menangani kendala diatas, diperlukan hal – hal sebagai berikut:
 1. Menyusun Instrumen Pengawasan dan Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang;



2. Melakukan Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sarana pendukung yang dibutuhkan;
4. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai bidangnya.
5. Menambah anggaran kegiatan dibidang tata ruang

Berikut Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun yang sesuai dengan pemanfaatan ruang wilayah menurut kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.76
JUMLAH REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KARIMUN YANG SESUAI DENGAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH MENURUT KECAMATAN PADA TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH REKOM YANG DIKELUARKAN	JUMLAH BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M2) S/D 2020	KETERANGAN
1	Karimun	17	22	330,120.31	
2	Meral	20	27	167,321.63	
3	Meral Barat	1	3	127,018.11	
4	Tebing	12	26	587,755.52	
Total Pulau Karimun		50	78	1.212.216 M2 (121,22 Ha)	
5	Buru	0	0	330,120.31	
6	Kundur	3	5	167,321.63	
7	Kundur Utara	3	2	127,018.11	
8	Kundur Barat	0	0	587,755.52	
9	Ungar	0	0	330,120.31	
10	Belat	0	0	167,321.63	
11	Moro	2	2	127,018.11	
12	Durai	0	0	587,755.52	
13	Tower Se – Kab. Karimun	5	5	-	
14	Perumahan / Developer	0	0	24,869.43	
15	Perusahaan Se - Kab. Karimun	22	-	76,972.00	
TOTAL KESELURUHAN		85	92	1.607.468 M2 (160,75 Ha)	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karimun, Tahun 2021



13. SASARAN TERJAGANYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup yang merupakan tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya wajib dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun berkewajiban agar kelestarian lingkungan hidup di daerahnya tetap terjaga sehingga menetapkan Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup sebagai sasaran ke 13 yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran ini ditentukan dengan 4 (empat) indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indikator Nilai Adipura, Indikator Luas Ruang Terbuka Hijau dan Indikator Luas Kawasan Rawan Bencana Yang Tertangani. Adapun capaian dari masing-masing indikator sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.77
CAPAIAN MASING-MASING INDIKATOR SASARAN 13

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72%	69,31%	96,26 %
2.	Nilai Adipura	≥75	≥71,41	94,20 %
3.	Luas Ruang Terbuka Hijau	191,12 Ha	213,12 Ha	115,11%
4.	Luas Kawasan Rawan Bencana yang Tertangani	58 Ha	43,09 Ha	100,21%
RATA RATA TINGKAT CAPAIAN				101,45 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian dari sasaran ini adalah sebesar 101,45 %. Hal ini bermakna bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari sasaran ini adalah baik sekali dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Berikut dijelaskan tentang evaluasi dan analisis dari masing-masing indikator sasaran ini.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator relevan yang mendukung sasaran ini. Adapun perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Dimana :

IKLH	=	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA	=	Indeks Kualitas Air
IKU	=	Indeks Kualiatas Udara
IKL	=	Indeks Kualitas Lahan

Sehingga hasil dari perhitungan IKLH Kabupaten Karimun pada Tahun 2021 adalah :

$$\begin{aligned}\text{IKLH} &= (54,44 \times 0,376) + (94,19 \times 0,405) + (48,82 \times 0,219) \\ \text{IKLH} &= (20,47) + (38,15) + (10,69) \\ \text{IKLH} &= 69,31\end{aligned}$$

Dari hasil analisis perhitungan diatas, diperoleh nilai IKLH Kabupaten Karimun Tahun 2021 yaitu 69,31 dengan target yang diperjanjikan yaitu 72,00, sehingga persentase capaian realisasi kinerja adalah 96,26%.

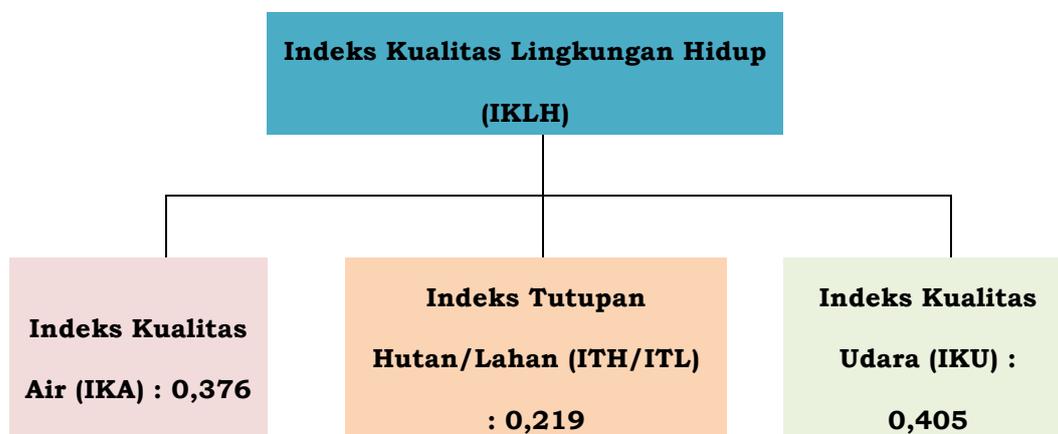
Dari ketiga hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan diatas maka dapat dijelaskan kembali bahwa Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2021 berada pada rentang nilai indeks pencemaran 0,27 – 6,50 dengan persentase standard mutu air yang memenuhi baku mutu 33,33%, Cemar Ringan 55,56% dan Cemar Sedang 11,11% dan status masih memenuhi baku mutu lingkungan hidup (sedang) dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 54,44.

Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun Tahun 2021 juga berada pada standard yang memenuhi baku mutu udara ambein dengan nilai 0.205 dan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang

telah dikonversikan dengan IKLH yaitu, 94.19. Terakhir Nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Karimun Tahun 2021 adalah 48,82 dengan klasifikasi kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih kurang.

Struktur IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator, dengan nilai pembobotan yang berbeda dari setiap indikator. Hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili *green issues* (isu hijau) dan *brown issues* (isu coklat). Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu) indikator, yaitu tutupan hutan/lahan, maka bobotnya lebih besar dibanding indikator lainnya. Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan. indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar,

Gambar 3.3
STRUKTUR DAN BOBOT PERSENTASE IKLH





Tabel 3.78
INDIKATOR DAN PARAMETER IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1.	Kualitas Udara	SO ₂	0,405	Dihitung Indeks Kualitas Udara (IKU)
		NO ₂		
2.	Kualitas Air Sungai/Danau	TSS	0,376	Dihitung Indeks Kualitas Air (IKA)
		DO		
		BOD		
		COD		
		Total Phosfat		
		Fecal-Coli		
		Total Coliform		
3.	Tutupan Hutan/Lahan	Luas Hutan/Lahan	0,219	Dihitung Indeks Tutupan Lahan (ITL)

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Analisis perhitungan dan evaluasi pencemaran air dengan metode Indeks Pencemaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama Tahun 2021 menunjukkan status masih memenuhi baku mutu lingkungan hidup (sedang) dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) **54,44**.

Tabel 3.79
PERHITUNGAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS AIR SELAMA TAHUN 2021

Parameter	Danau Bati			Danau Pongkar			Danau Sentani		
	INTAKE	INLET	OUTLET	INTAKE	INLET	OUTLET	INTAKE	INLET	OUTLET
Ph	4.70	4.90	4.73	6.70	6.81	7.09	4.80	5.30	4.70



Hasil evaluasi perhitungan pengukuran kualitas air selama Tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun yang disesuaikan dengan kategori diatas dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.80
PERSENTASE STANDARD PEMENUHAN MUTU AIR

Standar Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi Baku Mutu	3	33.33%	70	23.33
Tercemar Ringan	5	55.56%	50	27.78
Tercemar Sedang	1	11.11%	30	3.33
Tercemar Berat	0	0.00%	10	0
Jumlah Total	9	100%		54.44
Indeks Kualitas Air Kab. Karimun Tahun 2021				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari uraian Tabel diatas Indeks Pencemaran Kabupaten Karimun Tahun 2021 berada pada rentang nilai indeks pencemaran 0.27 – 6,50 dengan persentase standard mutu air yang memenuhi baku mutu 33,33%, Cemar Ringan 55,56% dan Cemar Sedang 11,11%.

Data dari BPS menunjukkan bahwa sekitar 3 persen rumah tangga di Indonesia menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indicator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai indikator.



Indeks Kualitas Udara (IKU)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun pada Tahun 2021 melaksanakan pendampingan pemantauan dan pengukuran kualitas udara sebanyak dua kali dan dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100.

Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$IKU = \frac{IP\ NO_2 + IP\ SO_2}{2}$$

Dimana :

- IPU = Indeks Pencemaran Udara
- IP NO₂ = Indeks Pencemar NO₂
- IP SO₂ = Indeks Pencemar SO₂

Pemantauan dan pengukuran kualitas udara dilakukan melalui metode *Passive Sampler* dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu dalam hal ini perumahan dan perkantoran/perdagangan. Dalam satu tahun, umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masingnya 2 (dua) minggu.

Hasil dari pemantauan dan pengukuran kualitas udara selama Tahun 2021 dapat dalam tabel berikut :



Tabel 3.81
PERHITUNGAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS UDARA
TAHUN 2021

Lokasi	Peruntukan		Kadar NO ₂ (µg/m ³)		Kadar SO ₂ (µg/m ³)	
			Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
Kab. Karimun	1	Transportasi	8.03	9.74	5.77	2.57
	2	Industri	6.02	7.74	6.44	3.48
	3	Pemukiman	4.47	4.01	5.72	3.80
	4	Perkantoran	7.08	5.95	6.03	5.14
Rata-Rata Kadar NO ₂ dan SO ₂ setiap Tahap			6.40	6.86	5.99	3.75
Rata-Rata Kadar NO ₂ dan SO ₂			6.63		4.87	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Selanjutnya dari perhitungan hasil pemantauan dan pengukuran sesuai dengan tabel diatas, perlu dilakukan perbandingan baku mutu udara Indonesia yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat longgar sehingga dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (*EU Directives*).

Adapun perhitungan indeksnya adalah membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives, apabila angkanya melebihi 1 berarti melebihi standar EU, begitu pula sebaliknya apabila sama dan di bawah 1 artinya memenuhi standard dan lebih baik.

Tabel 3.82
PEMBANDINGAN HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DENGAN
STANDAR EU DIRECTIVES

Parameter	Rata-rata Pemantauan 2017	Referensi EU	Indeks
NO ₂	6.63	40	0.166
SO ₂	4.87	20	0.243
Indeks Udara (Index Annual model EU-Ieu)			0.205
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Karimun 2021			94.19

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Tahun 2021



Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Indeks Udara Kabupaten Karimun Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Referensi EU adalah **0.205** dan memenuhi standar EU Directives, karena nilainya dibawah 1. Selanjutnya untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU) yang sesuai dengan IKLH perlu dilakukan konversi indeks udara standar EU Directives dengan formula sebagai berikut :

$$IKU = 100 - (50/0.9 \times (IEU - 0.1))$$

Dari perhitungan formulasi diatas sesuai dengan hasil Indeks Udara Kabupaten Karimun Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Referensi EU, maka diperoleh Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun Tahun 2021, yaitu dengan nilai indeks 94.19 dan diklasifikasikan sebagai standard memenuhi baku mutu kualitas udara ambein.

Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder. Nilai indeks didapatkan dengan formula:



$$ITH = \frac{LTH}{LW}$$

Dimana :

ITH = Indeks Tutupan Hutan

LTH = Luas Tutupan ber-Hutan

LW = Luas Wilayah

Dengan demikian, perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30% berdasarkan UU 41/99 Kehutanan. Sebagai angka idealnya diambil 84,3%, yaitu luas tutupan hutan Papua pada tahun 1982. Dalam konteks peng-indeksan 30% mendapat angka 50 sedangkan angka ideal maksimal, 100 adalah ketika 84,3%.

Dari uraian tersebut diatas selanjutnya maka diperoleh rumusan/formula dari perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lahan (IKL)	=	$100 - (84,3 - (LTH/LW - DKK) \times 100) \times 50/54,4$
-----------------------------	---	---

Selanjutnya penentuan kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.83
PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN

NO	KATEGORI	ANGKA RENTANG
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Tahun 2021



Hasil dari pengukuran Indeks Tutupan Hutan/Lahan di Kabupaten Karimun Tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.84
PERHITUNGAN HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LAHAN TAHUN 2021

NO	JENIS IKL	NILAI
1	Luas Wilayah (Ha)	92130.82
2	Luas Hutan (Ha)	17013.24
3	Luas Belukar dalam Kawasan Hutan (Ha)	7660.30
4	Luas Belukar pada Fungsi Lindung (Ha)	1243.51
5	Kebun Raya data LIPI (Ha)	0.00
6	RTH data Cipta Karya + DLH Prov (Ha)	17.63
7	Taman Kehati (Ha)	0.00
8	RHL	605.24
9	DKK	0.000912080045499409
Luas Tutupan Lahan		26539.92
Luas Wilayah		92130.82
Tutupan Lahan (TL)		0.288067799
Indek Kualitas Lahan (IKL) Kab. Karimun 2021		48.81728536

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Karimun pada Tahun 2021 adalah **48,82** dengan klasifikasi kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih kurang. Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun Tahun 2021 maka direkomendasikan program/kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk memenuhi klasifikasi kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya indikator yang mendukung sasaran ini adalah **Nilai Adipura**. Target yang ditetapkan tahun 2021 dengan nilai > 75 dengan realisasi target menggunakan realisasi tahun 2018 dengan capaian sebesar 94,20%.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang telah memperoleh penghargaan adipura sebanyak 3 (tiga)



kali dalam Tahun 2016 dan 2017 dan 2018, dimana kriteria penilaian adipura merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Namun selama Tahun 2019 s/d 2021 Pelaksanaan Program Adipura yang dilakukan melalui beberapa kali pemantauan, tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.275/PSLB3/PS/PLB.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Kegiatan Adipura dan sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.95/PSLB3/PS/PLB.0/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penghargaan Adipura, serta memperhatikan perkembangan situasi wabah pandemi COVID-19. Penjelasan dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura Tahun 2019 yang akan dilakukan pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada bulan Juni 2020 ditunda pada waktu yang akan ditentukan.
2. Mengingat saat ini pemerintah daerah masih fokus pada penanganan wabah pandemi COVID-19, maka kegiatan pemantauan dan verifikasi lapangan untuk Adipura tahun 2020 untuk sementara ditunda.
3. Namun demikian dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di daerah dan menjaga keberlangsungan ketersediaan data pengelolaan sampah yang akurat, maka KLHK akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara intensif yang didasarkan pada laporan capaian kinerja pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, setiap daerah harus tetap menyampaikan laporan capaian kinerja pengelolaan



sampah tahun 2019 dan tahun 2020 beserta data-data lain terkait kegiatan Adipura.

4. Kepala daerah harus memastikan agar pencegahan wabah pandemi COVID-19 yang bersumber dari limbah medis dan sampah rumah tangga dapat terkontrol dan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya diharapkan saudara dapat mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksus (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19.

Indikator yang mendukung sasaran ini adalah luas ruang terbuka hijau dengan target sebesar 191,12 Ha. Untuk relasiasi target kami menggunakan realisasi 2 tahun sebelumnya hal tersebut disebabkan luas ruang terbuka hijau yang ditangani oleh Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan kebersihan hanya berupa pemeliharaan saja, tidak ada penambahan luas RTH. Pemeliharaan dilakukan pada Gedung Perkantoran poros, Pertamanan, TPU dan TPBU dll. Pada tahun 2017 sudah ditetapkan RTH seluas 952,79 Ha. Adapun data tentang luas terbuka hijau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.86
RUANG TERBUKA HIJAU WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017

NO.	JENIS RTH	LUAS RTH (HA)	% RTH	PENGENG OLA	KONDISI	VEGETASI UTAMA	PERDA/SK YG MENGATUR
01.	HUTAN KOTA	14,316	0,256	Pemkab. Karimun	Sedang	Ketapang, Kencana, Beringin, Trembesi, Pucuk Merah.	SK. BUPATI KARIMUN No. 23 Tahun 2007 tanggal 13 Februari 2007 tentang Penetapan Hutan Kota SK. BUPATI KARIMUN No. 220 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Penunjukan Lokasi dan Luas Hutan Kota di kabupaten Karimun
	1. JALAN TENGGU UMAR	0,736					
	2. CANGGAI PUTRI	7,58					
	3. PERKANTORAN	6,00					
02.	TAMAN KOTA	7,21	0,246	Pemkab. Karimun	Baik	Baik	- PERBUP NO. 21 / 2014 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Koridor Jalan Poros dan Kawasan Sempadan Kolong - PERBUP NO. 08 / 2013 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir
	1. RSUD	2,36					
	2. COASTAL	4,85					
03.	TPU	152,49	2,725	Pemkab. Karimun	Baik	-	SK BUPATI KARIMUN 158.A Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Taman Kota
	1. P. KARIMUN	61,97					
	2. P. KUNDUR	79,31					
	3. DURAI	6,9					
	4. MORO	0,91					
	5. BURU	3,31					
04.	S. DANAU	766,77	13,702	Pemkab. Karimun	Sedang	Pulai, Palembang, Kencana, Beringin, Trembesi, Pucuk Merah.	PERBUP NO. 21 / 2014 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Koridor Jalan Poros dan Kawasan Sempadan Kolong
	1. P. KARIMUN	148,09					
	2. P. KUNDUR	170,73					
	3. MORO	447,95					
05.	SAR.OLAHRAGA	12,0	0,214	Pemkab. Karimun	Baik	Idem.	
TOTAL		952,79	17,03				

Sumber : Dinas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



Pada tabel diatas (*Tabel Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Kabupaten Karimun Tahun 2017 Dinas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan*) dijelaskan bahwa total Luas RTH (ruang terbuka hijau) di Kabupaten Karimun sebesar 952,79 Ha.

Luas kawasan yang dilindungi dari bahaya banjir (ha) dan Panjang target garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi (km). Bencana banjir sudah lama menjadi agenda tahunan di Kabupaten Karimun. Jenis bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Karimun adalah bencana banjir. Bencana banjir yang diukur merupakan lokasi dengan luas kawasan yang sering mengalami atau terjadi banjir dan kawasan yang berpotensi terjadinya banjir berdasarkan pemetaan yang disurvei ke lapangan.

Masalah banjir selalu menjadi masalah yang sering terjadi di Kabupaten Karimun. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan dan akibat pasang besar yang sering disebut dengan pasang keling. Hujan turun beberapa hari berturut-turut, hampir selalu mendatangkan banjir di beberapa wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Karimun, seperti Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat, Tebing, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Buru, Moro, Durai, Ungar dan Belat.

Ancaman banjir memang selalu menjadi momok pada setiap awal dan akhir tahun bagi warga Kabupaten Karimun. Banjir tersebut sudah terjadi selama berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun, namun problematika banjir ini sepertinya masih sulit untuk diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pemda Kabupaten Karimun sebenarnya telah lama berupaya untuk mengatasi problematika banjir ini. Berbagai upaya dan solusi penanggulangan banjir telah dilakukan. Namun harus diakui, jika upaya yang dilakukan tersebut belum mampu untuk mengatasi musibah banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Karimun, baik serangan banjir karena intensitas hujan lokal yang tinggi, maupun ancaman gelombang pasang air laut yang selalu naik turun.



Mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Karimun ini tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan banyak sekali faktor yang menjadi penyebab musibah ini. Salah satu yang mendasar untuk di Pulau Karimun adalah permasalahan sampah. Masih kurangnya kesadaran penduduk dalam membuang sampah pada tempatnya, yang lebih banyak membuang ke saluran-saluran air, ke laut dan juga sungai-sungai yang melintas di permukiman warga, seperti Sungai Teluk Air, Sungai Ayam, Sungai Raya, Sungai Poros – Sei Raya, Sungai Paya Rengas dan Sungai Parit Lapis. Tumpukan sampah-sampah inilah yang paling sering memacetkan aliran air drainase, sehingga banjir menjadi tak terelakkan. Hasil survey ke lapangan hampir 70% drainase di Pulau Karimun tidak berjalan baik karena permasalahan sedimentasi, penyumbatan dan mampet.

Penyebab lain dari banjir ini adalah kenaikan debit air laut. Kenaikan air laut yang diikuti oleh angin yang cukup kencang, seringkali pula menimbulkan banjir rob, orang tempatan sering menyebutnya dengan pasang keling, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Karimun, antara lain : Kecamatan Karimun (Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Baran, Desa Parit dan Desa Tulang), Kecamatan Buru (Kawasan Perkotaan/Kelurahan Buru, Kelurahan Lubuk Puding, Desa Tanjung Hutan dan Desa Tanjung Batu Kecil), Kecamatan Kundur (Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Desa Sei Sebesi, dan Desa Sei Ungar), Kecamatan Kundur Utara (Desa Sei Ungar Utara dan Desa Teluk Radang), Kecamatan Kundur Barat (Desa Sawang Laut, Desa Sawang Selatan dan Desa Gemuruh), Kecamatan Ungar (Desa Alai, Desa Batu Limau, Desa Ngal, Desa Sungai Buluh), Kecamatan Moro (Kelurahan Moro, Kelurahan Moro Timur, Desa Jang dan Desa Selat Mie), Kecamatan Durai (Desa Durai, Desa Tanjung Kilang dan Desa Semembang) dan Kecamatan Belat (Desa Sei Asam, Desa Sebele, Desa Penarah, Desa Lebu, Desa Degong dan Desa Tebias), Hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun.



Yang lebih parahnya, daerah-daerah di hilir sungai yang memang sudah dari alam menyediakan bentuk dan ukuran sungai yang berkelok-kelok sesuai dengan kearifan lokal, dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga air laut dengan mudah untuk menggapai daratan, sehingga terjadilah banjir besar di beberapa wilayah.

Begitu Kompleknya penyebab banjir di Kabupaten Karimun di atas, membuat Pemda Kabupaten Karimun terus berbenah dan berupaya mencari solusi terbaik guna mengurangi persoalan banjir ini. Berikut Luas Area Penanganan Banjir yang telah dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Karimun tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel 3.87 di bawah ini :

Tabel 3.87
LUAS AREA PENANGANAN BANJIR DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2018 - 2020

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS PENANGANAN BANJIR (Ha)		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Kecamatan Karimun	13.00	13.37	13.42
2	Kecamatan Meral	38.00	38.05	38.38
3	Kecamatan Meral Barat	29.00	29.09	30.82
4	Kecamatan Tebing	25.00	25.02	25.59
5	Kecamatan Kundur	84.00	84.12	87.21
6	Kecamatan Kundur Barat	63.00	63.16	68.56
7	Kecamatan Kundur Utara	69.00	69.00	74.02
8	Kecamatan Buru	17.00	17.33	23.17
9	Kecamatan Moro	46.00	46.00	47.23
10	Kecamatan Durai	19.00	19.00	19.38
11	Kecamatan Ungar	10.00	10.27	11.68
12	Kecamatan Belat	11.00	11.00	12.05
TOTAL LUAS KAWASAN YANG DILINDUNGI DARI BAHAYA BANJIR		424 Ha	425,40 Ha	451,50 Ha

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karimun

Dari tabel di atas dapat dilihat dari target luas daerah rawan bencana yang ditangani pada tahun 2020 seluas 451,50 Ha, yaitu



penanganan banjir di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Karimun. Hal ini tentu berkat komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menangani masalah banjir yang ada di Kabupaten Karimun, tapi kalau dilihat dari letak dan kondisi kabupaten karimun terdapat masih banyak titik rawan banjir yang belum tertangani dan terlindungi. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menangani daerah rawan bencana, yang dalam pengukuran ini yaitu luas daerah rawan banjir yang terlindungi.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam penanganan daerah rawan banjir tersebut adalah adanya beberapa program terkait infrastruktur banjir mulai dari pembangunan dan pembersihan saluran air (drainase), pelebaran gorong-gorong, pembangunan Box Culvert, Pembangunan dan Rehabilitasi Tanggul dan pintu air, Pembangunan Turap Beton, Normalisasi sungai hingga pembangunan Resettlement (Penampungan air sementara).

14. SASARAN MENINGKATNYA AKTIVITAS –AKTIVITAS KEAGAMAAN

Meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama serta kerukunan beragama antar umat merupakan strategi sasaran ke empat belas yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2022. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.88
EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 14

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Jumlah calon jamaah haji yang mendaftar	550 Orang 800 (**)	794 (**)	99,25%
2. Jumlah Muzaki	1.250 Orang	783 orang	63 %
Rata-Rata Tingkat Capaian			81,125%

Catatan:

- ✓ Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa evaluasi capaian kinerja terhadap indikator sasaran berupa Jumlah Jemaah Haji yang mendaftar dalam rangka meningkatkan aktivitas



Perhitungan target dan realisasi indikator di atas merupakan akumulasi tahun tahun sebelumnya.

- ✓ Target dan realisasi indikator yang digunakan (**) di sesuaikan dengan target dan realisasi kinerja OPD.

Aktivitas -aktivitas keagamaan melalui upaya memaksimal pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji dari program tersebut mencapai angka 99,25% yang bermakna baik, namun hal kondisi tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Penurunan persentase pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi akibat dari pandemi wabah Covid-19 yang masih melanda seluruh dunia yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Tabel 3.89
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN JUMLAH JAMAAH HAJI YANG MENDAFTAR SERTA YANG DIBERANGKATKAN

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Jumlah Yang Mendaftar			Jumlah yang diberangkatkan
		Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Jamaah Haji Yang Mendaftar	2021	800	794	99,25%	0
	2020	550	755	137,27 %	0
	2019	584	487	83%	173
	2018	180	473	262%	203
	2017	300	387	205%	189
	2016	300	296	98%	128

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2021

Tabel diatas menyajikan perbandingan data tahun tahun sebelumnya. Jika dilihat dua tahun terakhir yaitu di tahun 2020 dan 2021 masih terdapat jumlah jamaah haji yang mendaftar namun tidak terdapat jamaah haji yang di berangkatkan, hal ini terjadi karena dampak dari wabah covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia sehingga Pemerintah Arab Saudi tidak membuka pelaksanaan ibadah haji dari berbagai negara di berbagai belahan dunia dan salah satunya jamaah calon haji dari Indonesia.



Capaian atau realisasi jumlah calon jamaah haji yang mendaftar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 angka realisasinya mengalami kenaikan yang signifikan, tahun 2017 sebanyak 91 orang, tahun 2018 sebanyak 86 orang, tahun 2019 sebanyak 14 orang, tahun 2020 sebanyak 268 orang, dan tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebanyak 39 orang, artinya terdapat kenaikan jumlah calon jamaah haji yang mendaftar selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan mengalami penurunan yang sangat drastis 2 (dua) tahun terakhir ini yaitu di tahun 2020 dan 2021, hal ini terjadi karena adanya wabah covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

Tabel 3.90
DATA KUOTA CALON JEMAAH HAJI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KAB/KOTA	WT LIST															
		JUMLAH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	BATAM	7,498	352	504	502	428	425	467	504	580	547	549	602	595	584	606	325
2	TJ PINANG	2,513	163	145	163	216	247	180	182	129	148	177	156	153	177	191	86
3	KARIMUN	1,734	125	149	158	143	112	130	128	128	90	104	95	118	118	84	52
4	NATUNA	778	38	73	50	83	93	82	54	93	45	40	30	31	26	23	17
5	LINGGA	479	51	31	35	32	23	42	34	43	51	44	29	23	15	9	17
6	BINTAN	759	33	49	44	52	66	54	60	44	74	60	38	25	49	61	30
7	ANAMBAS	348	26	33	32	30	18	29	22	39	29	10	34	19	15	10	2
JUMLAH TOTAL		14,109	788	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	529
NOMOR			1049	9565	10610	11647	12691	13730	14749	15760	16773	17779	18790	19785	20772	21736	22726
PORSI BERANGKAT			9564	10609	11646	12690	13729	14748	15759	16772	17778	18789	19784	20771	21735	22725	

Sumber : Siskohat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat daftar kuota Jemaah Haji Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendaftar dan jumlah jemaah haji yang akan berangkat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030.

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut diatas adalah selain dapat memberikan fasilitasi dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Karimun serta dapat menyemarakkan aktivitas-aktivitas keagamaan untuk tumbuh subur dan berkembang di Kabupaten



Karimun. Hal itu tentunya dapat memperkokoh sandaran vertikal kepada sang Pencipta, menjalin silaturahmi, sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya indikator yang mendukung sasaran ini adalah **jumlah muzaki**. Di Kabupaten Karimun dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 jumlah muzaki sebanyak 1.250 orang, adapun jumlah muzaki pada setiap bulannya adalah orang yang sama walaupun jumlahnya berbeda. Untuk dapat mengukur nilai rata-rata capaian target dari jumlah yang berbeda pada setiap bulannya dapat dirumuskan jumlah muzaki Kabupaten Karimun selama 1 tahun dibagi 12.

Tabel 3.91
Jumlah Muzaki di Kabupaten Karimun Januari – Desember 2021

NO	Bulan	Jumlah Muzakki (Orang)
1	Januari	730
2	Februari	740
3	Maret	745
4	April	724
5	Mei	923
6	Juni	835
7	Juli	855
8	Agustus	731
9	September	996
10	Oktober	659
11	Nopember	733
12	Desember	714
TOTAL		9385
NILAI RATA-RATA PERBULAN		782

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Selanjutnya indikator yang mendukung sasaran ini adalah **jumlah muzaki**. Di Kabupaten Karimun dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 jumlah muzaki sebanyak 782 orang, adapun jumlah muzaki pada setiap bulannya adalah orang yang sama walaupun



jumlahnya berbeda. Untuk dapat mengukur nilai rata-rata capaian target dari jumlah yang berbeda pada setiap bulanya dapat dirumuskan jumlah muzaki Kabupaten Karimun selama 1 tahun dibagi 12.

Tabel 3.92
JUMLAH MUZAKI, PENERIMAAN ZAKAT MAAL, PROFESI DAN INFAQ
KABUPATEN KARIMUN 2015-2020

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Muzaki
1.	2016	1.789.902.948	8900 Orang
2.	2017	2.157.143.081	7529 Orang
3.	2018	2.868.376.985	6618 Orang
4.	2019	4.060.453.327	13373 Orang
5.	2020	7.613.102.679	9589 Orang
6.	2021	2.389.383.215	9385 Orang

Sumber : *Bagian Kesra Setda Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat diuraikan jumlah muzaki di tahun 2017 mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut bukan adanya penurunan jumlah muzaki yang berzakat tetapi disebabkan banyaknya muzaki yang terdaftar ganda dan telah dilakukan pendataan kembali oleh BAZNAS Kabupaten Karimun dengan system yang jauh lebih baik.

Walaupun jumlah muzaki mangalami penurunan dari tahun 2017-2018, namun untuk jumlah penerimaan zakat maal, profesi dan infaq mengalami kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya rata-rata 75%, pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, hal ini terjadi karena semakin membaiknya sistem pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Karimun. Dan ini juga membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sangat tinggi.

Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan Zakat ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Karimun adalah dalam bentuk dukungan



pembiayaan untuk operasional BAZNAS Kabupaten Karimun sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat di Kabupaten Karimun yang menaungi BAZNAS di Tingkat Kecamatan dan UPZ –UPZ baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. Selain itu sebagai bentuk upaya Pengawasan dari Pemerintah dalam pengelolaan Zakat di Kabupaten Karimun, Pemerintah termasuk dalam kepanitian BAZNAS Kabupaten yakni baik kedudukannya sebagai Pembina dan Pengawas maupun sebagai anggota yang berasal dari beberapa unsur Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, Pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan sosialisasi berupa Himbauan “Gerakan Sadar Zakat” yang pada tahap awal baru dilakukan dilingkungan Pegawai Pemerintah Daerah. Himbauan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menggalang zakat dikalangan Pegawainya terlebih dahulu. Sebagai aplikasi dari terlaksananya Himbauan Pemerintah mengenai “Gerakan Sadar Zakat” di lingkungan Pegawai Pemerintah Daerah adalah terkumpulnya Zakat Profesi dari Pegawai yang dikumpulkan melalui Bendahara masing-masing OPD berupa pemotongan 2,5 % dari penghasilan yang dipungut setiap bulannya berdasarkan kesadaran dan keikhlasan masing-masing individu.

15. SASARAN MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan merupakan strategi sasaran keenam belas yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2020. Adapun rata-rata capaian dari indikator sasaran Bagian Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.93 berikut ini :



Tabel 3.93
CAPAIAN INDIKATOR

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Akuntabilitas	73	72.08	98,74 %
2.	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				99,37 %

Tabel 3.93 di atas diambil dari penilaian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 nilainya belum keluar masih dalam proses, tingkat capaian dari indikator Indek Akuntabilitas ini adalah sebesar 99,37 %. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat capaian yang diperoleh adalah baik dari target yang ditentukan. Berikut penjelasan tingkat capaian dari indikator sasaran ini .

Berdasarkan tabel 3.93 diatas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan untuk Indikator Indeks Akuntabilitas pada target sasaran ini adalah 73 dengan realisasi sebesar 72,08 atau predikat BB. Dari realisasi predikat, dan di dukung dari beberapa OPD yang mempunyai nilai masing masing dalam menjalankan Akuntabilitasnya yaitu dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hasil capaian ini menunjukkan tingkat capaian yang diperoleh dari target yang ditentukan adalah baik. Berikut penjelasan dari hasil capaian indikator ini.

Indeks akuntabilitas adalah salah satu indikator sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ini merupakan suatu alat untuk memberikan penilaian secara kuantitatif kepada entitas yang diperiksa. Penilaian atas Indeks Akuntabilitas ini akan bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi atas kinerja sistem pelayanan publik.

Dasar hukum pelaksanaan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan



Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2020 yang mempunyai tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun rincian penilaian komponen dari Indeks Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.94
RINCIAN PENILAIAN KOMPONEN INDEKS AKUNTABILITAS PEMERINTAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 DAN 2020

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,84	23,83
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,42	17,30
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,54	11,32
d.	Evaluasi Internal	10	7,98	7,50
e.	Capaian Kinerja	20	12,44	12,13
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,22	72,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel 3.94 diatas dapat dilihat bahwa total komponen indeks akuntabilitas tahun 2020 menurun dibanding total komponen indeks akuntabilitas tahun 2019 dengan penurunan sebesar 1,14. Berikut



kenaikan dari masing-masing komponen indeks akuntabilitas tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 3.95 dibawah ini :

Tabel 3.95
KENAIKAN NILAI MASING-MASING KOMPONEN INDEKS AKUNTABILITAS
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019-2020

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	2019	2020	TURUN	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,84	23,83	0,01	0,99
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,42	17,30	0,12	0,99
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,54	11,32	0,22	0,98
4.	Evaluasi Internal	10	7,98	7,50	0,48	0,94
5.	Capaian Kinerja	20	12,44	12,13	0,31	0,97
JUMLAH TOTAL		100	73,22	72,08	1,44	0,98

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Dari capaian nilai indeks akuntabilitas pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa dari masing-masing komponen indeks akuntabilitas mengalami penurunan, hanya satu nilai komponen yang mengalami penurunan cukup besar terdapat pada komponen Evaluasi Internal sebesar 0,48 atau 0,93% dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,98. di samping itu juga pemerintah Kabupaten Karimun berupaya meningkatkan kapasitas perencanaan di seluruh OPD dan melakukan Reviu perencanaan dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja yang bermanfaat langsung kepada masyarakat serta kualitas indikator kinerja dan keterpaduan perencanaan kinerja. Mendorong penerapan budaya kinerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Karimun dengan menyusun indikator kinerja individu yang lebih baik serta sejalan dengan kinerja organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK akan



memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Laporan Operasional,
4. Neraca,
5. Laporan Perubahan Ekuitas,
6. Laporan Arus Kas,
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Indikator untuk mendukung sasaran ini adalah Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana untuk menyatakan suatu opini atas Laporan keuangan berdasarkan Pemeriksaan BPK, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu standard yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan berbasis akrual telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang bebas dari salah saji material. Target yang akan ditetapkan pada tahun 2021 adalah WTP . Sampai dengan berakhirnya laporan kinerja Pemerintah Daerah disajikan diketahui bahwa Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 belum diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Dengan ini realisasi target tahun 2021 kami menggunakan data tahun sebelumnya (tahun 2020) yaitu WTP .

Menurut Opini BPK, Laporan keuangan yang tersebut diatas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Tabel 3.96
OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KARIMUN TAHUN 2011-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
2012	WTP	WTP	LHP No : 4.A/LHP/XIII/TJP/05/2013
2013	WTP	WTP	LHP No : 6.A/LHP/XVIII/TJP/05/2014
2014	WTP	WTP	LHP No : 05.A/LHP/XVIII/TJP/05/2015
2015	WTP	WTP	LHP No : 07.A/LHP/XVIII/TJP/05/2016
2016	WTP	WTP	LHP No : 05.A/LHP/XVIII/TJP/05/2017
2017	WTP	WTP	LHP No : 12.A/LHP/XVIII.TJP/05/2018
2018	WTP	WTP	LHP No : 14.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019
2020	WTP	WTP	LHP No : B2.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019
2021	WTP	WTP	LHP No : 81.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Efisiensi sumber daya ditahun 2021 yang dilakukan melalui beberapa program kegiatan sebagai pendukung indiaktor kinerja ini antara lain :

Tabel 3.97
PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI PENDUKUNG INDIKTOR KINERJA TAHUN 2020
DAN 2021

Program/ Kegiatan	2020		2021	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Program Evaluasi dan pelaporan				
i. Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah.	Rp. 118.000.000	Rp. 117.902.600	-	-
ii. Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi Belanja Daerah.	Rp. 125.781.000	Rp. 124.818.500	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun	Rp. 273.207.000	Rp. 270.751.773	-	-



Anggaran 2019.				
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Prognosis dan Sinkronisasi, Verifikasi Saldo Awal Tahun Anggaran 2020.	Rp. 73.619.000	Rp. 73.536.700	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban.	-	-	Rp. 116.300.450	Rp. 102.493.950
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	-	-	Rp.104.042.950	Rp. 99.652.450
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	-	-	Rp. 154.924.900	Rp. 152.505.100
4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota.	-	-	Rp. 72.888.170	Rp. 71.706.170

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat efisiensi pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 590.607.000,00 dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp. 587.036.547,00 (99.40%). berbanding tahun sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp. 448.156.470,00 dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 426.357.670,00 (95.14%).

16. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dimana peran pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kemudahan dalam mengakses pelayanan publik dimana hal ini merupakan sasaran ke tujuh belas yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2021 dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun target realisasi serta capaian dari indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.98
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 16

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	>3,5	3,49	99,71%
RATA - RATA CAPAIAN				99,71 %

Berdasarkan dari tabel di atas rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar **99,71%** atau bermakna Sangat baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Dalam pencapaian indikator ini dibagi atas tiga unsur pelayanan yaitu bidang kesehatan, perizinan dan pelayanan kependudukan. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah. Tahun 2021 **Indeks Kepuasan Masyarakat** yang merupakan indikator keberhasilan mendukung sasaran ini menetapkan target > 3,5 atau dengan katagori baik. Tahun 2021 realisasi target sebesar 3,49 atau capaian 99,71%. Berdasarkan perhitungan Nilai Interval Konvensi 62,51 – 81,25 dengan simpulan bahwa mutu pelayanan B dengan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Dengan rekapan perhitungan perizinan (83,98) + Kependudukan (80,75) + Kesehatan (81,86) dengan total Nilai Interval rata-rata sebesar 82,19 atau > 3. Sedangkan untuk realisasi indeks kepuasan perhitungan perizinan (3,98) + Kependudukan (3,23) + Kesehatan (3,27) dengan total Nilai Indeks Kepuasan sebesar 3,26 dengan perhitungan Nilai Interval Konvensi 3,26 - 4,00 dengan simpulan bahwa mutu pelayanan **A** dengan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik** Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai indeks mengalami kenaikan, ketiga indek pelayanan



tersebut akan dijelaskan pada masing – masing pelayanan di bawah ini. nilai IKM dihitung dengan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 12 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Untuk pencapaian indikator ini dibagi atas tiga unsur pelayanan yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan dan pelayanan perizinan. Berdasarkan dari tabel 3.104 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 99,71 % atau bermakna baik sekali dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun nilai persepsi, interval IKM, intervalkonversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.99 di bawah ini :

Tabel 3.99
NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM,
MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Berkenaan dengan data hasil survei IKM bahwa salah satu indikator yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Kabupaten Karimun. Adapun capaian dari IKM pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.100
CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA RSUD MUHAMMAD SANI
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 DAN 2021

No	Tahun	Triwulan	Target	Realisasi	Hasil
1	2020	I	>3,2	3,23	Mencapai Target
		II	>3,2	3,30	Mencapai Target
2	2021	I	>3,2	3,38	Mencapai Target
		II	>3,2	3,44	Mencapai Target

Sumber : RSUD M. Sani Kabupaten Karimun, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKM dalam pelayanan kesehatan pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun tahun 2021 adalah senilai 3,44 atau dengan capaian sebesar 107.5 %. Dari hasil capaian yang diperoleh menjelaskan bahwa realisasi dari target yang ditentukan bermakna sangat baik. Dengan Peningkatan beberapa sarana pelayanan terutama pada antrian dan digitalisasi diagnosis kami mendapat peningkatan kepuasan pelanggan disbanding tahun sebelumnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada RSUD Muhammad Sani yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani diperoleh dengan melakukan survey kepuasan masyarakat dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait 9 (sembilan) unsur pelayanan terhadap 380 orang responden dari berbagai kareteristik umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan status sosialsehingga akan memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegawai RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun terhadap masyarakat. Adapun hasil survey kepuasan masyarakat dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang 9 (sembilan) unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya dengan nilai sebesar 3.36. Unsur ini disimpulkan



mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532.

2. Prosedur Pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan, dengan nilai 3.43. Unsur ini disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532
3. Waktu Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.26 dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532
4. Biaya Tarif, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.62 dan disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.5324 – 4.00
5. Produk spesifikasi pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan kepada *customer*. Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.37 dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.45 dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532
7. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.44 dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532
8. Sarana dan Prasarana, yaitu Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama



terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.36 dan disimpulkan mempunyai kinerja baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.0644 – 3.532.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tentang tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit pelayanan. Unsur ini mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.64 dan disimpulkan mempunyai kinerja sangat baik karena berada diantara nilai interval IKM 3.5324 – 4.00.

Hasil survey kepuasan masyarakat tersebut diatas dituangkan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.101
IKM BERDASARKAN 9 UNSUR PELAYANAN PADA RSUD MUHAMMAD SANI
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO	VARIABEL	TAHUN 2021		
		NILAI	KONVERSI	KATEGORI
1	Persyaratan Pelayanan	3,36	83.95	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,43	85.86	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,26	81.38	Baik
4	Biaya/Tarif	3,62	90.46	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	3,37	84.28	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,45	86.32	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,44	86.12	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,36	83.95	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,64	91.05	Sangat Baik
NILAI RATA-RATA TERTIMBANG DAN KONVERSI INTERVAL RATA-RATA		3,44	85.93	BAIK

Sumber : RSUD M. Sani Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Berdasarkan hasil survei IKM di Pelayanan Rawat Jalan RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun tahun 2021 diperoleh IKM unit pelayanan sebesar 85.93 dengan mutu pelayanan B dan baik, karena berada di nilai interval konversi IKM 76.61 – 88.30. Dari 9 unsur variabel yang dinilai, unsur waktu pelayanan mendapatkan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 3.26. dan unsur penanganan pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3.64.



Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, adapun realisasi dan capaian yang mendukung sasaran 16 (enam belas) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.102 dibawah ini:

Tabel 3.102**DATA REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 16 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021**

	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	>3,5	3,23	92,28 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan kependudukan didapat dengan hasil capaian sebesar 92,28 %. Hasil ini menggambarkan bahwa realisasi capaian yang didapat bermakna baik sekali dengan capaian 92,28 %. Pencapaian realisasi nilai IKM ini didapat dengan melakukan survey kepuasan masyarakat dengan cara memberikan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jasa layanan. Adapun kuesioner yang diberikan adalah berisi pertanyaan yang terkait 9 (unsur) pelayanan dengan hasil kuesioner dari masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.103 dibawah ini :

Tabel 3.103**HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN MASING-MASING UNSUR PELAYANAN PADA DISDUKCAPIL KAB. KARIMUN TAHUN 2021**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Prosedur Pelayanan	3,1
U2	Persyaratan Pelayanan	3,23
U3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,24
U4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,23
U5	Tanggungjawab Petugas Pelayanan	3,28
U6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,27
U7	Kecepatan Pelayanan	3,16
U8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,24
U9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,26
U10	Kepastian Jadwal Pelayanan	3,22
U11	Kenyamanan Lingkungan	3,26
U12	Keamanan Pelayanan	3,25
JUMLAH		38,85
RERATA UNSUR		3,23
IKM UNIT PELAYANAN		80,75

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Karimun, Tahun 2021



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IKM Unit Pelayanan adalah sebesar 80,75 yang berada pada interval 62,51-81,25. Nilai ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Kependudukan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun adalah B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun adalah baik. Dari kedua belas unsur pelayanan tersebut terdapat 1 (satu) unsur pelayanan dengan nilai rata-rata sebesar 3,28 yaitu unsur “Tanggungjawab Petugas Pelayanan” yang berada pada interval 3,26-4,00 yang bermakna sangat baik. Hal ini menunjukkan selain dari sebelas unsur pelayanan yang memberikan nilai baik, bahwa kemampuan dari petugas pelayanan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuannya.

Adapun nilai interval kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.104
Data Interval Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Dari segi lama waktu pelayanan menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu pelayanan dalam hal kependudukan di Kabupaten Karimun menunjukkan nilai baik. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.105
CAPAIAN RATA-RATA LAMA WAKTU PELAYANAN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Rata –rata lama waktu pelayanan	5 hari	3 hari	166.66%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM dalam hal pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang bernilai baik didukung pula dengan rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan dengan realisasi selama 3 (Tiga) hari dari target yang telah ditentukan selama 5 (lima) hari.

Dari realisasi rata-rata lama waktu pelayanan Kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun selama 3 (tiga) hari, berdasarkan nilai interval lama pelayanan berada pada interval 2-5. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan berdasarkan rata-rata lama waktu pelayanan adalah baik dengan kinerja unit pelayanan baik. Adapun interval nilai kinerja unit pelayanan berdasarkan lama waktu pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.106
INTERVAL NILAI KINERJA UNIT PELAYANAN BERDASARKAN LAMA WAKTU PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL LAMA PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	0-1	A	Sangat Baik
2	2-5	B	Baik
3	6-14	C	Kurang Baik
4	> 15	D	Tidak Baik

Tabel 3.107
CAPAIAN RATA-RATA LAMA PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NOMOR	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET (HARI)	RATA-RATA LAMA PELAYANAN (HARI)	CAPAIAN (%)
1	Akta Kelahiran	5	3	166.66%
2	Akta Perkawinan	5	3	166.66%
3	Akta Perceraian	5	3	166.66%
4	Akta Kematian	2	3	66.66%
5	Akta Pengesahan Anak	5	3	166.66%
6	Kartu Keluarga	5	3	166.66%
JUMLAH	1+2+3+4+5+6		18	899.96
RATA-RATA	(1+2+3+4+5+6)/6		3	149.99



Baiknya pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun serta pengawasan dari masyarakat. Semakin ketatnya aturan yang mewajibkan seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat membuat aparatur semakin sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Agar kualitas pelayanan bisa tetap terjaga atau agar lebih baik lagi, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan (reward) bagi aparatur pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan maksud agar dapat diketahui perkembangan nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan” dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.108****INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	> 3,00	3.49	116 %

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun menggunakan kuesioner yang memuat pernyataan dan pertanyaan tentang kondisi pelayanan yang diberikan. Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, kuesioner yang ditanyakan kepada masyarakat pengguna layanan perizinan terdiri dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun respondennya adalah masyarakat yang telah memperoleh layanan dokumen perizinan dan non perizinan. Responden terbagi ke dalam karakteristik, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama.

Hasil dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Tabel 3.109**JAWABAN RESPONDEN PER UNSUR PELAYANAN**

Nilai Unsur	Jawaban Responden Per Unsur Pelayanan (Orang)								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	14	10	8	1	2	1	2	0	2
2	20	20	9	1	3	12	14	9	5
3	145	158	143	42	151	134	136	106	91
4	85	76	84	248	108	117	112	149	166
Jumlah	264	264	264	264	264	264	264	264	264



Tabel 3.110
CAPAIAN UNSUR PELAYANAN

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Prosedur	3.14
2	Persyaratan	3.14
3	Waktu Penyelesaian	3.15
4	Biaya / Tarif	3.93
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.38
6	Kompetensi Pelaksana	3.39
7	Maklumat Pelayanan	3.36
8	Perilaku Pelaksana	3.53
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.59

Sumber : Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Sembilan unsur pelayanan yang di ajukan (U1 s.d U9), seperti tahun tahun sebelumnya nilai unsur U4 (unsur biaya tarif) masih tetap mendapatkan nilai tertinggi (3.93) ini menunjukkan bahwa pemohon atau penerima layanan mengetahui dengan pasti bahwa pengurusan pelayanan perizinan tidak di pungut biaya apapun (terkecuali pungutan retribusi yang diatur oleh Peraturan), sedangkan nilai terendah masih pada nilai unsur U2 (persyaratan) dan U1 (Prosedur) dengan nilai NRR 3.14, persyaratan dan prosedur masih menjadi kendala dalam pengurusan izin, hal ini dikarenakan syarat yang harus dipenuhi baik persyaratan teknis maupun administratif dan masih kurangnya pemahaman pemohon dalam hal persyaratan. Selain hal tersebut kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku usaha terhadap sistem perizinan online (OSS RBA dan si cantik cloud). Untuk hal tersebut di lakukan rencana tindak lanjut yang dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel 3.111
RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN HASIL SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan terkait Aplikasi SiCantik Cloud	-	-	-	√	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melaksanakan inovasi pelayanan kepada pelaku usaha melalui pelayanan "PANTAU"	-	-	-	√	Sekretariat, Seluruh Bidang yang ada di DPMPSTP
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melaksanakan review sistem pelayanan yang merujuk pada PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS)	-	-	-	√	Sekretariat, Seluruh Bidang yang ada di DPMPSTP
4	Persyaratan	Mempublikasikan persyaratan dengan jenis layanannya melalui media <i>on line</i> (<i>Website, Twitter, FB, IG, WhatsApp</i>) dan media cetak (<i>leaflet, brosur, banner, baleho</i>)	-	-	-	√	Bidang Promosi dan Penanaman Modal
5	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan teknis bagi petugas pelayanan, seperti diklat tentang OSS dan SiCantik Cloud	√	-	-	-	Sekretariat, Seluruh Bidang yang ada di DPMPSTP
6	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pembinaan SDM pelaksana seperti kegiatan <i>Service Exellent</i>	√	-	-	-	Sekretariat, Seluruh Bidang yang ada di DPMPSTP
7	Sarana dan Prasarana	Menambah kapasitas jaringan dan komputer	-	-	-	√	Sekretariat DPMPSTP
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Program <i>Handling Complaint</i> dan Pengaduan Online	√	-	-	-	Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan

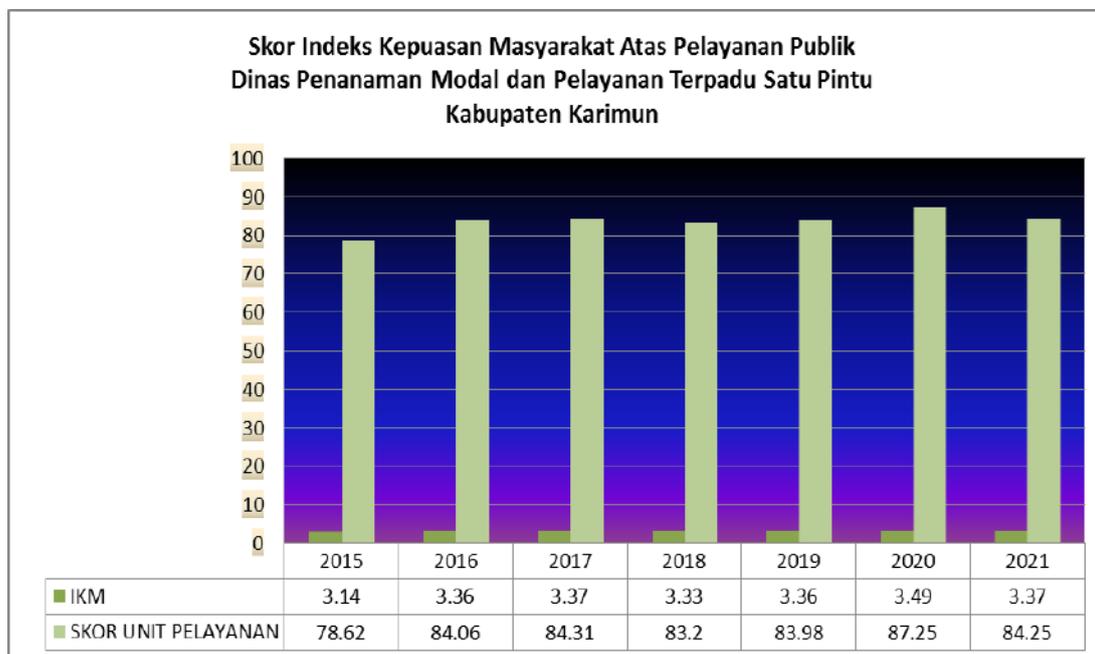


Tabel 3.112
NILAI IKM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN
KARIMUN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 DAN 2020,2021

UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Nilai Unsur	6694	6694	13540	10104	10592	5250	8080
IKM	3.14	3.36	3.37	3.33	3,36	3,49	3,37
SKOR UNIT PELAYANAN	78.62	84.06	84.31	83.20	83.98	87,25	84,25

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Kairmun, Tahun 2021

Grafik 3.28



Dari perhitungan terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dikategorikan baik hal ini dilihat dari nilai indeks yang di peroleh yaitu 3.37 dan hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 84,25 yang berarti masuk dalam kategori B (BAIK), sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :



Tabel 3.113
KATEGORISASI MUTU PELAYANAN

NILAI PESEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	KINERJA DPMPSTP
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	TARGET 3,00
2	2,60 – 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	REALISASI 3.36
3	3,06444 – 3,532	76,61-88,30	B	Baik	KINERJA PELAYANAN
4	3,5324 – 4,00	88,31-100	A	Sangat Baik	B (Baik)

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Analisis terkait dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Program Pelayanan Penanaman Modal Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan alokasi anggarannya nol rupiah. Walaupun tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini pendistribusian kuisioner tetap di sebar dan di jalankan karena Survei Kepuasan Masyarakat wajib untuk dilaksanakan.



Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan cara pelaksanaan pendistribusian kuisisioner yaitu penyebaran melalui loket-loket baik itu loket informasi (loket 1) maupun loket pendaftaran (loket 2) yang ada di *Front Office*. Untuk Loket Informasi dan loket pendaftaran pengisian kuisisioner dilakukan secara manual dengan memberikan lembaran kuisisioner dan untuk loket pengambilan izin (loket 4) pengisian kuisisioner dilakukan melalui *link* yang wajib untuk diisi oleh si pemohon izin, jika izin si pelaku usaha telah selesai. Tiap tahunnya untuk target responden survey sebanyak 300 responden, pada tahun 2021 hanya terealisasi sebanyak 264 Responden, kondisi ini meningkat dari responden survey pada tahun 2020 lalu yang hanya berjumlah 167 Responden.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL KINERJA YANG TELAH DICAPAI

Secara keseluruhan capaian kinerja merupakan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja., dengan ini dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat efisiensi sumber daya keuangan yang mendukung capaian kinerja pada Tahun 2021 Hal tersebut disebabkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Pendapatan yang tidak sesuai dengan target, sehingga ada beberapa program dan kegiatan harus dilakukan tunda bayar ke tahun berikutnya ;
2. Terjadinya refocusing anggaran. dikarenakan adanya pandemi covid 19;
3. Keterlambatan Dana Transfer Keuangan Ke Daerah (Dana TKKD) baik dari pusat maupun provinsi

Capaian program dan keuangan yang mendukung sasaran dan indikator sasaran strategis dapat dilihat pada table dibawah ini



Tabel 3.114

CAPAIAN PROGRAM DAN KEUANGAN YANG MENDUKUNG SASARAN DAN INDIKATOR

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	KINERJA		PROGRAM	KEUANGAN		CAPAIAN KEUANGAN (%)	INSTANSI	EFISIENSI (%)	
				TARGET 2020	REALISASI		TARGET 2021	REALISASI				
1.	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	1. Nilai ekspor (USD)	71,81 %	1.400.000,00	0,00	1.005.351.931,19	Peningkatan dan Pengembangan Exspor	1.400.000.000	1.876.960.134,0	7%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM	
		2. Nilai investasi (Rp)	177,73 %	50,68 Triliun	40,68 Triliun	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	22 T	51,47 T	101,56 %	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)		
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Jumlah produksi tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Tahun)	56,20 %	250								
		- Padi	85,47 %	320			250	27,80	11,12 %	Dinas Pangan dan Pertanian		
- Jagung	98,50 %	3.800		140,50		320	238,96	74,68 %				
		- Karet	98,67 %	830		3743	5,180	1,687				
		- Kelapa				819	136,31	%				
		2. Produktivitas komoditas tanaman pangan dan perkebunan (Ton/Ha)	50,21 %	2,4			203,25	%		Dinas Pangan dan Pertanian		
			92,82 %	2,9								



			- Padi - Jagung - Karet - Kelapa	95,83 % 90,60 %	0,38 0,70	0,36 0,63		2,4 2,9 0,38 830	2,84 3,24 0,80 1,687	118,33 % 111,72 % 210,52 % 203,25 %		
		3.	Jumlah produksi perikanan	94,56 %	56.000 Ton	52.952,82 Ton	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	56.000 Ton	34,545,42 Ton	61,69 %	Dinas Perikanan Kabupaten Karimun	
		4.	Jumlah ekspor usaha perikanan	53,75 %	7.800 Ton	4.192,63 Ton	2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	7.800 Ton	3,858 Ton	48,23 %	Dinas Perikanan Kabupaten Karimun	
3.	Terwujudnya Karimun Sebagai Daerah Wisata	1.	Jumlah kunjungan wisatawan asing	13,76 %	105.000 orang	14.451 orang	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	105.000 org	14451 Orang (**)	96,34%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		2.	Rata-rata lama wisatawan menginap	100 %	1,5 hari	1,5 Hari		1,5 hari	1,04 Hari	69,33 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penghubung antar Wilayah	1.	Panjang jalan terhubung antar wilayah dalam kondisi baik	97,14 %	643,98 Km	625,59 Km	1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	643,98 Km	631,61 Km	98,07%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



		2.	Jumlah titik akses106,9 % 1.133 titik penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4			1.212 Titik	Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	1.133 titik	1.215 Titik	63,59 % Permukiman dan Kebersihan	Dinas Perumahan Kawasan	
		3.	Persentase pulau berpenghuni yang terjangkau transportasi laut regular	63,59 %	62,90%	40 %	1. program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan pasilitas perhubungan 2. program peningkatan pelayanan angkutan 3. program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	62,90% 85,09 %	40 % 40%	98,91 % 73,66%	Dinas Perhubungan	
		4.	Persentase pelabuhan laut yang memadai	98,91 %	85,09 %	84,17 %					Dinas Perhubungan	
5.	Meningkatn ya Pemerataan Infrastrukt r Dasar	1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	82,41 %	65,04 %	53,60 %	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	65,04 %	67,28 %	103,4 %	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	
		2.	Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam	98,08 %	70,07 %	68,72 %	1. Progra m Peningkata Jalan dan	70,07%			Dinas Pekerjaan Umum dan	



			kondisi baik				Jembatan. 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan 4. Program Perencanaan Pengawasan dan Pengembangan Infrastruktur		Penataan Ruang			
		3.	Persentase wilayah terlayani jaringan komunikasi	103,4 %	90 %	93 %	Peningkatan Saranadan Prasarana Operator	95% (**)	93 (**)	97,89	Bagian Komunikasi Humas Setda	
6.	Menurunnya Penduduk Miskin	1.	Persentase penduduk miskin	94.92 %	6,50 %	6.83 %	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	6,50 %	6.85 %	94.62 %	Dinas Sosial	
7.	Meningkatn ya Derajat Kesehatan	1.	Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan	26,7	%79,85 per 100.000 kelahiran	134,4	Program Peningkatan Keselamatan	135 (**)	144,68 (**)	92,8	Dinas Kesehatan	



				Hidup (KH)		Ibu Melahirkan dan Anak					
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	109 %	14,30 per 1.000 kelahiran hidup (KH)	13		14,30	14,47	98,8	Dinas Kesehatan	
		3. Prevalensi terhadap penyakit HIV / AIDS	133,3 %	<0,22 %	0,02%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	0,09 (**)	0,07 (**)	122,2	Dinas Kesehatan	
8.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) -SD/MI - SMP / MTs	100,55 % 96,63 %	108,25 % 96,00 %	108,85 % 92,76 %	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Bantuan Operasional Sekolah	108,25 % 96,00 %	108,85 % 92,76 %	96,63 % 100,50 %	Dinas Pendidikan	
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) -SD/MI - SMP / MTs	100,50 % 96,87 %	98,00 % 76,00 %	98,49 % 73,62 %		98,00 % 76,00 %	98,49 % 73,62 %	96,87 % 71,36 %	Dinas Pendidikan	
		3. Angka pendidikan yang ditamatkan -SD/MI - SMP / MTs	71,36 % 106,55 %	25 % 20 %	32,16 % 18,69 %	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Bantuan Operasional Sekolah 3. Pendidikan Non-formal	25 % 20 % 100,90 %	32,16 % 18,69 %	106,55 %	Dinas Pendidikan	
		4. Angka melek huruf (AMH)	100,90 %	98,00 %	98,78%	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Bantuan	98,00 %	98,78%	100,16 %	Dinas Pendidikan	



							Operasi-onal Sekolah 3. Pendidikan Non-formal					
		5.	Angka harapan lama sekolah	100,16 %	12,17 Tahun	12,42 Tahun	1. Pendidikan Non-formal	12,17 Tahun	12,42 Tahun	98.00 %	Dinas Pendidikan	
9.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	98.00 %	60.98 %	59.76 %	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	61,22 %	60.86%	99.41 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
		2.	Persentase peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal.	99.21 %	3,8 %	3.77 %	1. Program Kesempatan dan Perluasan Kerja 2. Operasional Informasi Pasar Kerja	50,50% (**)	50,42 % (**)	99,84 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
10.	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	98,25 %	92,52 %	90,91 %	1. Progra m Peningkatan Kualitas hidup dan Per lindungan Perempuan 2. Progra m Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 3. Progra m Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak 4. Progra m Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	92,52	91,25	98,63 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA	



						dan Perempuan 5. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV-AIDS bagi Perempuan dan Anak					
11. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	41.43 %	0,70 %	1,11 %	1. Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 2. Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 4. Program Dukungan Sarana Pelayanan KB 5. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1,11 %	1,04 %	106,31 %	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP&PA		
12. Terwujudnya Pola dan Struktur Ruang yang Sesuai Dengan Tata	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	100,88 %	99,00 %	99,87 %	1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program	99,00 %	99,87%	100,88 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		



Ruang Wilayah						Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
13. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	94,47	72	68,02	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	72 ≥ 75	69,31% ≥ 71,41	96,2 6 % 94,2 0 %	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.	Nilai Adipura		≥ 75	Penilaian ditunda sampai pada waktu yang ditentukan oleh KLHK					Dinas Lingkungan Hidup	
	3.	Luas ruang terbuka hijau	100 %	191,12 Ha	191,12 Ha	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	191,12 Ha	213,12 Ha	115,11%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kebersihan	
	4.	Luas kawasan rawan bencana yang tertangani	119,29 %	58 Ha	69,19 Ha	1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	43 Ha	43,09 Ha	100,21%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



14.	Meningkatnya Aktivitas-Aktivitas Keagamaan	1.	Jumlah calon jemaah haji yang mendaftar	39,82 %	550 Orang	219 Orang	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan	550 Orang / 800 (** orang 1.250 Orang	794 (** Orang	99,25 % 63 %	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
		2.	Jumlah muzaki	69,68 %	1.250 Orang	871 Orang					Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
15.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah	1.	Indeks akuntabilitas	73,22	75	Masih Tahap Penilaian dari Kemenpan	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	73	72.08	98,74 %	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Baperlitbang 3. Inspektorat Daerah
		2.	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah		WTP	Masih Tahap Penilaian dari BPK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
16.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,62 %	> 3,5	3,35	1. Program Pengembangan Data/Informasi, kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	3,5	3,49	0,99%	1. RSUD Muhammad Sani .Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil .Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Selama Tahun 2021 yang tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja adalah ***baik sekali***. Namun masih terdapat kekurangan dimana masih ada beberapa indikator yang belum berhasil mencapai target. Kekurangan tersebut telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2021. Sasaran kinerja yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar



kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun 2021 mendatang dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin, sehingga Visi dan Misi Bupati dapat dicapai.

Adapun yang menjadi kendala yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran strategis sesuai dengan target yang ditentukan pada tahun 2021 antara lain:

1. Masih adanya aparatur yang kurang menyadari pemerintah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, secara efisien dan efektif.
2. Masih kurang optimalnya perhatian yang diberikan oleh pimpinan OPD dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Belum sempurnanya administrasi untuk mendukung data faktual guna memenuhi indikator target sasaran organisasi.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut, merupakan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2021, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pemerintahan yang baik sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pemikiran semata-mata,



namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan.
3. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real.
4. Melakukan perbaikan perencanaan dan indikator kinerja baik ditingkat Kabupaten maupun OPD yang baru melalui manajemen kinerja.
5. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja OPD yang baru.
6. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, pada tahun 2021 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Karimun Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Gedung C Lantai II
Tanjung Balai Karimun

website : <http://www.kab-karimun.go.id>

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Karimun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tg. Balai Karimun, 25 Maret 2022


INSPEKTUR

ASEP ZAINAL ABIDIN, SE
PEMBINA
NIP.19661102 199303 1 001